



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, disusun secara konkret dan sistematis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 90);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 42);
29. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/802/II/Bapplitbang dan Nomor 180/48/DPRD/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/803/II/Bapplitbang dan Nomor 180/49/DPRD/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan, yang disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi RKPD tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	: Pendahuluan;
Bab II	: Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
Bab III	: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
Bab IV	: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab V	: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
Bab VI	: Penutup.
- (3) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD menguraikan Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, yang diusulkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Provinsi menggunakan Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

The image shows the official circular stamp of the Governor of Kalimantan Tengah. The stamp features the provincial emblem in the center, surrounded by the words "GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

The image shows the official circular stamp of the Provincial Secretary of Kalimantan Tengah. The stamp features the word "SETDA" in the center, surrounded by the words "PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 15



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan kehendaknya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik. RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah harus bersinergi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya maupun dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN dan RKP).

Mengingat kompleksnya penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah maka perlu adanya kerjasama dari tim inti penyusun dokumen dengan *stakeholder* yang terkait. Dengan koordinasi yang baik, terkait data capaian target pembangunan, program dan kegiatan yang masih berjalan, hingga penganggaran/pendanaan yang merupakan inti dari pelaksanaan program kegiatan harus saling berintegrasi dan bersinergi. Sehingga optimalisasi pembangunan daerah dapat terwujud.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang berkontribusi dalam membantu penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga upaya dan jerih payah yang secara maksimal dilakukan menjadi persembahan terbaik bagi masa depan Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Meskipun telah diupayakan kesempurnaan penyusunan dokumen perencanaan ini, namun kami sadari masih perlu pembenahan dan perbaikan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan baik secara langsung maupun tertulis akan kami terima sebagai bahan evaluasi perumusan dokumen perencanaan ke depan

Terakhir, semoga Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini dapat dipergunakan sebagai panduan pembangunan daerah periode tahun 2019 oleh setiap Perangkat Daerah/Dinas/Instansi terkait dan mendorong peningkatan kinerja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

**KEPALA BAPPEDALITBANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Ir. YUREN S. BAHAT, MM, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630510 119003 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD	I-8
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN (TAHUN 2016) DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-2
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-3
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-33
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-55
2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2019 Triwulan I	II-62
2.3. Permasalahan Pembangunan Kalimantan Tengah	II-203
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-203
2.3.1.1 Masalah Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	II-204
2.3.1.2 Masalah Pengembangan Ekonomi Lokal	II-205
2.3.1.3 Masalah Kualitas dan Keterjangkauan Pendidikan	II-205
2.3.1.4 Masalah Bidang Kesejahteraan Sosial	II-206
2.3.1.5 Masalah Pengembangan Kapasitas Birokrasi	II-206
2.3.1.6 Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam	II-207
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Perubahan Asumsi Dasar RKPD	III-2
3.1.2 Perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah	III-5

3.1.3	Tantangan dan Proses Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	III-14
3.2.	Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	III-16
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-16
3.2.1.1	Perubahan Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2019	III-16
3.2.1.2	Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	III-25
3.2.1.3	Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2019	III-29
3.2.2	Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-34
3.2.2.1	Perubahan arah kebijakan pendapatan daerah	III-34
3.2.2.2	Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-34
3.2.2.3	Perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah	III-36
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019	IV-11
4.3	Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	IV-13
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD	
5.1	Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Daerah	V-1
BAB VI	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II- 3
Tabel 2.2	Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017	II- 6
Tabel 2.3	Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2017	II- 7
Tabel 2.4	Statistik kependudukan menurut kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II- 10
Tabel 2.6	Sebaran Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II- 12
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Tahun 2018	II- 13
Tabel 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2018 (Persen)	II- 17
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2018	II- 19
Tabel 2.10	Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 (Persen)	II- 22
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018	II- 26
Tabel 2.12	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II- 27
Tabel 2.13	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2018	II- 30
Tabel 2.14	Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II- 33
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II- 34
Tabel 2.17	Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016	II- 36
Tabel 2.18	Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016	II- 37
Tabel 2.19	Prevalensi Stunting (TB/U) Balita Usia 0-59 Bulan	II- 38
Tabel 2.20	Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2012-2016	II- 40
Tabel 2.21	Jumlah Penerbangan dan Penumpang yang melalui Bandar Udara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018	II- 44
Tabel 2.22	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II- 48
Tabel 2.23	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018	II - 49
Tabel 2.24	Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Subsektor Perkebunan Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017	II- 49
Tabel 2.25	Produksi Budidaya Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2018	II- 50

Tabel 2.26	Populasi dan Produksi Hasil Ternak Menurut Jenis Ternak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II- 51
Tabel 2.27	Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015	II-53
Tabel 2.28	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Industri Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2018	II - 53
Tabel 2.29	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2018	II- 54
Tabel 2.30	Jumlah Izin Usaha Pertambangan dan Luas Wilayah (Eksplorasi dan Produksi) Menurut Jenis Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	II- 55
Tabel 2.31	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 (Rupiah)	II- 56
Tabel 2.32	Nilai Tukar Petani per Subsektor Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah Februari 2019	II- 57
Tabel 2.33	Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Kalimantan Tengah	II- 58
Tabel 2.34	Target dan Realisasi Kinerja Daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018	II-64
Tabel 2.36	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Triwulan I	II - 122
Tabel 3.1	Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018	III- 5
Tabel 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018	III- 8
Tabel 3.3	Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2018 (Persen)	III- 13
Tabel 3.4	Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013-2018	III- 15
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 31 Mei 2019	III- 16
Tabel 3.6	Pendapatan Pada Perubahan Tahun Anggaran 2019	III- 24
Tabel 3.7	Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2019	III- 28
Tabel 3.8	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2019	III- 30
Tabel 3.9	Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2019	III- 31
Tabel 4.1	Sasaran Makro Pembangunan Berdasarkan Capaian Tahun 2018	IV- 1
Tabel 4.2	Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	IV- 14
Tabel 5.1	Pagu Indikatif SKPD Pada Perubahan RKPD Tahun 2018 (Belanja Langsung)	V - 2
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2019	V - 13

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2018 (Jiwa)	II – 11
Gambar 2.2	Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (Persen)	II – 13
Gambar 2.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018*) (Milyar Rupiah)	II – 16
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018*) (Persen)	II – 17
Gambar 2.5	Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (persen)	II – 20
Gambar 2.6	Laju Inflasi Tahunan Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun 2014-2018*) (persen)	II – 22
Gambar 2.7	Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018	II – 23
Gambar 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018	II – 25
Gambar 2.9	Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018 (Tahun)	II – 29
Gambar 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018 (%)	II – 31
Gambar 2.11	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018*) (Persen)	II – 32
Gambar 2.12	Prokorsi Status Gizi Sangat Pendek pada Balita Menurut kabupaten/Kota 2013-2018	II – 39
Gambar 2.13	Jumlah Kapal yang melalui Pelabuhan Laut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016	II – 42
Gambar 2.14	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016	II – 45
Gambar 2.15	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II – 46
Gambar 2.16	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II – 47
Gambar 2.17	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/Bulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2017 (Rupiah)	II – 56
Gambar 2.18	Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah	II – 60
Gambar 2.19	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	II – 61
Gambar 2.20	Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II – 62
Gambar 3.1	Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (AHDB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2018 (Milyar Rupiah)	III - 7
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah 2011-2018 (Persen).	III - 8

Gambar 3.3	Struktur Perekonomian Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) Tahun 2018	III - 11
Gambar 3.4	Laju Inflasi Tahunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2018 (Persen)	III – 12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai amanat tersebut, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kewilayahan, termasuk kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu perwujudan perencanaan daerah adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen yang mempunyai peran penting dalam menghubungkan rencana pembangunan daerah ke penganggaran. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SOPD). RKPD juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Di samping itu, konsistensi perencanaan pembangunan daerah dapat dinilai dari RKPD yang merupakan dokumen operasionalisasi dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga dari dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Penjabaran tersebut sebagai langkah menuju pencapaian pembangunan jangka menengah periode tahun 2016-2021 meliputi pemenuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga peningkatan taraf perekonomian makro dan mikro yang telah dirasakan oleh masyarakat.





Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan RKPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Memperhatikan ketentuan Pasal 356 dan 357 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa :

1. Perubahan RKPD merupakan dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
3. Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

1. 2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan, dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan Perubahan APBD.





Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan Triwulan II Tahun 2019 serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
2. Merupakan operasionalisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019.
3. Menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dalam rangka penentuan kegiatan prioritas.
4. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
5. Memelihara konsistensi antara tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
6. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
7. Merupakan landasan untuk menetapkan program/kegiatan prioritas dan rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan prioritas tahun anggaran berikutnya;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);





2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran





- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);





16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);





23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 42);
27. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/802/II/Bapplitbang dan Nomor 180/48/DPRD/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
28. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/803/II/Bapplitbang dan Nomor 180/49/DPRD/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.





1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2018 pada tanggal 25 Juni 2018. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 tersebut memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, serta menjadi referensi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian ada konsistensi antara kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, bahwa perubahan terhadap dokumen RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang di atas.

Berkaitan pertimbangan tersebut di atas, beberapa hal yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, antara lain:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana yang ada dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019, serta APBD TA. 2018;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2018) harus digunakan untuk tahun berjalan (Tahun Anggaran 2019);
3. Adanya pergeseran kegiatan, baik dalam unit Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah; penghapusan kegiatan; penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif; penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan; serta perubahan lokasi dan kelompok





sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun Anggaran 2019, serta nantinya menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2019.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, dasar penyusunan, dasar pertimbangan dilakukannya perubahan, serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN, berisi uraian tentang hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan Tahun 2019 sampai dengan triwulan II, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, yang antara lain berisi tentang gambaran umum kondisi daerah, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, yakni menguraikan tentang perubahan asumsi dasar RKPD yang meliputi kondisi ekonomi daerah tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019, tantangan dan prospek perekonomian tahun 2019 dan 2020; perubahan kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan (perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah), serta perubahan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH menguraikan tentang program dan kegiatan yang menjadi sasaran dan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018.





BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, menguraikan tentang tujuan dan sasaran RPJMD dan kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2018; menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan baik antar unit Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan, yang disusun menurut urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah (urusan wajib dan pilihan)

BAB VI PENUTUP, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan agar Perubahan RKPD berdaya guna.





BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)

TAHUN 2019

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki beraneka ragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang cukup strategis, menjadikan kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Provinsi Kalimantan Tengah layak untuk diperjuangkan. Banyaknya sungai beserta anak-anak sungainya di Kalimantan Tengah sejak jaman dulu telah menjadi nilai positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya sungai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu penopang kehidupan utama masyarakat Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah lahir dari penataan kembali Provinsi di regional Kalimantan dimana dahulunya provinsi ini merupakan wilayah Kalimantan Selatan. Selama pembentukan wilayah administrasi tingkat I (Provinsi) Kalimantan Tengah, tahapan demi tahapan pelaksanaan pembangunan daerah telah direncanakan, dicanangkan, dan direalisasikan hingga periode saat ini sebagai upaya pencapaian target pembangunan daerah (khususnya) maupun pembangunan nasional pada umumnya.

Guna lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pembangunan, evaluasi program kegiatan maupun capaian kinerja pemerintah daerah harus dilaksanakan seoptimal mungkin sebagai syarat mutlak penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan yang telah disusun, utamanya bagi perencanaan pembangunan ke depan. Evaluasi pembangunan daerah harus memiliki integrasi antardokumen perencanaan sebagai poin penting dalam menyempurnakan setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode berikutnya, tak terkecuali evaluasi terhadap setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah (tahunan).

Pada perkembangannya, dalam mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah daerah yang telah direalisasikan perlu dilakukan pula analisa singkat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, hingga permasalahan pembangunan sebagai





bahan kajian dan perbaikan kinerja aparatur kelembagaan pemerintahan yang akan datang sekaligus masukan positif dalam merumuskan setiap detail sasaran hingga program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2019 menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2019, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2019 sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan antara lain menguraikan tentang 1) gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing; 2) pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; 3) permasalahan pembangunan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan. Merunut ke belakang berdasarkan wilayah geografisnya, provinsi Kalimantan Tengah dahulu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari aspek geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kesamaan karakteristik dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan yang ditandai dengan luasnya wilayah hutan, rawa-rawa, hingga lahan gambut. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki banyak sungai yang melewati berbagai wilayah daratan dengan sungai terpanjangnya yaitu Sungai Barito (mencapai 900 km).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibu kota provinsi di Palangka Raya. Secara geografis, kota Palangka Raya terletak di pertengahan wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibu kota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti: kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Barat. Simultannya pembangunan daerah yang terjadi di setiap kabupaten/kota ini dimungkinkan terjadi karena letak pusat pemerintahan yang strategis sehingga membuka peluang





tumbuhnya wilayah-wilayah yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah secara merata dan berkesinambungan.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan letak, batas, dan luas wilayah; kondisi topografi; geologi dan tanah; hidrologi; serta klimatologi.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak Geografis, Batas, dan Luas Wilayah

Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45’ Lintang Utara hingga 3°30’ Lintang Selatan dan 110°45’ Bujur Timur hingga 115°51’ Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Batas utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Batas timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Batas selatan : Laut Jawa; serta
- Batas barat : Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai ± 153.564,5 km². Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kotawaringin Barat	10.759	6	94
2	Kotawaringin Timur	16.796	17	185
3	Kapuas	14.999	17	233
4	Barito Selatan	8.830	6	93
5	Barito Utara	8.300	9	103
6	Katingan	17.500	13	161





No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
7	Seruyan	16.404	10	100
8	Sukamara	3.827	5	32
9	Lamandau	6.414	8	90
10	Gunung Mas	10.805	12	128
11	Pulang Pisau	8.997	8	99
12	Murung Raya	23.700	10	125
13	Barito Timur	3.834	10	103
14	Kota Palangka Raya	2.399,5	5	30
Kalimantan Tengah		153.564,5	136	1.576

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

Kabupaten/kota terluas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kabupaten Murung Raya yang memiliki wilayah seluas 23.700 km² atau 15,43 persen dari total luas wilayah. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki wilayah paling kecil adalah kota Palangka Raya dengan luas hanya 1,56 persen dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl.





3. Geologi dan Tanah

Dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berbagai data dan informasi dasar terkait dengan potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung, dan kerawanan fisik berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Perihal potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas III, IV, dan V dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

4. Hidrologi

Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut, khususnya pada musim kemarau, relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

5. Klimatologi

Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu. Berdasarkan pengamatan klimatologi, suhu udara maksimum mencapai 35,90 derajat celcius yang berada di Pangkalan Bun, namun rata-rata suhu udara tertinggi berada di Kota Palangka Raya yakni mencapai 27,37 derajat celcius. Selain itu, kelembaban udara dan persentase penyinaran matahari tertinggi berada di Pangkalan Bun, namun curah hujan bulanan tertinggi berada di Kota Palangka Raya.





Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No	Indikator	Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka Raya
1	Suhu Udara					
	- Maksimum	35,20	35,40	35,80	36,20	35,20
	- Minimum	20,60	20,20	20,80	19,80	21,40
	Rata-rata	26,80	26,80	27,10	27,10	27,50
2	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	86,90	81,80	86,20	84,80	82,80
3	Tekanan Udara (mb)	1010,00	1010,70	1012,50	1012,20	1012,90
4	Kecepatan Angin (knot)	2,00	2,50	2,70	4,00	4,40
5	Curah Hujan Bulanan (mm3)	2557,80	3069,80	2784,70	3416,10	3451,40
6	Penyinaran Matahari (%)	59,10	53,50	51,54	47,60	54,90

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

B. Potensi Pengembangan Wilayah

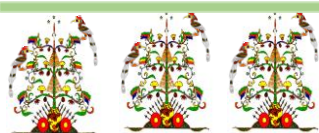
Potensi pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan pola lahan areal hutan dan pola penggunaan lahan areal non hutan.

1. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah secara alamiah menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori bioregion hutan. Selain itu, pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga masih menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, wilayah hutan mendominasi di semua kabupaten/kota, termasuk di wilayah kota Palangka Raya. Khusus di kabupaten Barito Timur, dominasi wilayah hutan kurang dominan.

2. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal penggunaan pertanian non perkebunan besar dan areal pemukiman berkembang sepanjang sungai-sungai besar yang melintasi





daratan sementara areal perkebunan besar memulai pola perkembangan berbeda, yaitu cenderung tidak mengikuti sungai besar. Hal ini karena penyesuaian terhadap ketersediaan infrastruktur penunjang lainnya, seperti: aksesibilitas wilayah hingga tipologi jenis tanah.

C. Kawasan Rawan Bencana

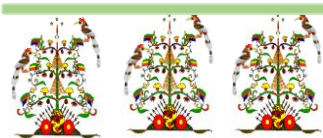
Secara umum Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari potensi-potensi bencana alam, baik yang dipicu oleh faktor geografis dan kondisi wilayahnya maupun yang disebabkan oleh ulah manusia. Secara lengkap jumlah kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana					
	Perahu Tenggelam	Kebakaran	Banjir	Tanah Longsor	Angin Topan	Total
2014	-	71	37	-	7	115
2015	1	11	14	-	1	27
2016	-	25	132	-	-	157
2017	-	25	132	-	-	157

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, secara umum jenis bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain kebakaran, tanah longsor dan banjir. Dari 115 kejadian di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 27 pada tahun 2015. Kemudian kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2016 menjadi 157 kejadian. Kejadian bencana paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 132 yang berupa bencana banjir. Di tahun 2017, masih belum ada penurunan jumlah bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu pada kasus Bencana masih menjadi masalah yang menjadi perhatian di Kalimantan Tengah. Kejadian bencana terbesar adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan yaitu masing-masing sebesar 793 desa/kelurahan (banjir), 486 desa/kelurahan (kebakaran hutan dan lahan), dan kejadian kekeringan sebanyak 310 desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang mengalami kejadian bencana lainnya antara lain bencana tanah longsor





sebanyak 57 desa/kelurahan, angin puyuh/ puting beliung/topan sebanyak 71 desa/kelurahan, banjir bandang sebanyak 14 desa/kelurahan, dan gelombang pasang laut sebanyak 19 desa/kelurahan.

Apabila dilakukan pemetaan terhadap potensi bencana alam maka daerah-daerah rawan bencana alam di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 sebagai berikut:

1. Kawasan rawan tanah longsor

Mencakup daerah yang membentang dari barat-timur wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dengan kondisi topografi berupa perbukitan-pegunungan, yaitu: di kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Katingan, Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Utara.

2. Kawasan rawan gelombang pasang

Meliputi kawasan yang berada di daerah pantai, yaitu: di Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, dan Kapuas.

3. Kawasan rawan banjir

Terpusat pada daerah-daerah di sekitar sungai besar, meliputi: Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sebangau, Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Lamandau, Sungai Arut, dan Sungai Jelai. Pada tahun 2015 menurut data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 14 (empat belas) kejadian banjir, yaitu di kabupaten Murung Raya sebanyak 4 (empat) kejadian, kabupaten Katingan 3 (tiga) kejadian, kabupaten Kotawaringin Timur dan kota Palangka Raya masing-masing 2 (dua) kejadian, serta kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Gunung Mas masing-masing 1 (satu) kejadian.

4. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebaran lahan gambut yang besar dengan luas mencapai 2.743.158 ha, dengan kedalaman 0-2 m seluas 1.157.163 ha dan kedalaman di atas 2 m seluas 1.585.995 ha (hasil analisa Peta Sebaran Lahan Gambut BBDSLP tahun 2011).

Lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan area yang rawan terbakar. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah,





dilaporkan bahwa pada tahun 2015 tercatat bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 56 (lima puluh enam) kali. Bencana yang paling sering terjadi dengan jumlah kejadian terbanyak terdapat di kota Palangka Raya sebanyak 12 (dua belas) kali dan kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 11 (sebelas) kali.

Terkait musibah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015, baik di Kalimantan Tengah maupun di regional Kalimantan, memberikan dampak negatif dalam bidang perekonomian maupun pembangunan daerah secara umum. Hal ini dikarenakan asap yang merupakan hasil ikutan dari proses pembakaran telah menyebar dan cukup pekat sehingga sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan. Dengan demikian, musibah kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan gambut ini harus diantisipasi dikemudian hari dengan menelaah faktor-faktor penyebab kebakaran apa saja yang mendominasi terjadinya bencana ini.

D. Demografi

Dinamika dan kondisi penduduk sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Peran penduduk (manusia) adalah subjek sekaligus objek pembangunan, artinya penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan juga pihak yang dibangun atau sasaran pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil pembangunan yang diharapkan, penting adanya melihat pertumbuhan demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya serta pemahaman yang komprehensif mengenai potensi, hambatan, peluang dan tantangan kependudukan.

1. Gambaran Umum Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, dari data hasil proyeksi jumlah penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 telah mencapai **2.660.209** jiwa. Penyebaran penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa kabupaten induk, Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 304.082 jiwa, Kotawaringin Timur berjumlah 456.409 jiwa dan Kabupaten Kapuas berjumlah 356.382 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang minoritas berada di Kabupaten Sukamara dan Lamandau dengan penduduk yang berjumlah 60.512 jiwa dan 80.512 jiwa.

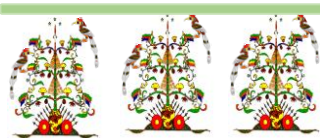


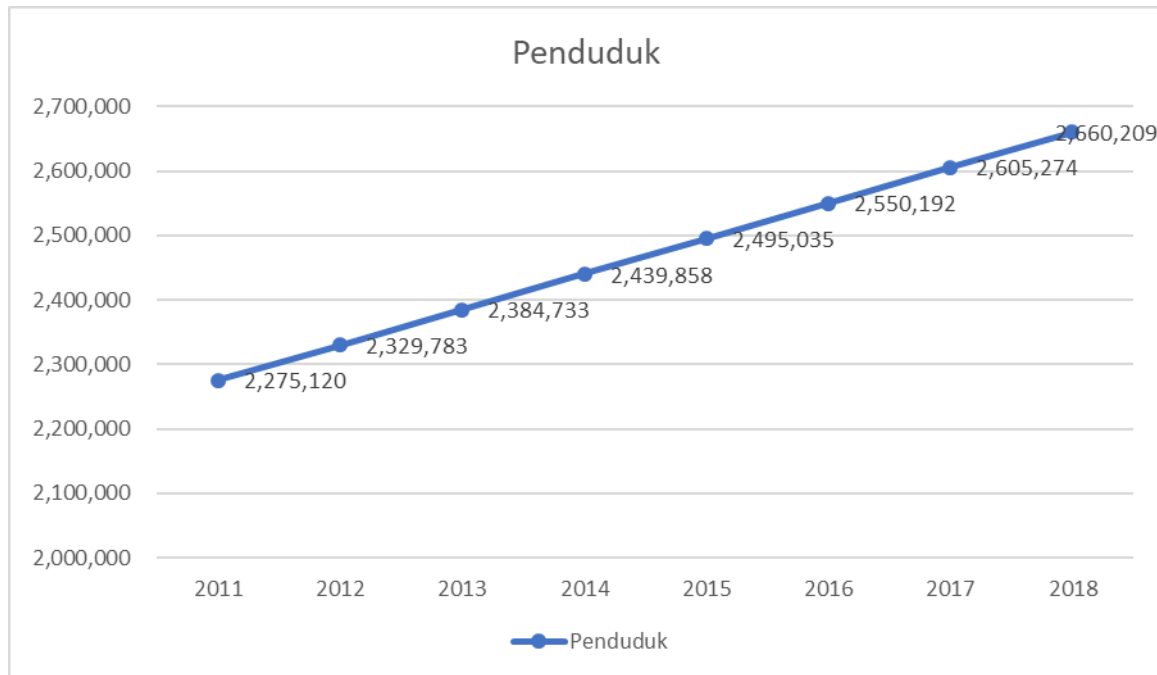


Tabel 2.4
Statistik Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
1	Kotawaringin Barat	304.082	28
2	Kotawaringin Timur	456.409	27
3	Kapuas	356.382	24
4	Barito Selatan	135.736	15
5	Barito Utara	130.019	16
6	Sukamara	60.512	16
7	Lamandau	80.512	13
8	Seruyan	197.839	12
9	Katingan	167.706	10
10	Pulang Pisau	126.657	14
11	Gunung Mas	117.457	11
12	Barito Timur	123.557	32
13	Murung Raya	118.197	5
14	Kota Palangka Raya	283.612	118
Kalimantan Tengah		2.660.209	17

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2019





Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Februari 2019

Gambar 2.1

Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2018 (Jiwa)

Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh hampir seluruh anak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 17 (tujuh belas) orang per kilometer persegi. Meskipun sudah banyak kebudayaan multi etnis dan multi budaya yang hadir di Provinsi Kalimantan Tengah, namun etnis awalnya, yaitu suku Dayak, masih eksis berkembang di beberapa wilayah. Hal inilah yang menjadikan karakteristik budaya yang khas masih melekat dengan kehidupan dan kebudayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Sex Ratio Penduduk Kalimantan Tengah

Data sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Sex ratio penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 sebesar 110, yang berarti bahwa disetiap 100 penduduk perempuan terdapat 110 penduduk laki-laki. Sex Ratio Kalimantan Tengah mencapai 110 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kalimantan Tengah 10 persen lebih banyak dibandingkan penduduk





perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk setiap 100 pasang laki-laki dan perempuan, terdapat 10 orang laki-laki yang tidak memiliki pasangan.

3. Distribusi Penduduk Kalimantan Tengah

Tabel 2. 6
Sebaran Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase
1	Kotawaringin Barat	304.082	11.43 %
2	Kotawaringin Timur	456.409	17.16 %
3	Kapuas	356.382	13.40 %
4	Barito Selatan	135.736	5.10 %
5	Barito Utara	130.019	4.89 %
6	Sukamara	60.512	2.27 %
7	Lamandau	80.512	3.03 %
8	Seruyan	197.839	7.44 %
9	Katingan	167.706	6.30 %
10	Pulang Pisau	126.657	4.76 %
11	Gunung Mas	117.457	4.42 %
12	Barito Timur	123.557	4.64 %
13	Murung Raya	118.197	4.44 %
14	Kota Palangka Raya	283.612	10.66 %
Kalimantan Tengah		2.660.209	

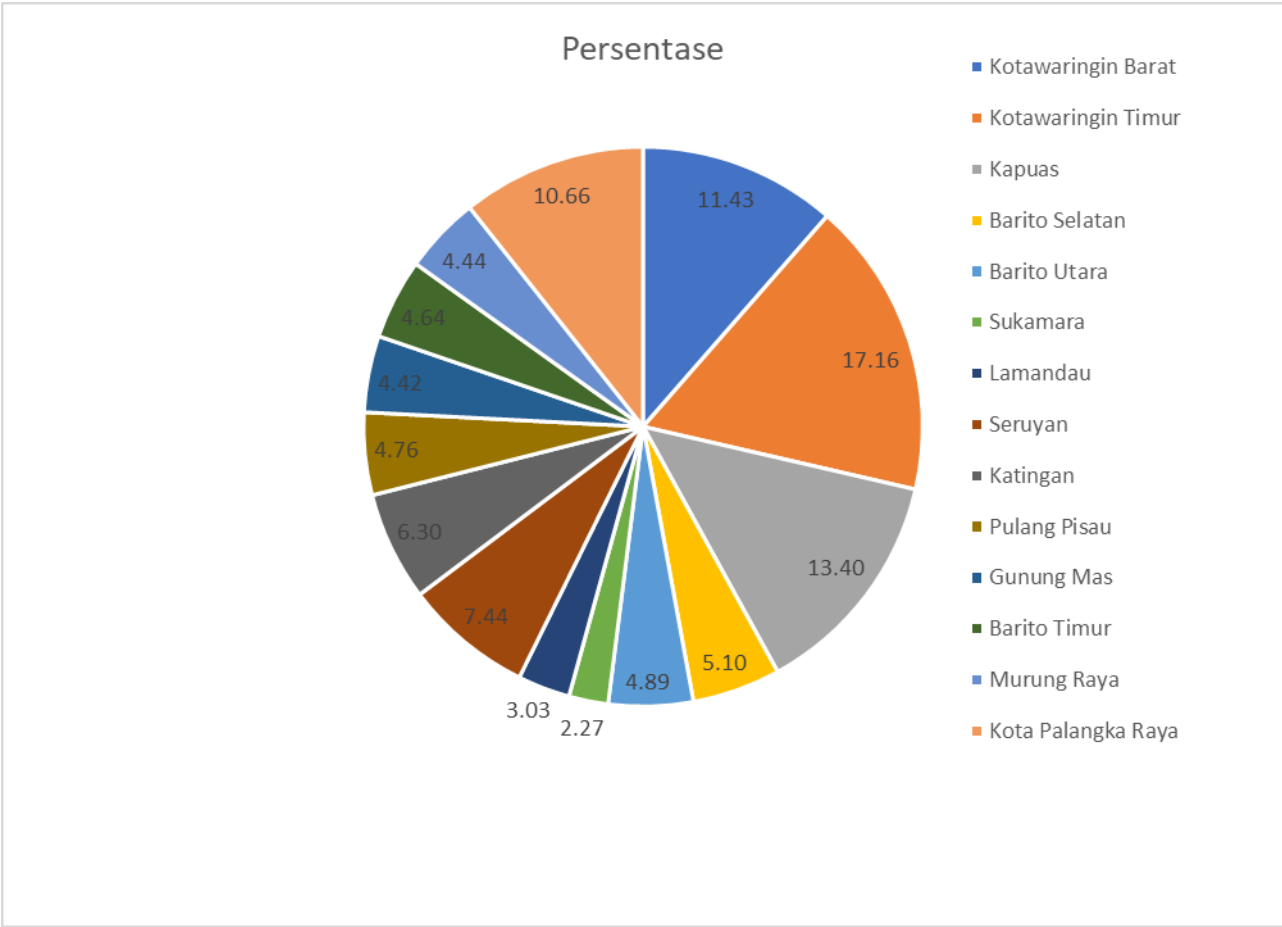
Sumber: BRS Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2019

Persebaran penduduk di Kalimantan Tengah secara umum cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kotawaringin Timur (17,16 persen), Kapuas (13,40 persen), dan Kotawaringin Barat (11,43 persen). Kemudian, kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah menduduki peringkat ke empat populasi penduduk dengan persentase penduduk 10,66 persen. Penduduk dengan persentase hunian terkecil adalah Kabupaten





Sukamara sebesar 2,27 persen dan Kabupaten Lamandau sebesar 3,03 persen.



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik 2019

Gambar 2.2
Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018
(Persen)

Komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	0 – 4	254200	9.6%
2	5 – 9	241800	9.1%





No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
3	10 – 14	234200	8.8%
4	15 – 19	225800	8.5%
5	20 – 24	226500	8.5%
6	25 – 29	235200	8.8%
7	30 - 34	236800	8.9%
8	35 – 39	230900	8.7%
9	40 – 44	213500	8.0%
10	45 – 49	173900	6.5%
11	50 – 54	134400	5.1%
12	55 - 59	98700	3.7%
13	60 - 64	67100	2.5%
14	65 -69	41300	1.6%
15	70-74	24300	0.9%
16	75+	21600	0.8%
Jumlah Total		2.660.209	100%

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik 2019 (Proyeksi Penduduk)

Berdasarkan data pada tabel di atas, Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah dengan kelompok umur usia non produktif adalah penduduk dengan umur kurang dari 15 tahun (< 15 tahun) dan umur 65 tahun ke atas yaitu sebesar 30 persen, sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70 persen. Memperhatikan komposisi persentase penduduk usia produktif Provinsi Kalimantan Tengah yang memperlihatkan usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif merupakan potensi demografi bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Bila dilihat berdasarkan sudut pandang pembangunan, struktur penduduk yang demikian sangat menguntungkan masyarakat karena beban ketergantungan usia non produktif semakin berkurang atau mengecil.





Dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif tersebut perlu didukung dan diimbangi adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS, Jumlah Angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 1.416,2 ribu orang, meningkat sebanyak 18,9 ribu orang dibanding Februari 2018 dengan komponen pembentuk Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebanyak 1.369,0 ribu orang, naik 16,2 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 47,2 ribu orang mengalami peningkatan sebanyak 2,8 ribu orang dibanding setahun yang lalu..

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus pembangunan daerah, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Berikut hasil analisis dari masing-masing fokus aspek kesejahteraan masyarakat.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada intinya akan memperlihatkan kondisi perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah secara makro tanpa mengindahkan fenomena mikro perekonomian masyarakat. Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan, baik migas maupun non migas termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi maupun struktur ekonominya. Selain itu, indikator lain yang juga dapat memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah laju inflasi dan indeks gini (*gini ratio*).

1. Pertumbuhan PDRB Regional

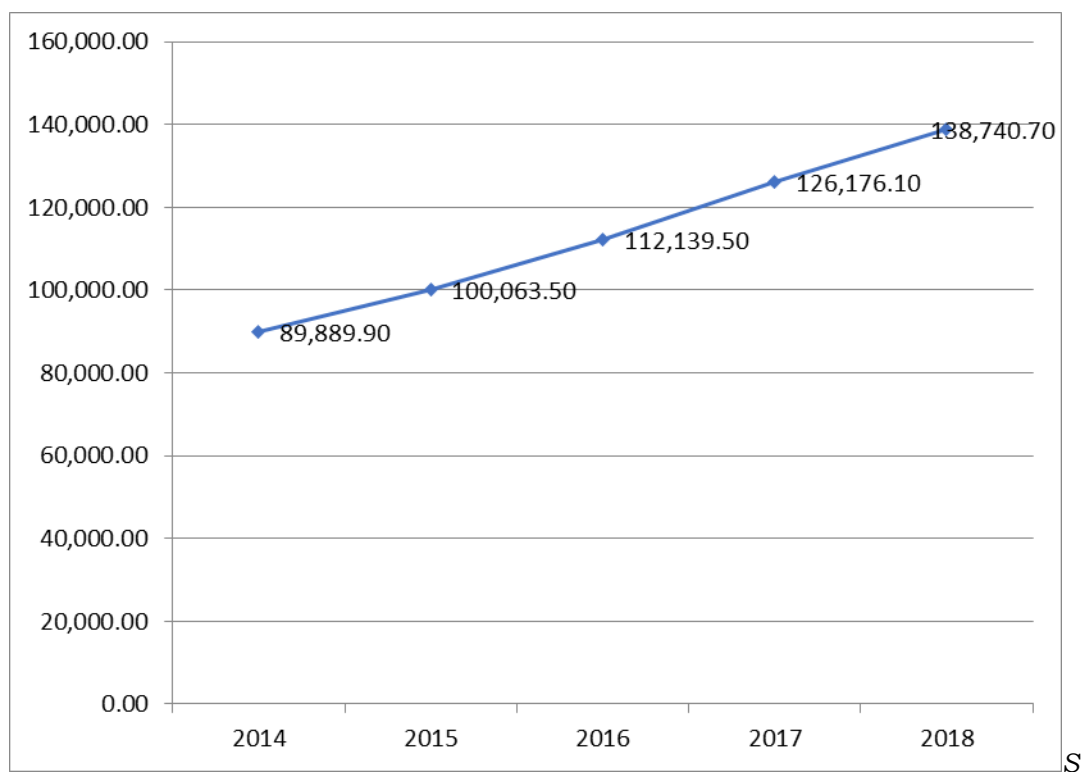
Pembangunan daerah tidak pernah lepas dari pertumbuhan ekonomi regional, baik mikro maupun makro. Berdasarkan kontribusi sektor ekonomi tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor andalan guna menyokong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.





Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun terjadi kenaikan secara konsisten dimana pada tahun 2015, angka PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 100.063,50 miliar rupiah. Kemudian, pada tahun 2016 mencapai 112.139,50 miliar rupiah dan pada tahun 2017 126.176,10 miliar rupiah. Sedangkan pada Tahun 2018 PDRB Kalimantan Tengah naik menjadi 138.740,7 Milyar Rupiah.



umber: Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Gambar 2.3

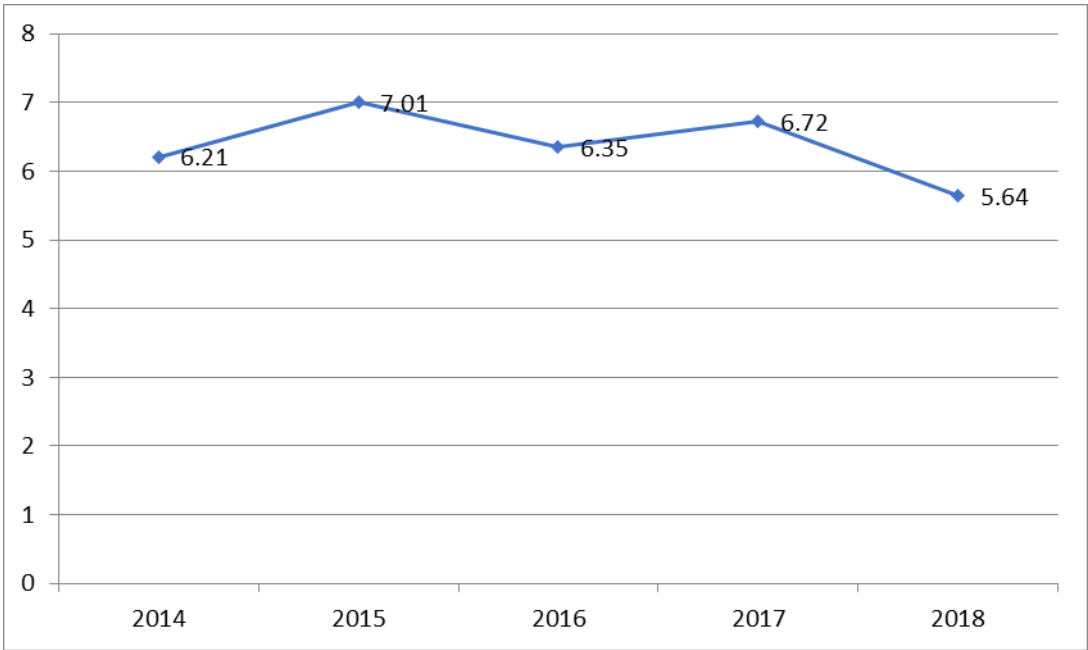
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018) (Milyar Rupiah)**

Dalam rentang waktu empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cukup stabil dengan kisaran 6 persen hingga 7 persen. Pada tahun 2015, perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh





7,01 persen, mengalami percepatan perekonomian jika dibanding tahun 2014 sebesar 6,21 persen. Namun pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perlambatan mencapai 6,36 persen (year on year). Angka ini dapat dikatakan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan kembali menjadi 6,72 persen dan Selanjutnya Pada Tahun 2018 Turun dan Mengalami perlambatan 5,64 dikarenakan adanya faktor-faktor dari beberapa sektor yang mengalami Penurunan Secara Signifikan.



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik, 2019 (laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah)

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018
(Persen)

Tabel 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2018 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,84	4,52	6,94
2	Pertambangan dan Penggalian	7,560	8,75	-0,02
3	Industri Pengolahan	7,45	9,06	5,03





No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,34	5,82	9,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	4,35	0,12	8,21
6	Konstruksi	7,82	5,29	1,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,29	8,02	11,30
8	Transportasi dan Pergudangan	9,17	8,27	8,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,86	5,42	6,87
10	Informasi dan Komunikasi	6,23	6,38	8,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,27	8,88	2,14
12	Real estate	5,36	4,24	8,66
13	Jasa Perusahaan	6,03	5,45	7,79
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	4,21	7,54
15	Jasa Pendidikan	6,21	3,69	8,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,40	5,64	8,57
17	Jasa Lainnya	6,84	4,11	3,38
Provinsi Kalimantan Tengah		6,35	6,72	5,64

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah , 2019

Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016 dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,34 persen, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,17 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,86 persen.

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan kembali menjadi 6,72 persen. Sektor yang paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,30 persen dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,88 persen, serta sektor pertambangan dan





penggalian mengalami kenaikan yaitu 8,78 persen. Namun sektor yang mengalami penurunan yang signifikan adalah sektor pengadaan listrik dan gas menjadi 5,82 persen.

Pada Tahun 2018 Perlambatan ekonomi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, meski mengalami perlambatan Ada sektor-sektor yang tetap tumbuh secara signifikan diantaranya dari sektor Pengelolaan Air ,pengolahan Sampah dan Daur ulang Sebesar 8,09 persen, Jasa pendidikan 8,71 persen dan Real Estate menjadi 8,66 persen.Sektor yang mengalami penurunan yang cukup besar adalah pada sektor Pertambangan dan penggalian - 0,02 persen , jasa keuangan dan asuransi yang turun 6,74 persen dari tahun sebelumnya dengan angka 8,88 persen turun menjadi 2,14 Persen disusul oleh sektor Pengolahan yang ikut mengalami penurunan menjadi 5.03 persen.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 - 2018

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja			
		2015	2016	2017*	2018**
1	Kotawaringin Barat	7,32	5,85	6,88	6,83
2	Kotawaringin Timur	7,66	7,93	7,99	-
3	Kapuas	7,27	7,29	7,62	-
4	Barito Selatan	5,54	5,62	5,84	-
5	Barito Utara	5,29	5,48	6,01	-
6	Sukamara	6,01	6,18	6,27	6,18
7	Lamandau	6,76	6,70	6,68	6,80
8	Seruyan	5,17	5,02	5,15	5,18
9	Katingan	6,53	6,54	6,56	-
10	Pulang Pisau	7,71	6,06	5,86	-
11	Gunung Mas	6,96	7,00	6,93	-
12	Barito Timur	5,25	5,16	5,50	5,98





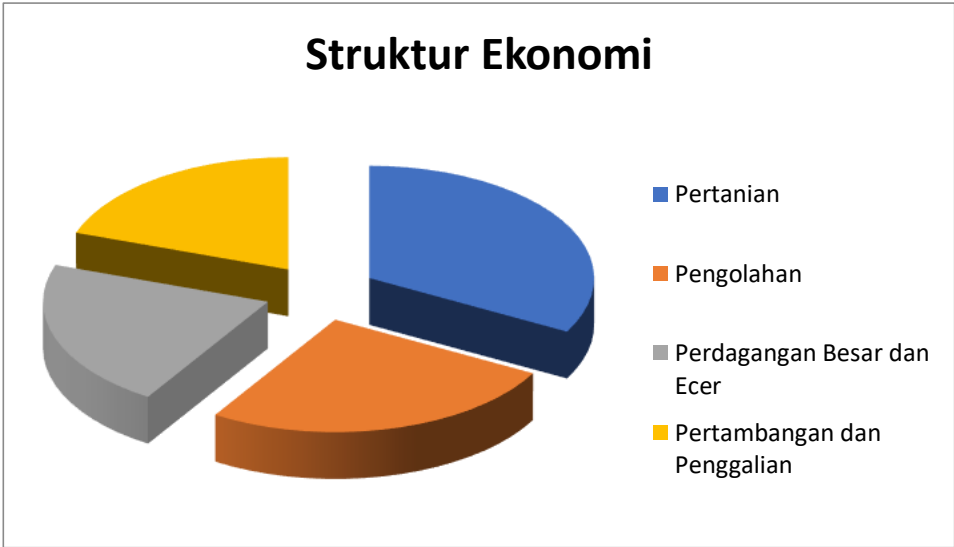
No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja			
		2015	2016	2017*	2018**
13	Murung Raya	6,88	5,71	5,82	-
14	Kota Palangkaraya	7,19	6,92	6,96	-
Kalimantan Tengah		7,01	6,35	6,72	5,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Resmi 2019

- * Angka Sementara
- ** Data Belum Tersedia

2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh Empat lapangan usaha utama, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (19,86 persen); industri pengolahan (15,71 persen); serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (12,89 persen), ditambah dari Sektor Pertambangan dan Penggalian (11,88 persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah ,Berita Resmi Statistik Tahun 2019

Gambar 2.5

Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (Persen)



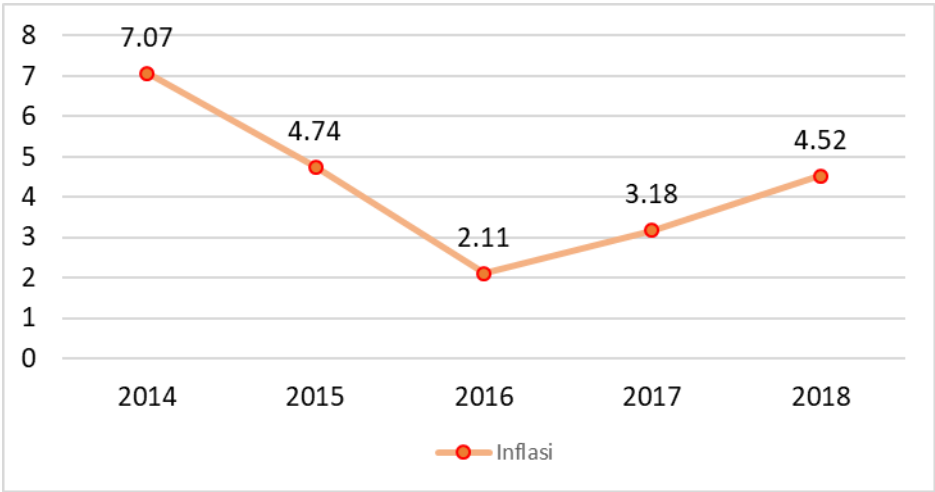


3. Laju Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi secara series dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, dan/atau menurunnya produksi, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah berfluktuatif. Laju inflasi pada tahun 2014 mencapai 7,07 persen. Namun pada tahun 2015, laju inflasi menurun hingga pada tahun 2016 menjadi 2,11 persen dan mengalami kenaikan menjadi 3,18 persen pada tahun 2017 dan 4,52 persen pada tahun 2018. Inflasi yang rendah dapat juga menjadi indikasi turunnya daya beli masyarakat, meskipun di sisi lain angka ini mengasumsikan rendahnya kenaikan harga. Diharapkan, pemerintah daerah terus mendorong kestabilan inflasi yang akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.





Sumber: Statistik Dasar Laju Inflasi Tahun ke Tahun Provinsi Kalimantan Tengah 2010 – 2019 (diolah)

Gambar 2.6
Laju Inflasi Tahunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 (Persen)

Tabel 2.10					
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 (Persen)					
Keterangan (Inflasi-yoy)	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi Tahunan Palangka Raya	6,63	4,20	1,91	3,11	3,68
Inflasi Tahunan Sampit	7,90	5,72	2,46	3,29	6,02
Inflasi Kalimantan Tengah	7,07	4,74	2,11	3,18	4,52
Inflasi Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik, Januari 2019

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari realisasi inflasi Kota Palangka Raya dan realisasi inflasi Kota Sampit. Inflasi tahunan tertinggi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2014, dimana inflasi tahunan Palangka Raya sebesar 6,63 persen dan inflasi tahunan Kota Sampit sebesar 7,90 persen sehingga inflasi Kalimantan Tengah mencapai 7,07 persen, angka tersebut masih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 8,36 persen. Inflasi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan hingga di tahun 2016 menjadi 2,11 persen lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,02 persen dimana inflasi

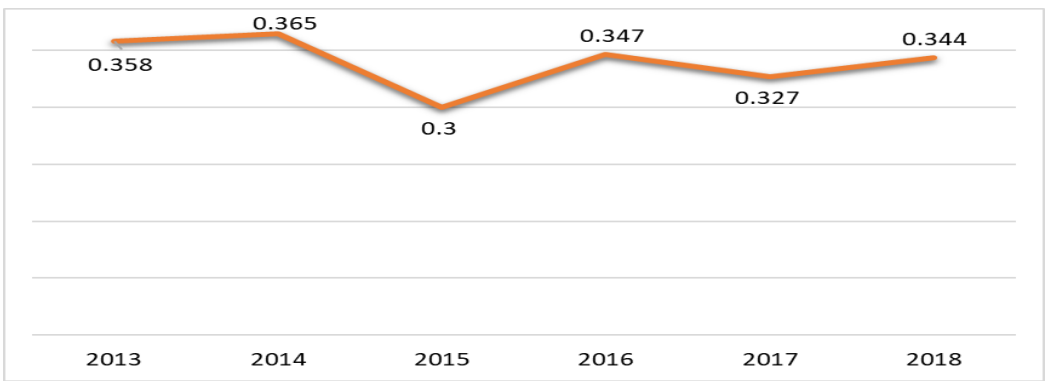




tahunan di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit sebesar 1,91 persen dan 2,46 persen. Tahun 2017 dan tahun 2018, inflasi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan hingga mencapai 4,52 persen di tahun 2018 dengan inflasi tahunan Kota Palangka Raya sebesar 3,68 persen dan inflasi tahunan Kota Sampit sebesar 6,02 persen. Kedua kota tersebut merupakan Kota Indeks Harga Konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penghitungan laju inflasi. Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga yang terjadi dengan tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

4. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan, antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Januari 2019

Gambar 2.7
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018



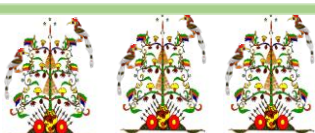


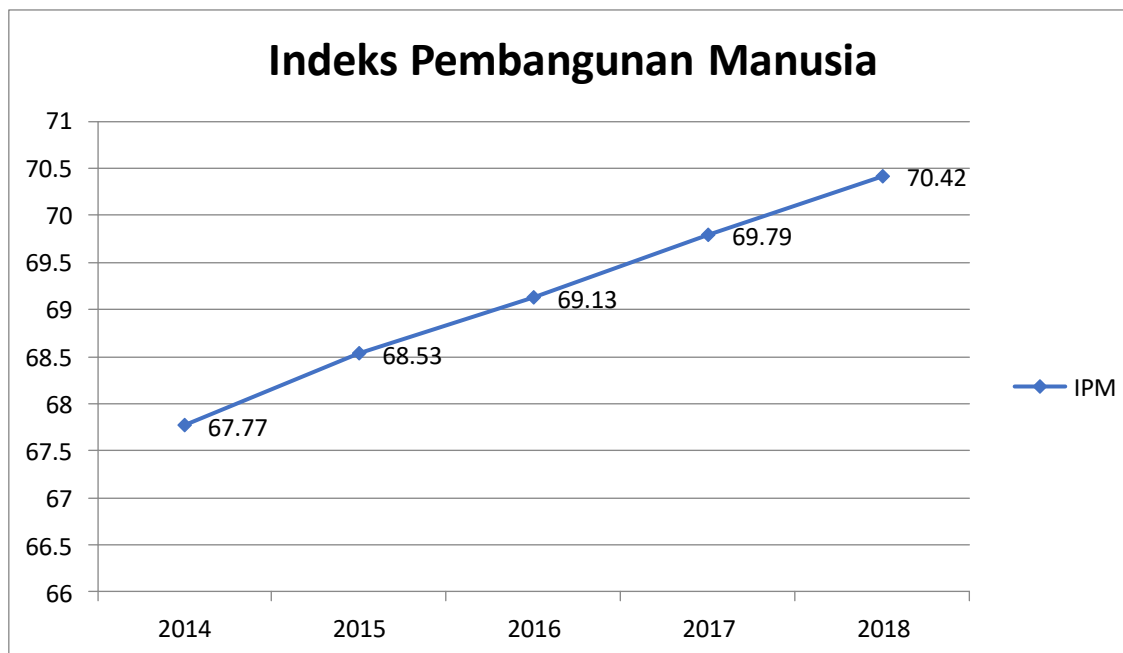
Melihat angka indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013-2018 sebagaimana gambar 2.7 di atas, terindikasi bahwa terjadi penambahan ketimpangan pendapatan antar penduduk anata tahun 2013 hingga 2014 dimana indeks gini di tahun 2013 sebesar 0,358 meningkat menjadi 0,365 di tahun 2014. Ketimpangan menurun pada tahun 2015 dimana indeks gini ratio sebesar 0,3. Indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengalai kenaikan sebesar 0,347 pada tahun 2016 menjadi 0,344 pada tahun 2018 meskipun ada penurunan tipis pada tahun 2017 menjadi 0,327. Secara umum, peningkatan indeks gini memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin “tidak merata” dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta seni budaya dan olahraga. Dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah. Dan, sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah) serta ekonomi masyarakat (pengeluaran per kapita yang disesuaikan).



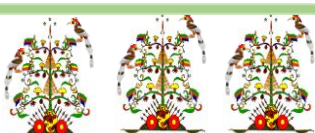


Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, April 2019

Gambar 2.8

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2014-2018**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2014, IPM Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 67,77 dan seiring berjalannya waktu, IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2016 mencapai angka 69,13. Pada tahun 2017 IPM Provinsi Kalimantan Tengah naik kembali mencapai 69,79 kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 70,42. Peningkatan IPM yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian.





Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kotawaringin Barat	70,14	70,60	71,13	72,11	72,46
2	Kotawaringin Timur	68,45	68,61	69,42	70,17	70,56
3	Kapuas	65,29	66,07	66,98	68,04	68,68
4	Barito Selatan	66,61	68,27	69,00	69,25	69,73
5	Barito Utara	66,30	67,38	68,28	69,07	69,72
6	Sukamara	64,44	65,80	66,40	66,98	67,52
7	Lamandau	67,53	68,30	68,54	69,17	69,70
8	Seruyan	63,49	64,77	65,40	66,14	67,04
9	Katingan	65,79	66,81	67,41	67,56	67,91
10	Pulang Pisau	65,00	65,76	66,49	67,00	67,54
11	Gunung Mas	68,13	69,24	69,73	69,95	70,23
12	Barito Timur	69,12	69,71	70,33	70,57	70,82
13	Murung Raya	66,10	66,46	66,96	67,16	67,56
14	Kota Palangka Raya	78,50	78,62	79,21	79,69	80,34
Kalimantan Tengah		67.77	68.53	69.13	69.79	70,42

*Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah, April 2019*

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada di Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPM sebesar 79,21 pada tahun 2016 dan di tahun 2017 IPM tertinggi masih di Kota Palangka Raya sebesar 79,69. Sedangkan kabupaten/kota yang Indeks Pembangunan Manusianya terendah adalah Kabupaten Seruyan dengan indeks sebesar 65,40 ditahun 2016 dan di tahun 2017 mencapai 66,14. Sedangkan pada tahun 2018 indeks pembangunan manusia tertinggi pada Kota Palangka





Raya dengan angka 80,34 dan indek pembangunan yang masih rendah pada Kabupaten seruyan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia di angka 67,04. Berikut data komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dari aspek kesehatan dan pendidikan menurut kabupaten/kota, di sajikan dalam tabel 2.12 di bawah ini.

Tabel 2.12

Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah
1	Kotawaringin Barat	70,43	12,70	8,36
2	Kotawaringin Timur	69,75	12,68	7,90
3	Kapuas	68,64	12,54	7,51
4	Barito Selatan	66,89	12,53	8,69
5	Barito Utara	71,28	12,40	8,59
6	Sukamara	71,45	12,10	7,84
7	Lamandau	69,31	12,46	7,95
8	Seruyan	69,24	11,97	7,76
9	Katingan	65,62	12,21	8,65
10	Pulang Pisau	67,92	12,39	7,70
11	Gunung Mas	70,24	11,76	8,97
12	Barito Timur	68,06	12,81	9,05
13	Murung Raya	69,43	11,73	7,45
14	Kota Palangka Raya	73,16	14,93	11,42
Kalimantan Tengah		69,64	12,55	8,37

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, April 2019

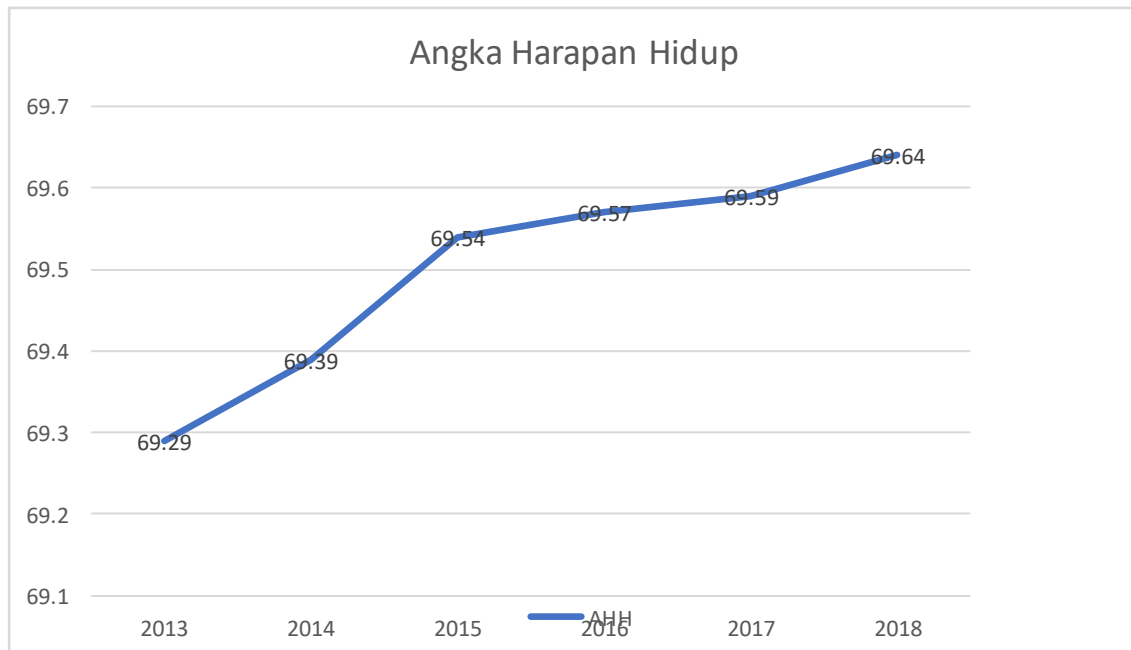




1. Kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2013, angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 69,29 tahun, kemudian mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2015 yang mencapai 69,54 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2017, angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 69,59 tahun. Hal tersebut berarti bayi yang baru dilahirkan mencapai usia hidup 69-70 tahun. Pada Tahun 2018, Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan, dimana angka harapan hidup naik 0,05 Poin dari angka 69,59 pada tahun 2017 menjadi 69,64. Dengan demikian Angka harapan hidup rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 69-70 tahun dari setiap Bayi Yang baru dilahirkan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.9 yang menggambarkan kenaikan Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun, di bawah ini.





Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan Berita Resmi Statistik BPS, Januari 2019

Gambar 2.9
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2013-2018 (Tahun)

2. Pendidikan

Secara umum, bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat. Pada tahun 2016, angka harapan lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 12,33 tahun yang berarti bahwa penduduk saat ini memiliki harapan untuk mengikuti jenjang pendidikan hingga 12,33 tahun lamanya atau sama dengan jenjang Perguruan Tinggi semester 1. Pada tahun 2017 angka harapan sekolah meningkat menjadi 12,45 hal itu berarti jenjang pendidikan sama dengan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi hingga semester 2. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah selama 7,73 tahun dan setelah lima tahun berselang angka tersebut beranjak naik hingga 8,29 tahun. Analisa awal menunjukkan bahwa masyarakat usia 15 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah hingga jenjang pendidikan SMP kelas 3 semester kedua. Peningkatan Angka





harapan lama lama sekolah dan Rata-rata lama Sekolah Provinsi kalimantan Tengah pada tahun 2018, pada Angka Harapan Lama sekolah naik 0,1 pion dari tahun 2017 dari angka 12,45 menjadi 12,55 dan angka Rata-rata Lama sekolah naik menjadi 8,37 dari 8,29 atau mengalami peningkatan 0,08 poin. Dengan demikian sampai pada tahun 2018 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah masih di angka 12,55 Tahun yang berati Tingkat pendidikan mencapai pada jenjang Perguruan Tinggi.

Tabel 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2018

No	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
1	2012	11,22	7,73
2	2013	11,71	7,79
3	2014	11,93	7,82
4	2015	12,22	8,03
5	2016	12,33	8,13
6	2017	12,45	8,29
7	2018	12,55	8,37

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, April 2019

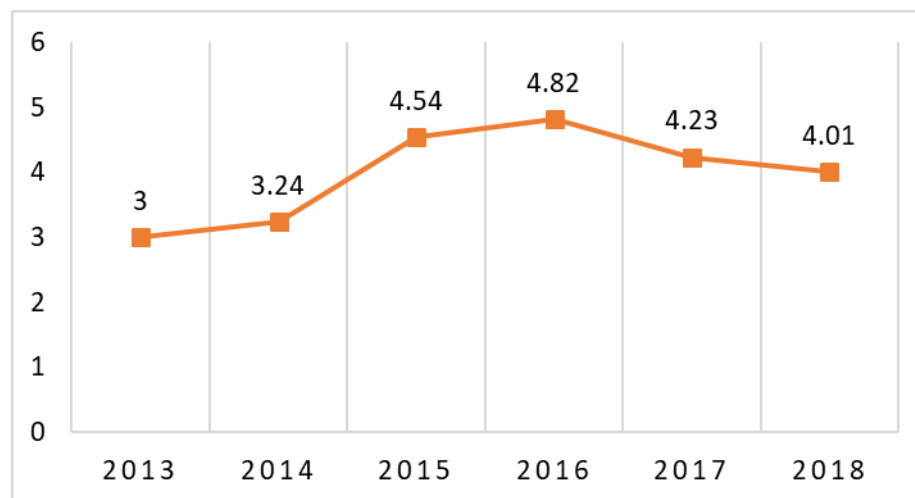
3. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan, yang mana TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 sebesar 3 persen menjadi 4,82 persen di tahun 2016. Selanjutnya TPT Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir yaitu 4,23 persen di tahun 2017 menjadi 4,01 persen di tahun 2018. Memperhatikan angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah dalam 6





(enam) tahun terakhir, perlu mendapat perhatian khusus oleh *stakeholders* ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, utamanya dalam mengatasi jumlah pengangguran. Adanya penurunan angka TPT pada tahun 2017 dan 2018, hal itu berarti terdapat banyak lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan pihak lainnya.



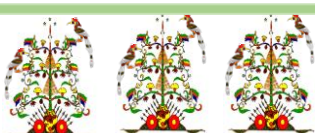
Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

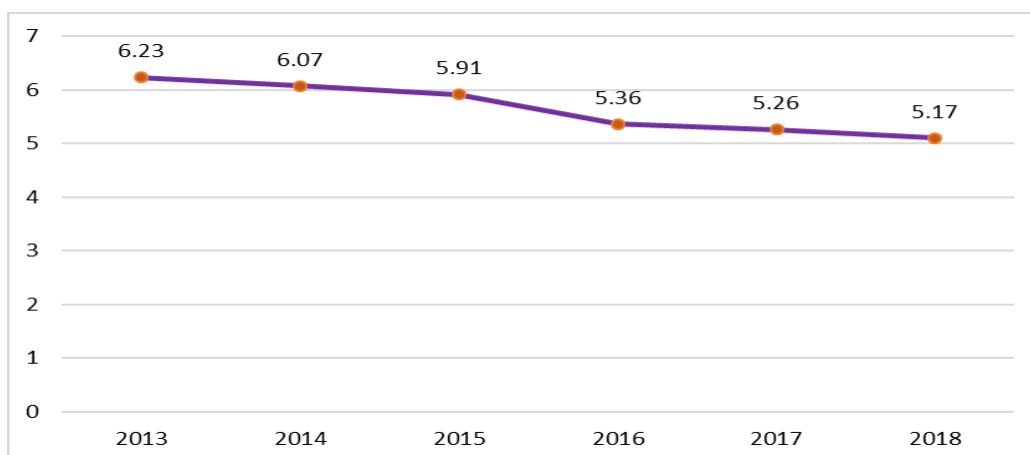
Gambar 2.10

**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2013-2018 (%)**

4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu regional berdiri. Oleh karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu tercantum kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.



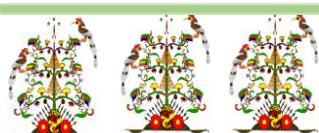


Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Gambar 2.11
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2013-2018 (Persen)

Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Berdasarkan kondisi tingkat kemiskinan bulan september dari tahun ke tahun, pada tahun 2013, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 6,23 persen secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada tahun 2014 mencapai 6,07 persen dan menurun kembali pada tahun berikutnya hingga mencapai angka 5,91 persen dan pada tahun 2016 menjadi 5,36 persen dan di tahun 2017 menurun menjadi 5,10 persen. Pada tahun 2018 naik sedikit menjadi sebesar 5,17 persen.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, berdasarkan angka kemiskinan bulan Maret 2018, angka kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Seruyan sebesar 7,43 persen. Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 28,20 ribu jiwa. Dengan Adanya Penurunan angka kemiskinan menandakan sudah mulai berjalannya program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan. Semakin Tinggi angka penurunannya maka indikator keberhasilan Program-program yang ada dikatakan berhasil.





Tabel 2.14
Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (000)
1	Kotawaringin Barat	334.337	4,27	12,90
2	Kotawaringin Timur	393.474	6,21	28,20
3	Kapuas	291.820	5,20	18,52
4	Barito Selatan	389.405	4,55	6,16
5	Barito Utara	450.936	5,00	6,50
6	Sukamara	442.086	3,19	1,96
7	Lamandau	411.088	3,15	2,52
8	Seruyan	428.539	7,43	14,56
9	Katingan	420.418	5,22	8,73
10	Pulang Pisau	349.978	4,51	5,71
11	Gunung Mas	388.964	5,10	5,96
12	Barito Timur	478.510	6,56	8,05
13	Murung Raya	422.639	6,28	7,39
14	Kota Palangka Raya	353.853	3,47	9,78
Kalimantan Tengah		401.537	5.17	136.93

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan BRS Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan





pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni pertanian, pariwisata, jasa dan perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan sebagainya yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

a) Pendidikan

Gambaran umum keadaan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain tercermin dari angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 pada tahun 2010 mencapai 98,70 persen dan meningkat menjadi 99,25 persen pada tahun 2014 dan 99,26 persen pada tahun 2015. Kemudian, partisipasi sekolah pada penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari sebesar 86,83 persen pada tahun 2010 menjadi 85,10 persen pada tahun 2014 dan 85,61 persen tahun 2015. Sama halnya untuk penduduk usia 16-18 tahun, angka partisipasi sekolahnya meningkat dimana pada tahun 2010 memiliki angka partisipasi sekolah sebesar 54,50 persen kemudian meningkat menjadi 77,50 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia 16-18 tahun tetap sebesar 77,50 persen.

Peningkatan angka partisipasi sekolah paling tinggi dialami oleh penduduk yang mengenyam bangku pendidikan sekolah menengah atas dan sederajat. Hal ini dikarenakan, penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan hingga level SMA sederajat tidak sebanyak penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan SD maupun SMP sederajat. Faktor penyebabnya sebagian besar karena aksesibilitas pendidikan yang kurang, permasalahan biaya pendidikan serta adanya kecenderungan untuk bekerja mencari nafkah membantu keluarga.

Tabel 2.16

Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	Angka Partisipasi Sekolah	98,70	98,84	99,20	99,22	99,25	99,26





No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(7-12 tahun)*						
1.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:13	1:15	1:17	1:19	1: 25	1:25
2	SMP/MTs						
2.1.	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun)*	86,83	84,59	85,05	85,05	85,10	85,61
2.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:15	1:16	1:17	1:18	1: 22	1:22
3	SMA/MA/SMK						
3.1.	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)*	54,50	55,75	55,06	64,74	77,50	77,50
3.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:14	1:16	1:17	1:18	1: 20	1:20

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

b) Kesehatan

Sarana prasarana kesehatan yang menunjang untuk optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat sangat menentukan dalam kebijakan pembangunan dalam bidang kesehatan. Hal ini karena segala fasilitas dan infrastruktur kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, perhatian pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan menjadi perlu dan penting untuk ditindaklanjuti. Hasil analisis terhadap pelayanan wajib di bidang kesehatan menggambarkan sarana dan prasana kesehatan, tenaga medis dan para medis sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.





Tabel 2.17

Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016

No	Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah sakit	18	18	19	20	20
2	Kapasitas tempat tidur RS	1.505	1.580	1.609	1.870	1.970
3	Puskesmas induk	193	195	195	195	195
4	Puskesmas pembantu	1.022	1.041	1.041	1.063	1063
5	Polindes/poskesdes/rumah bersalin	524	486	548	640	755
6	Dokter gigi	162	110	113	118	116
7	Dokter umum	533	463	479	483	567
8	Dokter spesialis	83	126	171	176	197
9	Bidan	2.370	1.994	2.478	2.505	2.307
10	Perawat	4.043	4.303	4.604	4.652	4.747
11	Apoteker/assisten apoteker	337	349	387	404	370

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

Sarana prasarana kesehatan untuk masyarakat berupa rumah sakit, pada tahun 2016 tidak mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya yaitu 20 (dua puluh) buah, yang terdiri dari 1 rumah sakit jiwa, 1 rumah sakit TNI, 1 rumah sakit POLRI, 16 rumah sakit daerah, dan 1 rumah sakit swasta. Demikian juga untuk Puskesmas induk tidak mengalami penambahan yaitu 195 puskesmas.

Pada tahun 2016, jumlah dokter di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 880 orang, terdiri dari 116 dokter gigi, 567 dokter umum, dan 197 dokter spesialis. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 777 dokter. Kemudian, untuk tenaga kesehatan lainnya, seperti: bidan berjumlah 2.307 orang, perawat 4.747 orang, dan tenaga kefarmasian mencapai 370 orang.





Tabel 2.18
Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2012-2016

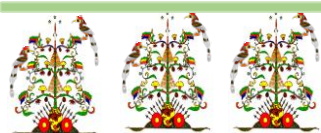
No	Rasio	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tempat tidur rumah sakit per jumlah penduduk	0,66	0,66	0,69	0,76	0,77
2	Dokter per jumlah penduduk	26,45	19,42	19,63	18,68	22,23
3	Tenaga Medis Per Jumlah Jumlah Penduduk	0,34	0,29	0,37	0,30	
4	Puskesmas per jumlah penduduk	2,54	2,45	2,40	2,34	2,29
5	Bidan per jumlah penduduk	89,68	83,62	101,56	99,20	90,46

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalteng, 2018

Rasio sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana tabel 2.16 di atas menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) berdasarkan jumlah penduduk. Demikian halnya dengan rasio dokter dan tenaga medis menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dan tenaga medis dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Semakin besar rasio menandakan semakin baiknya ketersediaan dan layanan sarana dan prasarana kesehatan yang ada.

• **Stunting (Gizi Buruk)**

Isu stunting (tinggi badan di bawah standar/pendek) kian gencar terdengar dikarenakan masih tingginya stunting di Indonesia. WHO menetapkan Indonesia sebagai Negara dengan status gizi buruk. Hal ini berdasarkan data yang tercatat di WHO bahwa 7,8 Juta dari 23 Juta balita adalah stunting atau sekitar 35,6 %. Sebanyak 18,5 % kategori sangat pendek dan 17,1 % dengan kategori pendek. Sedangkan berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2016 ditemukan bahwa sebanyak 21,7 % bayi usia di bawah dua tahun (Baduta) mengalami stunting menurut usianya. Angka tersebut terdiri



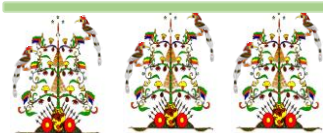


dari 7,1 % baduta dengan tinggi badan dengan status sangat pendek dan 14,6 % dengan status tinggi badan pendek.

Berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, tingkat stunting keseluruhan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 41,3%. Jumlah ini mulai menurun dimana berdasarkan Riskesdas tahun 2018 tingkat stunting Provinsi Kalimantan Tengah turun menjadi 34,04%. Namun jumlah prosentase tersebut masih di atas nasional, dimana berdasar riskesdas tahun 2018 stunting nasional yaitu 30,8%. Kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu berada di Kabupaten Kotawaringin Timur (48,84%), Kabupaten Barito Timur (42,05%), Kabupaten Kapuas (41,53%). Kabupaten Barito Selatan (40,19%), Kabupaten Gunung Mas (38,21%). Berdasarkan penetapan prioritas stunting oleh Pemerintah, sebagai focus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu tahun 2018 adalah Kabupaten Barito Timur, tahun 2019 yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas, dan pada tahun 2020 yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Gunung Mas. Tingginya prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut menjadi perhatian untuk ditanggulangi secara lebih intens, terintergrasi dan bersinergi.

Tabel 2.19
Prevalensi Stunting (TB/U) Balita Usia 0-59 Bulan
PREVALENSI STUNTING (TB/U)

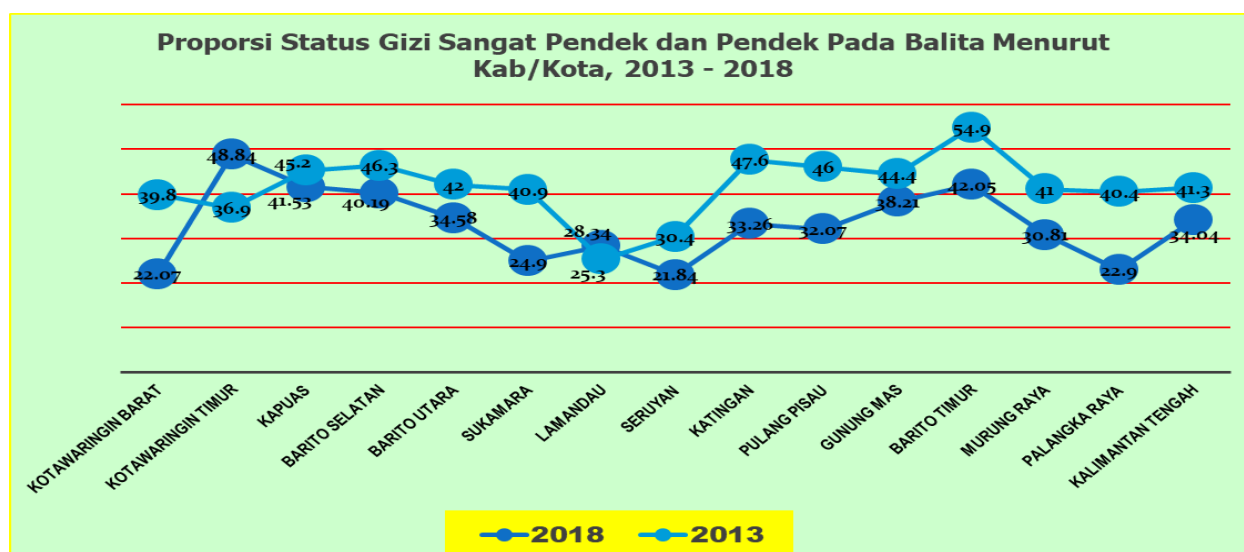
KAB/KOTA	2015	2016	2017	RISKESDAS 2018	RISKESDAS 2013
1. Ktw. Barat	25,2	34,4	36,9	22,07	39,8
2. Ktw. Timur	26,0	40,7	41,8	48,84	36,9
3. Kapuas	26,7	39,3	44,1	41,53	45,2
4. Barsel	33,6	29,2	42,1	40,19	46,3
5. Barut	27,5	36,8	37,2	34,58	42
6. Sukamara	38,3	20,5	27,9	24,9	40,9





PREVALENSI STUNTING (TB/U)					
KAB/KOTA	2015	2016	2017	RISKESDAS 2018	RISKESDAS 2013
7. Lamandau	45,6	28,4	37,8	28,34	25,3
8. Seruyan	23,5	38,3	33,4	21,84	30,4
9. Katingan	26,7	33,8	34,5	33,26	47,6
10. Pulpis	49,5	32,0	35,3	32,07	46,0
11. Gumas	32,8	34,5	48,1	38,21	44,4
12. Bartim	50,0	34,5	35,8	42,05	54,9
13. Mura	30,8	47,9	46,7	30,81	41
14. P.Raya	29,7	28,8	33,9	22,9	40,4
KALTENG	33,3	34,1	39,0	34,04	41,3
INDONESIA	29,0	27,5	29,6	30,8	37,2

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2019



Gambar 2.12
Proporsi Status Gizi Sangat Pendek pada Balita menurut Kabupaten/Kota 2013-2018

c) Perhubungan

1) Jalan dan Angkutan Darat

Dari total panjang jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.102,08 km, kondisi permukaan jalan baik mengalami





penurunan dari 1.694,71 km di tahun 2012 menjadi 1.291,70 km pada tahun 2016; kondisi sedang mengalami kenaikan dari 662,89 km di tahun 2012 menjadi 1.414,26 km pada tahun 2016; kondisi rusak mengalami penurunan dari 312,69 km di tahun 2012 menjadi 256,82 km pada tahun 2016; dan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 144,54 km di tahun 2012 menjadi 139,30 km di tahun 2016, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2012-2016

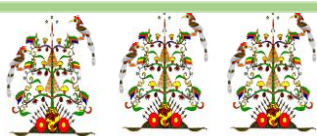
No	Jalan (Nasional dan Provinsi)	Panjang Jalan (km)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik	1.694,71	1.647,08	1.595,76	1.635,51	1.291,70
2.	Kondisi Sedang Rusak	662,89	817,52	933,09	1.133,64	1.414,26
3.	Kondisi Rusak	312,69	250,61	217,95	246,14	256,82
4.	Kondisi Rusak Berat	144,54	99,62	68,03	86,79	139,30
	Jalan secara keseluruhan (nasional dan provinsi)	2.814,8	2.814,8	2.814,8	3.102,08	3.102,08

Sumber: Kalteng Dalam Angka, 2018, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 2018

2) Pelabuhan laut

Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pelabuhan laut sebagai sarana jasa perdagangan serta angkutan penumpang dan barang (ekspor, impor, maupun lokal) yang terdiri dari:

- a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan utama**, yaitu pelabuhan Sampit;

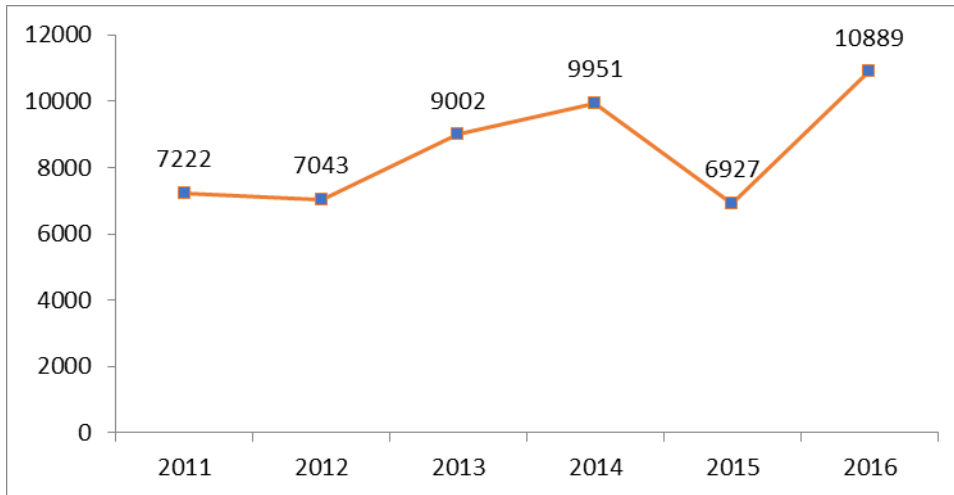




- b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpul**, yaitu:
- 1) Pelabuhan Kumai di kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 2) Pelabuhan Pangkalan Bun di kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 3) Pelabuhan Sukamara di kabupaten Sukamara;
 - 4) Pelabuhan Teluk Segintung di kabupaten Seruyan;
 - 5) Pelabuhan Batanjung di kabupaten Kapuas;
 - 6) Pelabuhan Pulang Pisau di kabupaten Pulang Pisau; dan
 - 7) Pelabuhan Kuala Kapuas di kabupaten Kapuas.
- c. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpan regional**, yaitu:
- 1) Pelabuhan Kelanis di kabupaten Barito Selatan;
 - 2) Pelabuhan Ranga Ilung di kabupaten Barito Selatan;
 - 3) Pelabuhan Pegatan Mendawai di kabupaten Katingan;
 - 4) Pelabuhan Bagendang di kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 5) Pelabuhan Kereng Bangkirai di kota Palangka Raya;
 - 6) Pelabuhan Teluk Sebangau di kabupaten Pulang Pisau;
 - 7) Pelabuhan Bukit Pinang di kota Palangka Raya; dan
 - 8) Pelabuhan Kuala Pembuang di kabupaten Seruyan.
- d. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpan lokal**, yaitu:
- 1) Pelabuhan Bahaur di kabupaten Pulang Pisau;
 - 2) Pelabuhan Samuda di kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - 3) Pelabuhan Kuala Jelai di kabupaten Sukamara.
- e. Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan **sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI)** adalah:
- 1) PPI Bahaur di kabupaten Pulang Pisau;
 - 2) PPI Batanjung di kabupaten Kapuas;
 - 3) PPI Kuala Jelai di kabupaten Sukamara;
 - 4) PPI Kuala Pembuang di kabupaten Seruyan;
 - 5) PPI Kumai di kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 6) PPI Selat Jeruju Pagatan di kabupaten Katingan; dan
 - 7) PPI Ujung Pandaran di kabupaten Kotawaringin Timur.



Jumlah kapal laut yang bersandar/menyinggahi pelabuhan laut di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dimana pada tahun 2015 kapal laut yang menyinggahi pelabuhan laut sebanyak 6.927 kapal, menurun 17 persen dari tahun sebelumnya (9.951 unit kapal)



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

Gambar 2.13

**Jumlah Kapal yang melalui Pelabuhan Laut Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2016**

Alur pelayaran nasional yang ada di Kalimantan Tengah meliputi:

- Alur pelayaran Internasional:** Sampit – luar negeri;
- Alur pelayaran Nasional :** Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit – Jakarta; Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun – Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya; Sukamara – Jakarta; Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta; Batanjung – Semarang; Batanjung – Surabaya; Batanjung – Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; dan Pulang Pisau – Jakarta.

3) Bandar udara

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa bandar udara, meliputi:





- a. **Bandar udara pengumpul skala tersier**, yaitu: Tjilik Riwut di kota Palangka Raya dan Iskandar di Pangkalan Bun, kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. **Bandara pengumpan**, meliputi: Haji Asan di kabupaten Kotawaringin Timur, Kuala Pembuang di kabupaten Seruyan, Tumbang Samba di kabupaten Katingan, Kuala Kurun di kabupaten Gunung Mas, Dirung di kabupaten Murung Raya, Beringin di kabupaten Barito Utara, dan Sanggu di kabupaten Barito Selatan.

Maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan antar kabupaten/kota maupun antar provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink, Batik Air, Trigana Air/Kalstar, Susi Air, dan Aviastar. Disamping itu, untuk melayani kota-kota kecil ada juga pesawat dari MAF (Mission Aviation Fellowship) yang terbang untuk melayani kepentingan sosial. Selain untuk pelayanan angkutan barang dan penumpang, sejak tahun 2013 maskapai Lion Air membuka sekolah penerbangan (*flying school*) di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.

Penerbangan udara yang berangkat dan datang ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mengindikasikan berkembangnya wilayah Kalimantan Tengah karena semakin terbukanya aksesibilitas wilayah regional Kalimantan Tengah. Tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penerbangan dibandingkan tahun 2014, karena terjadinya bencana kabut asap yang menyebabkan 7 dari 9 bandara yang ada di Kalimantan Tengah selama $\pm$ 3 bulan lumpuh dan tidak ada penerbangan yang kemudian bertahap kembali normal pada akhir tahun 2015 dan mengalami peningkatan penerbangan 2 (dua) tahun berturut – turut. Tahun 2016 penerbangan meningkat sejumlah 10.597 keberangkatan dan 10.586 kedatangan. Selanjutnya meningkat di tahun 2017 dengan total kedatangan sejumlah 11.339 penerbangan dan 11.340 penerbangan kedatangan





Tabel 2.21
Jumlah Penerbangan dan Penumpang yang melalui Bandar Udara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018

No	Tahun	Penerbangan (arus pesawat)		Penumpang (orang)	
		Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
1	2013	12.496	12.507	629.568	664.567
2	2014	10.133	10.137	700.419	701.446
3	2015	9.510	9.513	675.719	650.896
4	2016	10.957	10.586	785.001	792.161
5	2017	11.339	11.340	905.187	922.937
6	2018				

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

d) Pos, Telekomunikasi, dan Akomodasi

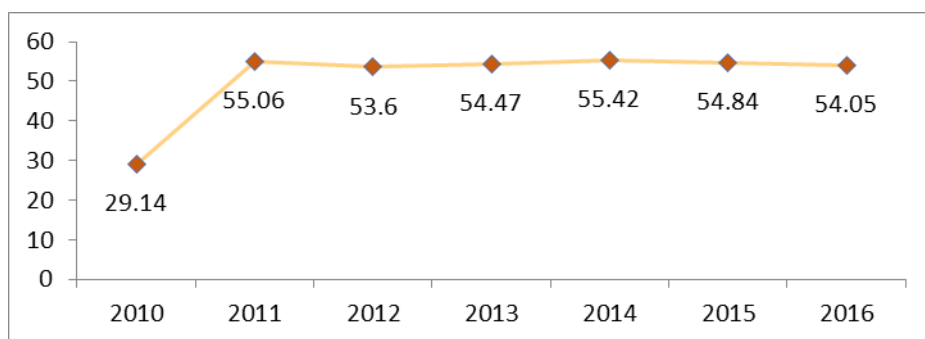
Pada tahun 2017, kantor pos di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 59 kantor pos pembantu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah kantor pos pembantu pada tahun 2016 sebanyak 63 kantor pos. Dari keseluruhan kantor pos tersebut, jenis layanan pos yang dikirim berupa surat pos (surat biasa, tercatat, kilat biasa, kilat khusus, kilat tercatat dan ekspres dokumen), paket pos (dalam negeri dan luar negeri), wesel pos dan tabungan. Pada tahun 2017 jumlah surat biasa yang terkirim berjumlah 178.771 lembar, mengalami peningkatan 46.776 lembar dibandingkan tahun 2016 terkirim sebanyak 131.995 lembar. Pengiriman surat ekspres dokumen juga mengalami peningkatan, dari 9.266 lembar dokumen terkirim di tahun 2016 menjadi 13.096 lembar di tahun 2017. pengiriman paket pos, mengalami penurunan pada tahun 2017, jumlah paket pos dalam negeri yang terkirim 16.473 kg menurun 10.391 kg dari tahun 2016 sebanyak 26.864 kg. Untuk pengiriman paket pos luar negeri tercatat 409 kg di tahun 2016 menjadi 173 kg di tahun 2017.





Jumlah pelanggan telepon di tahun 2015 menurun cukup drastis dimana pada tahun 2014 sebanyak 53.127 SST dan menjadi hanya 32.284 SST saja pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk sambungan internet *speedy* maupun *hotspot* cukup tinggi pada tahun 2015 yang mencapai 23.134 jumlah sambungan internet *speedy* dan 228 sambungan *hotspot*. Peningkatan pelanggan telepon cukup signifikan pada 2017 mencapai 43.126 SST. Sambutan internet *speedy* maupun *hotspot* juga mengalami peningkatan yaitu 23.534 untuk sambungan internet *speedy* dan 1.005 sambungan *hotspot*.

Terkait fasilitas akomodasi di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 377 unit hotel, baik berbintang maupun non bintang, pada tahun 2015 dengan kapasitas 7.372 kamar dan 10.677 tempat tidur. Dari sejumlah hotel tersebut, tingkat hunian hotel berbintang mencapai 55,42 persen pada tahun 2015 dimana angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya (55,42 persen). Begitu juga pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan 54,05 persen.

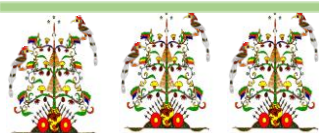


Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

Gambar 2.14
Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016

e) Ketenagakerjaan

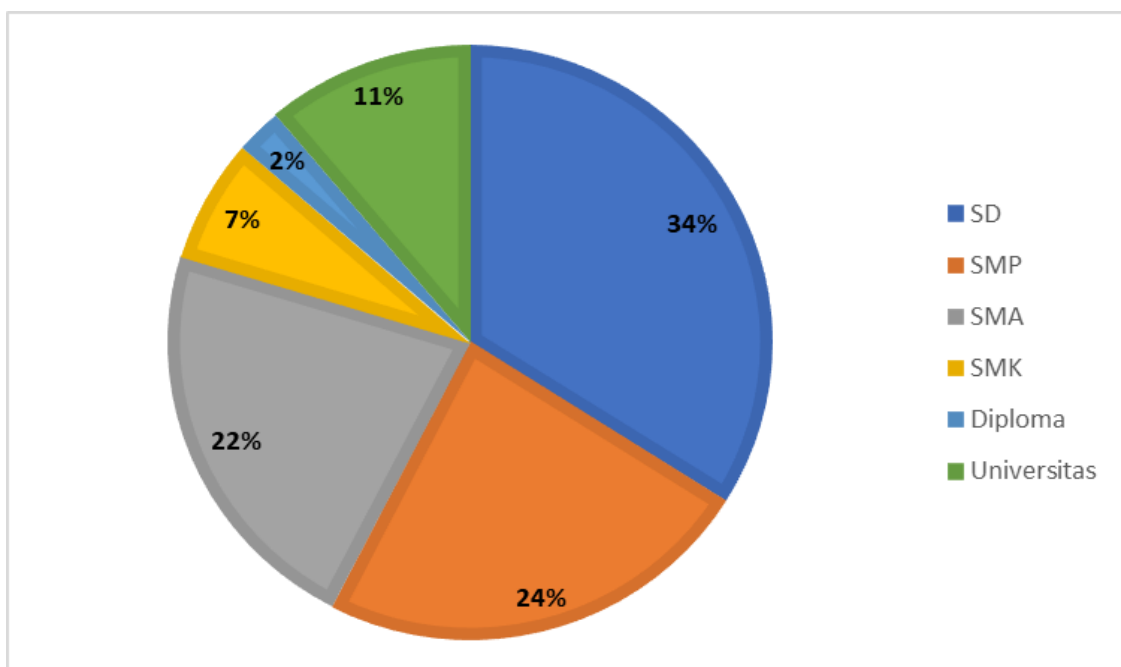
Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2018 sebanyak 1.355,40 ribu orang, meningkat sebanyak 78,73 ribu orang dibanding Agustus 2017. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 1.301,00 orang, meningkat sebanyak 78,29 ribu orang dibanding keadaan





setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 54,40 ribu orang, meningkat sebanyak 0,43 ribu orang dibanding setahun yang lalu.

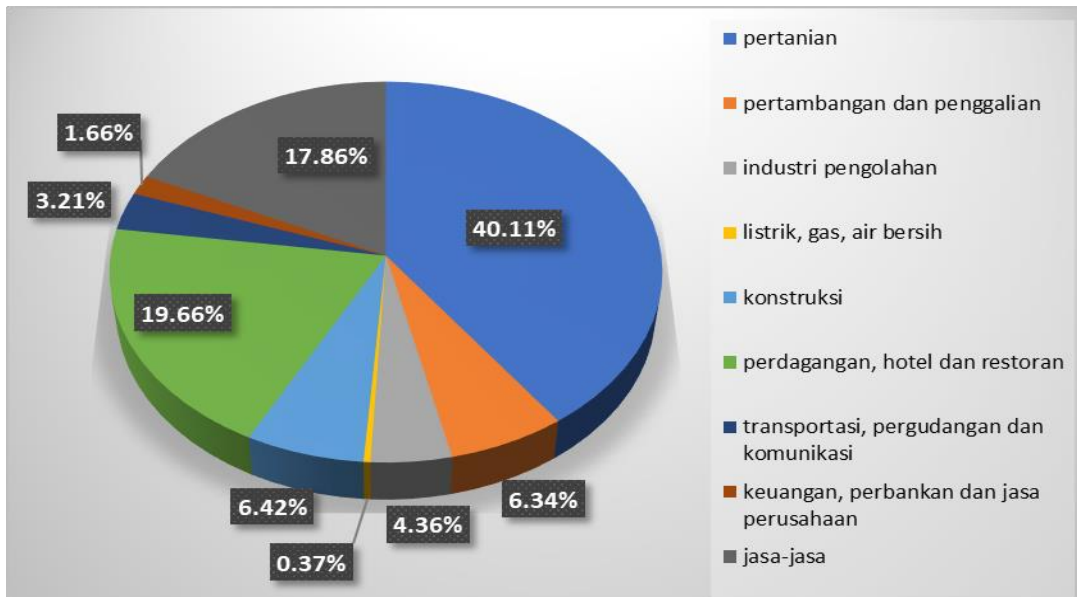
Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2018 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 792,49 ribu orang (60,92 persen). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA/SMK) sebanyak 350,02 ribu orang (26,90 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma/Universitas) hanya sebanyak 158,49 ribu orang (12,18 persen)



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

Gambar 2.15
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018





Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

Gambar 2.16
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Berdasarkan kategori lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2018, penduduk Provinsi Kalimantan Tengah paling banyak bekerja pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebanyak 499,14 ribu orang (38,37 persen), disusul oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 230,83 ribu orang (17,74 persen) serta Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebanyak 87,41 ribu orang (6,72 persen).

Dilihat berdasarkan tren sektoral selama setahun terakhir, ada beberapa kategori lapangan pekerjaan yang kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja menurun. Kategori-kategori lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase penduduk yang bekerja adalah Kategori Pertanian (turun 1,77 persen poin), Kategori Konstruksi (turun 0,39 persen poin), Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (turun 0,27 persen poin), Kategori Jasa Perusahaan (turun 0,13 persen poin), Kategori Pertambangan dan Penggalian (turun 0,05 persen poin), Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (turun 0,02 persen poin) dan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas,





Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang serta Real Estat (turun 0,01 persen poin).

f) Penanaman Modal

Investasi merupakan modal dasar pembangunan perekonomian suatu wilayah dimana semakin kondusif suatu wilayah dalam berinvestasi maka akan semakin optimal pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, setiap wilayah administrasi berlomba-lomba dalam menarik investor, baik dalam negeri maupun investor asing, untuk menanamkan modalnya sebagai bagian dari pergerakan ekonomi wilayah.

Tabel 2.22

Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Sektor Ekonomi	Dalam Negeri (Juta Rupiah)	Asing	
		Ribu US\$	Juta Rp
Pertanian	15.984.345,04	258.160,30	15.512.307,16
Pertambangan	678.529,00	11.379.190,44	6.949.989,93
Industri	9.901.562,70	-	2.519.733,98
Konstruksi	-	-	-
Perhotelan	-	-	-
Pengangkutan	-	-	-
Perumahan & Kantor	-	-	-
Perdagangan dan Reparasi	70.000,00		11.000.000,00
Jasa-jasa	2.604.291,06	629.867,00	974.109,04
Jumlah	29.238.727,80	12.267.217,74	36.956.140,11

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Kalteng, 2018

Secara umum, realisasi penanaman modal mengalami penurunan pada tahun 2016 dimana pada penanaman modal dalam negeri memiliki realisasi hampir mencapai 29,23 trilliun rupiah serta penanaman modal asing sebesar 1,226 miliar US\$ dan 36,95 trilliun rupiah.





2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

a) Pertanian

Melihat wilayah geografis dan sejarah sektor lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah selama ini, sektor yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian. Sektor tersebut memang menjadi sektor andalan mengingat ketersediaan lahan potensial masih cukup besar.

Tabel 2.23

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018

No	Tahun	Luas Panen		Produksi (ton)		Total Luas Panen	Total Produksi	Produktivitas Padi (ton/ha)
		Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang			
1	2013	171.467	78.257	614.884	178.732	249.724	864.608	3,46
2	2014	190.755	55.330	725.704	127.325	246.085	853.029	3,47
3	2015	183.416	71.254	725.755	167.447	254.670	893.202	3,51
4	2016	188.740	78.234	606.384	168.083	266.974	774.467	2,90
5	2017	193.489	51.480	659.944	111.958	244.969	771.902	3,15
6	2018	209.634	30.734	693.679	55.484	240.368	749.163	3,11

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2018 & Kalteng Dalam Angka, 2018

Produktivitas padi (sawah maupun ladang) di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Produktivitas padi pada tahun 2017 sebesar 3,15 ton/ha dengan total produksi 771.902 ton. Pada tahun 2018 produktivitas menjadi sebesar 3,11 ton/ha dan total produksi 749.163 ton.

Tabel 2.24

Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Subsektor Perkebunan Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017*

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha/Thn)
1	Karet	450.625,03	145.227,42	3,22
2	Kelapa Kopra	28.980,10	14.689,68	5,06
3	Kopi	1.573,91	328,79	2,08
4	Lada	544,10	190,96	3,5





No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha/Thn)
5	Kakao	1.912,06	399,77	2,09
6	Kelapa Sawit	1.495.605,89	4.485.167,20	29,98

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

*Angka Sementara

Dalam merealisasikan potensi perkebunan yang ada tersebut, saat ini sudah masuk permohonan investasi untuk mengembangkan pertanian di sub sektor perkebunan komoditas kelapa sawit, karet, dan singkong dalam skala cukup luas. Bahkan pada tahun 2016, jumlah lahan yang memproduksi aktif mencapai 635.486,23 ha untuk perkebunan rakyat dan mencapai 2.857.051,60 ha untuk perkebunan non rakyat.

Produktivitas terbesar pada komoditas subsektor perkebunan unggulan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah komoditas kelapa sawit yang mencapai 29,98 ton/ha. Tingginya produktivitas ini juga sejalan dengan tingginya produksi kelapa sawit dan luas tanamnya. Komoditas karet juga memiliki produksi yang cukup tinggi mencapai 145.227,42 ton pada tahun 2016 dengan produktivitas sebesar 3,22 ton/ha.

Pada sub sektor perikanan juga memiliki prospek cerah karena Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kawasan perairan danau yang dapat dikembangkan menjadi usaha perikanan air tawar. Pada tahun 2017, produksi perikanan budidaya mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun 2016.

Tabel 2.25

Produksi Budidaya Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2018

No	Jenis Budidaya	Jumlah Produksi (Ton)		
		2016	2017	2018*
1	Tambak	12.531,40	-	
2	Kolam	35.543,76	238,78	





No	Jenis Budidaya	Jumlah Produksi (Ton)		
		2016	2017	2018*
3	Keramba	28.886,15	1.037,92	
4	Jaring Apung	326,60	21,0	
5	Budidaya Laut	400,00	-	
6	Sawah	0,62	-	

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

*Angka Sementara

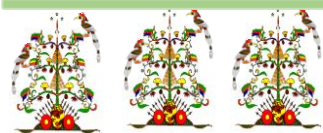
Pada subsektor peternakan jenis ternak, populasi terbanyak pada ternak besar adalah ternak babi yang mencapai 205.551 ekor, diikuti oleh ternak sapi 81.993 ekor dan ternak kambing 44.258 ekor. Untuk populasi ternak kecil (unggas) didominasi oleh ternak ayam ras *broiler* yang mencapai 9.877.404 ekor diikuti ternak ayam kampung 2.716.820 ekor, dan ternak itik 275.247 ekor.

Jika dilihat berdasarkan produksi daging, produksi daging paling banyak adalah ayam ras *broiler* yang mencapai 18.365.791 kg, diikuti daging sapi potong sebanyak 4.488.306 kg, dan daging babi sebanyak 1.566.202 kg.

Tabel 2.26

Populasi dan Produksi Hasil Ternak Menurut Jenis Ternak
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (Kg)
A.	Ternak			
1	Sapi Potong	83.557	4.545.000	-
2	Kerbau	9.219	60.830	-
3	Kambing	44.300	202.740	-
4	Domba	300	-	-
5	Babi	213.650	1.578.440	-
6	Kuda	-	-	-
7	Kelinci	-	-	-





No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (Kg)
B.	Unggas			
1	Ayam Kampung	2.655.190	2.380.450	2.347.865
2	Ayam Petelur	203.270	36.980	2.488.289
3	Ayam Ras (Broiler)	10.135.979	18.916.760	-
4	Itik	285.028	171.980	1.651.023

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018 dan Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

a) Industri

Secara umum, industri yang berkembang di provinsi Kalimantan Tengah, meliputi: industri pengolahan yang merupakan jenis usaha kecil, industri rumah tangga, dan industri menengah yang meliputi industri pangan, sandang, kerajinan, dan perkayuan. Dari beberapa jenis usaha kecil dan industri rumah tangga tersebut sudah dapat menampung tenaga kerja yang cukup besar sehingga sektor industri terutama mikro yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah berkembang dengan cukup baik.

Sektor industri mengalami peningkatan pada tahun 2015, dimana pada jumlah industri besar dan sedang mencapai 96 unit perusahaan dengan kapasitas tenaga kerja sebanyak 28.773 pekerja, dibandingkan tahun 2014 terdapat 81 unit perusahaan dengan 23.333 tenaga kerja. Sejalan dengan industri besar dan sedang, pada industri kecil dan menengah mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai 5.164 unit padahal tahun sebelumnya hanya sebanyak 4.678 unit. Pada tahun 2017, peningkatan jumlah unit industri kecil mencapai 7.688 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja mencapai 21.269 pekerja.



**Tabel 2.27****Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Industri	73	66	80	81	96
2	Jumlah Tenaga Kerja	15.485	14.761	25.542	23.333	28.773

*Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018***Tabel 2.28****Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Industri Kecil
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2017**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Industri	4.401	4.807	4.678	5.164	NA	5.164
2	Jumlah Tenaga Kerja	15.103	16.814	16.180	16.655	NA	21.269

*Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018***b) Pariwisata**

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan. Secara umum, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Potensi pariwisata yang ada dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Destinasi pariwisata di Kalimantan Tengah tersebar di 14 kabupaten/kota, salah satu destinasi wisata yang terkenal sampai ke manca negara adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang





terdapat di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat dan kabupaten Seruyan, merupakan kawasan tempat perlindungan flora dan fauna, khususnya orang utan. Selain itu, beberapa destinasi wisata kini mulai berbenah untuk dikelola secara lebih baik, seperti: Pantai Ujung Pandaran, Arboretum Reintroduksi Orang Utan, Taman Wisata Tangkiling, dan termasuk pula wisata budaya, seperti: Rumah Betang dan Museum. Untuk menunjang pariwisata, setiap tahun digelar acara expo/pameran sebagai media promosi bagi kabupaten/kota untuk memperkenalkan potensi daerahnya.

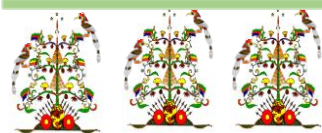
Tabel 2.29
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Jumlah Wisatawan Nusantara	358.593	824.130	839.915	
Jumlah Wisatawan Mancanegara	15.017	20.496	26.159	
Jumlah Wisatawan	373.610	844.626	866.074	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

c) Pertambangan

Dari segi luas wilayah, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut serta letak geografis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, secara fisik kawasan ini memiliki beberapa hasil tambang yang cukup potensial. Bahan penggalian yang saat ini telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi berkembang dengan pesat, seperti: batubara, emas (dan mineral pengikut seperti perak), bijih besi, pasir zircón (termasuk ilmenit dan rutil), galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Dari keseluruhan jenis pertambangan tersebut, tambang batubara masih mendominasi, baik terkait eksplorasi (1.664.518 ha) maupun produksinya (944.043 ha). Sedangkan hanya sedikit untuk pertambangan intan dan tembaga.





Tabel 2.30

**Jumlah Izin Usaha Pertambangan dan Luas Wilayah (Eksplorasi dan Produksi)
Menurut Jenis Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016**

No	Jenis Pertambangan	Eksplorasi		Produksi	
		Jumlah IUP	Luas (Ha)	Jumlah IUP	Luas (Ha)
1	Batubara	339	1.664.518	246	944.043
2	Zircon	49	237.162	69	105.083
3	Bijih Besi	33	176.619	23	47.084
4	Emas	27	252.976	6	25.208
5	Tembaga	2	15.176	-	-
6	Bauksit	6	29.478	10	13.425
7	Galena	3	15.878	4	7.161
8	Pasir	33	78.754	7	19
9	Pasir Kuarsa	6	19.718	-	-
10	Intan	1	10.000	-	-
11	Mineral Logam	3	66.300	-	-

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

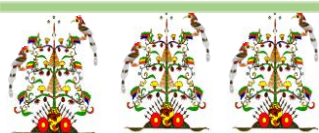
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

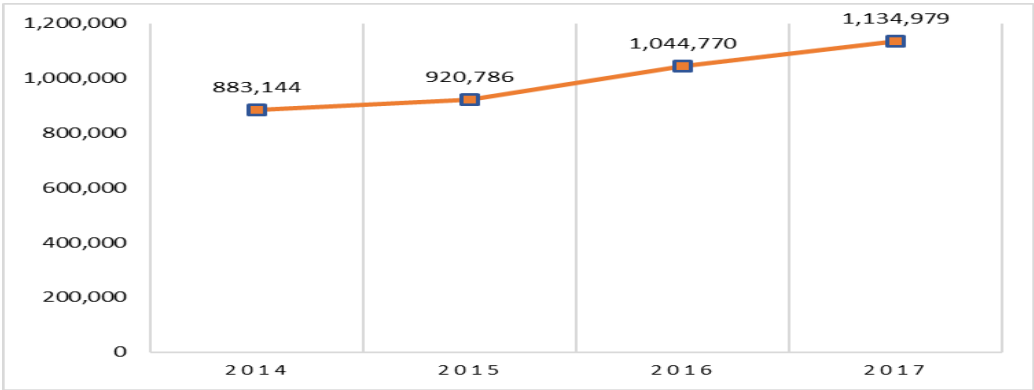
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi,





baik komoditas makanan maupun non makanan selama sebulan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, rata-rata pengeluaran per kapita meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai angka Rp. 1.134.979,-.



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

Gambar 2.17
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/Bulan
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2014-2017 (Rupiah)

Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan, masing-masing kategori pengeluaran mengalami peningkatan pengeluaran dari tahun ke tahun, hingga tahun 2017, rata-rata pengeluaran konsumsi kategori makanan sebesar 54, 77 persen dan kategori non makanan sebesar 45,23 persen dari rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita/bulan.

Tabel 2.31
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 (Rupiah)

No.	Tahun	Makanan	Non Makanan	Total	% Makanan	% Non Makanan
1	2014	483.879	399.265	883.144	54,79	45,21
2	2015	494.858	425.928	920.786	53,74	46,26
3	2016	546.306	498.464	1.044.770	52,29	47,71
4	2017	621.622	513.358	1.134.979	54,77	45,23
5	2018					

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya





produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya.

Selama periode Februari 2019, NTP gabungan seluruh sektor di Provinsi Kalimantan Tengah berfluktuasi setiap bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum daya tukar petani di Kalimantan Tengah, relatif rentan terhadap laju pertumbuhan tingkat harga barang dan jasa di pasaran. Nilai tukar yang relatif selalu berada dibawah 100, menunjukkan daya beli petani selama tahun 2018 lebih rendah dibanding selama tahun dasar.

NTP pada bulan Februari tahun 2019 menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan petani (secara umum) dimana angka Nilai Tukar Petani kurang dari 100, yakni sebesar 96,18. Hal ini berarti hasil yang didapatkan petani masih lebih rendah dari pengeluaran petani, baik untuk produksi maupun kesehariannya.

NTP pada bulan Desember 2018 mencapai 95,02 persen, menurun 4,14 persen dari NTP bulan Desember tahun 2017. Jika dilihat dari subsektornya, petani yang memiliki NTP lebih dari 100 persen adalah petani subsektor perikanan (108,90 persen), hortikultura (105,18 persen) dan peternakan (103,17 persen). Sedangkan untuk sub sektor tanaman pangan masih berada di bawah 100 persen yakni sebesar 94,78 persen, dan perkebunan rakyat 84,36 persen.

Tabel 2.32
Nilai Tukar Petani per Subsektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Tengah Februari 2019

No.	Subsektor	NTP
1	Tanaman Pangan	94,78
2	Hortikultura	105,18
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	84,36
4	Peternakan	103,17
5	Perikanan	108,90
Nilai Tukar Petani Gabungan		95,02

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2018





2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Luas Wilayah (RTRW Provinsi)

Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki integrasi dan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai wilayah yang sebagian besar masih tergolong hutan bioregion, Kalimantan Tengah memiliki RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang berfokus pada pengelolaan hutan. Dalam pengelolaannya, RTRW membagi wilayah menjadi dua kawasan, yaitu kawasan hutan lindung (3.630.142 ha) dan kawasan budidaya (12.120.330 ha).

Tabel 2.33
Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Luas Wilayah (Ha)
A	Kawasan Hutan Lindung	
1	Hutan Lindung (HL)	1.391.604
2	Hutan Adat (HA)	600.000
3	Suaka Margasatwa (SM)	57.389
4	Cagar Alam (CA)	198.597
5	Taman Nasional (TN)	1.168.284
6	Taman Wisata Alam (TWA)	2.954
7	Taman Hutan Raya (Tahura)	35.627
8	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada Areal Ex. PLG	154.002
9	Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam (KEAH)	17.626
10	Kawasan Reservaat	23
11	Kawasan Lindung Lainnya	4.036
Total Kawasan Hutan Lindung		3.630.142
B	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.335.571





No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Luas Wilayah (Ha)
2	Hutan Produksi (HP)	3.896.706
3	Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi (HPK)	2.258.274
4	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.629.779
Total Kawasan Budidaya		12.120.330
Total Kawasan Hutan Lindung+Budidaya		15.750.472

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

b. Fokus Iklim Berinvestasi

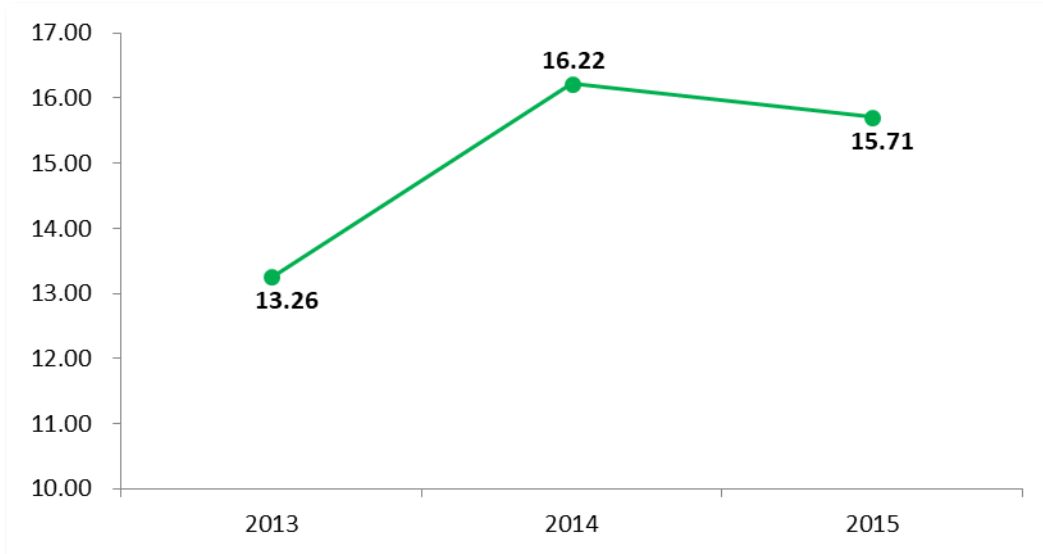
Iklim berinvestasi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal dan internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan dan kekonsistenan investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan pertumbuhan ekonomi.

Kriminalitas

Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan memicu penurunan status kenyamanan dalam berinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi damai dan aman jika pihak yang berwenang dapat meredam atau meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah cukup fluktuatif meningkat dan menurun secara tidak konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus dalam beberapa kasus terutama yang terkait SARA mengingat pernah terjadi kejadian luar biasa di Provinsi Kalimantan Tengah.

Angka kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2015 mencapai 15,71 yang berarti terdapat 15-16 tindak kriminalitas diantara 10.000 penduduk.





Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016 (diolah)

Gambar 2.18
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah

c. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang akan menentukan arah tujuan pembangunan daerah dan nasional. Sebagai pondasi pelaksana pembangunan, setiap individu menjadi penentu dalam setiap pergerakan pembangunan melalui partisipasinya terhadap program kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu fokus tujuan awal pembangunan untuk memperkuat pondasi dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah.

Kualitas Tenaga Kerja

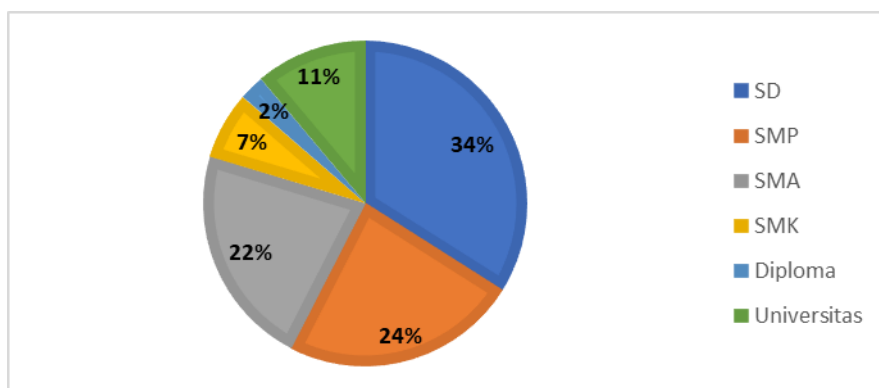
Tenaga kerja merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian suatu wilayah dimana memiliki andil dalam meningkatkan kualitas sistem pembangunan daerah. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja di suatu wilayah, diasumsikan semakin tinggi pula kualitas perekonomian di wilayah tersebut. Meskipun begitu, tingginya kualitas tenaga kerja dalam hal ini tidak dipisahkan antara tenaga kerja yang berasal dari dalam wilayah maupun luar wilayah selama mereka bekerja untuk peningkatan perekonomian daerah tersebut.





Sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah hanya pernah mengenyam pendidikan hingga SD sederajat, yakni sebesar 34 persen. Untuk penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP sebesar 24 persen. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki pendidikan hingga SLTA sederajat, yakni mencapai 22 persen. Sedangkan tenaga kerja yang sekolah hingga perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma, hanya sebesar 13 persen padahal kategori ini merupakan penduduk yang diasumsikan memiliki kualitas lebih baik dibandingkan penduduk yang memiliki jenjang pendidikan di bawahnya.

Rendahnya kualitas tenaga kerja dari segi pendidikan ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Provinsi Kalimantan Tengah.



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2018

Gambar 2.19

Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

a. Rasio Ketergantungan

Salah satu analisis dalam melihat produktivitas penduduk suatu wilayah adalah dengan melihat sebaran kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

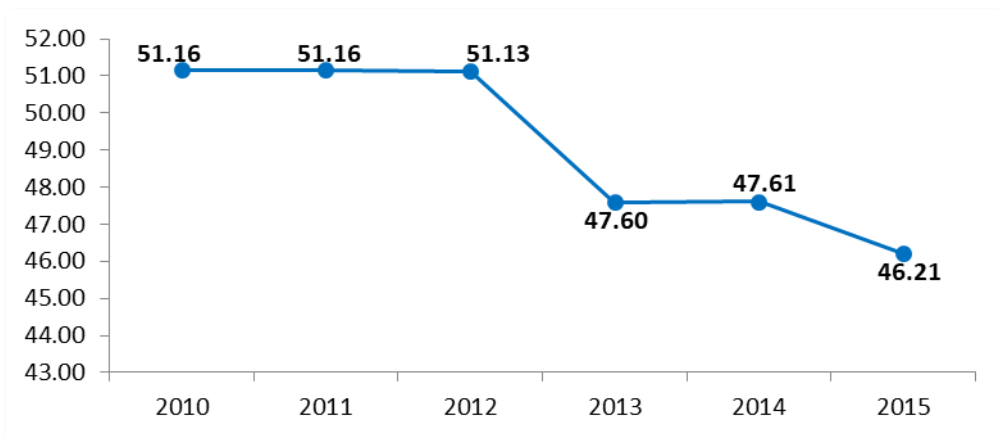
Rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki trend menurun yang berarti sebaran penduduk usia non produktif mulai





berkurang jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Hal ini mengindikasikan ketergantungan penduduk usia non produktif semakin berkurang yang disebabkan beberapa kemungkinan seperti pergeseran usia remaja ataupun mortalitas penduduk usia tua.

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 memiliki angka rasio ketergantungan sebesar 46,21 yang memiliki analisa umum yakni setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 46-47 penduduk usia non produktif (usia muda dan usia lanjut). Angka ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2011 angka ketergantungan mencapai 51,16.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2019 (diolah)

Gambar 2.20
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2015

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2019 Triwulan I

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan triwulan I Tahun 2019 dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya rencana kerja pemerintah daerah sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tentunya berpengaruh positif pada pencapaian tujuan secara nasional, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Selain itu pengendalian dan evaluasi juga penting dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019. Evaluasi ini dilaksanakan terhadap rencana yang ada pada RKPD tahun 2019 sampai dengan triwulan I, dengan menyinggung beberapa rencana target yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan





penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Berikut beberapa target dan realisasi kinerja dari indikator makro sebagai target pembangunan yang dicapai pada tahun 2016 dan telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode sebelumnya.

Tabel 2.34
Target dan Realisasi Kinerja Daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2014-2018

No	Indikator Makro	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,3	6,21	7,5	7,01	6,2-6,5	6,36	6,5	6,74	6,5	5,64
2.	Laju Inflasi (%)	3,0	7,07	2,5	4,74	4,5-4,6	2,11	4,4-4,5	3,15	4,3-4,4	4,22
3.	Angka Kemiskinan (%)	2,5	6,07	2	5,91	5,8	5,36	5,3	5,26	5,02	5,17
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5	3,24	2	4,54	4,5	4,82	4,5	4,23	4,0	4,01

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2019

Program/kegiatan yang mengacu pada empat strategi prioritas nasional yakni pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment, perlu terus dilanjutkan pada tahun 2019. Berdasarkan data capaian di atas, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 belum melebihi





target, harapan kondisi perekonomian secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan dapat terpenuhi. Secara umum memang laju inflasi, kemiskinan, maupun pengangguran tidak mencapai target, akan tetapi jika dilihat pada level nasional maka capaian pembangunan tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa dari segi kuantitas nilai, namun dari segi kualitas harus diperhatikan pula sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut:

URUSAN WAJIB

Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

1. Bidang Pendidikan

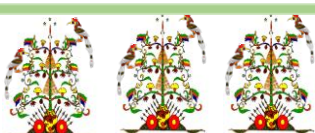
Urusan wajib bidang Pendidikan berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan sosial diukur dengan indikator capaian Angka Harapan Lama Sekolah (tahun), Angka melek huruf (%) dan angka rata-rata lama sekolah (tahun). Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.890.501.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.837.687.674,- atau 82,13%, realisasi fisik 100%.

b. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 168.714.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.714.100,- atau 100%, realisasi fisik 100%.





c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.476.557.229,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.174.284.195,- atau 70,91%, realisasi fisik 100%.

d. Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.858.491.010,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.807.138.846,- atau 97,24%, realisasi fisik 100%.

e. Program Pengembangan Pendidikan Karakter

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.4.133.788.640,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.024.832.349,- 97,36%, realisasi fisik 100%.

f. Program Pembinaan dan Fasilitas Pendidikan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 10(sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.16.774.143.825,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.582.117.309,- atau 98,86%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

Sedangkan yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum fokus pelayanan dasar dengan indikator capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pendidikan SMA

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 102.230.158.209,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.400.657.602,- atau 99,19%, realisasi fisik 100%.





Outcomes dari program ini diantaranya meningkatnya daya tampung siswa SMA melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya, pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya, pengadaan buku buku pendidikan SMA.

b. Program Pendidikan SMK

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 66.429.612.023,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.034.497.046,69,- atau 97,90%, realisasi fisik 100%.

Outcomes dari program ini diantaranya pembangunan ruang kelas baru SMK sebanyak....ruang, pengadaan meublair sekolah SMK, pembangunan ruang praktek SMK.

c. Program Pendidikan Luar Biasa

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.027.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.936.598.891,- atau 97,01%, realisasi fisik 100%.

Outcomes dari program ini ,diantaranya meningkatnya jumlah alat ketrampilan, jaringan listrik dan air bersih USB, alat bantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

2. Bidang Kesehatan

Urusan wajib bidang Kesehatan berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan sosial diukur dengan indikator capaian yakni Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Presentase Balita Gizi Buruk. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 678.074.950,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 360.457.110,- atau 53,16%, realisasi fisik 70,11%.





b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 295.781.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 273.496.750,- atau 92,47%, realisasi fisik 100%.

c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh :

- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 313.662.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 301.505.600,- atau 96,12%, realisasi fisik 100%.
- RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 849.384.071,- atau 84,94%, realisasi fisik 100%.

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 747.316.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 593.979.300,- atau 79,48%, realisasi fisik 92,34%.

e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.164.400,- atau 81,23%, realisasi fisik 100%.

f. Program Pengembangan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 13 (tiga belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 71.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.405.000,- atau 99,16%, realisasi fisik 100%.

g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar





Rp. 348.039.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.343.300,- atau 61,30%, realisasi fisik 87,87%.

h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 555.350.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 439.548.600,- atau 79,15%, realisasi fisik 100%.

i. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 161.550.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 150.106.500,- atau 92,92%, realisasi fisik 100%.

j. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.892.950,- atau 99,90%, realisasi fisik 100%.

k. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 70.448.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.195.000,- atau 95,38%, realisasi fisik 100%.

l. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 812.114.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 695.920.500,- atau 85,69%, realisasi fisik 97,52%.

m. Program Sumber Daya Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 17 (tujuh belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.535.671.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.292.708.450,- atau 95,61%, realisasi fisik 99,23%.

n. Program Penanggulangan Masalah Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar





Rp. 185.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 146.836.000,- atau 79,37%, realisasi fisik 87,64%.

o. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.235.413.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.019.408.800,- atau 82,52%, realisasi fisik 93,46%.

p. Program Kesehatan Haji

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 196.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.280.400,- atau 88,60%, realisasi fisik 100%.

q. Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 701.793.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 535.637.000,- atau 76,32%, realisasi fisik 80%.

r. Program Kesehatan Lingkungan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 422.437.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 261.357.501,- atau 61,87%, realisasi fisik 75,84%.

s. Program Informasi Publik dan Dokumentasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3(tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 204.075.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 161.504.000,- atau 79,14%, realisasi fisik 100%.

t. Program Pengawasan, Pembinaan pengendalian Kesehatan Makanan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 158.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 154.349.700,- atau 97,69%, realisasi fisik 100%.

u. Program Jaminan Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar





Rp. 2.962.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.886.204.000,- atau 97,42%, realisasi fisik 100%.

v. Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Palangka Raya melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.700.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.681.735.935,- atau 99,61%, realisasi fisik 100%.

w. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD dr. Doris Sylvanus

Program ini dilaksanakan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) Palangka Raya melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 154.000.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.735.563.781,- atau 85,59%, realisasi fisik 85,59%.

x. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

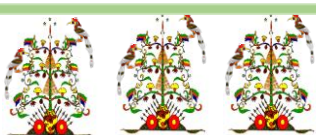
Program ini dilaksanakan oleh RSJ Kalawa Atei melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 157.381.450,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.174.350,- atau 90,34%, realisasi fisik 93,45%.

Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018. Sedangkan yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum fokus pelayanan dasar dengan indikator capaian yakni rasio posyandu per satuan balita (%), rasio puskesmas per jumlah penduduk (%), rasio pustu persatuan penduduk (%), rasio rumah sakit per satuan penduduk (1.000 penduduk), rasio distribusi tempat tidur rumah sakit persatuan penduduk 0,77, presentasi distribusi tempat tidur rumah sakit menurut Kab/Kota 88,58%, rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) 19,82%, rasio bidan per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) 126,6%,. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program ini dilaksanakan oleh :

- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 994.187.100,- dan





realisasi anggaran sebesar Rp. 949.099.467,- atau 95,46%, realisasi fisik 100%.

- RSUD Doris Sylvanus melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 88.630.288.095,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.970.896.599,80 atau 95,87%, realisasi fisik 100%.
- RSJ Kalawa Atei melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.652.553.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.296.419.208,- atau 95,88%, realisasi fisik 98,94%.

b. Program Peningkatan Peralatan Kesehatan dan Bahan Penunjang Laboratorium

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.533.509.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.466.708.840,- atau 95,64%, realisasi fisik 100%.

c. Program Pengujian dan Kalibrasi Peralatan Kesehatan (Sister Lab)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 399.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 347.444.200,- atau 86,99%, realisasi fisik 100%.

d. Program Peningkatan Ketersediaan, Mutu obat dan Alat Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 105.299.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.594.200,- atau 69,89%, realisasi fisik 94,68%.

e. Program Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.654.222.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.444.768.100,- atau 87,34%, realisasi fisik 100%.

f. Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit

Program ini dilaksanakan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Palangka Raya melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.700.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.681.735.935,- atau 99,61%, realisasi fisik 100%.





Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018, kecuali utk program obat dan perbekalan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan tahun 2018

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian kinerja diukur dengan beberapa indikator yakni panjang jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi dan rawa, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, panjang jalan dilalui roda 4, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam), panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah HPL/HGB, persentase kesesuaian Perencanaan Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.750.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.522.955.000,- atau 97,41%, realisasi fisik 98,80%.

b. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 17 (tujuh belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 65.382.753.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.746.847.328,67,- atau 92,91%, realisasi fisik 99,98%.

c. Program penyediaan dan pengolahan air baku

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan





total anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 368.714.100,- atau 92,18%, realisasi fisik 100%

d. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.350.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.288.702.000,- atau 98,17%, realisasi fisik 94,03%.

e. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.700.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.101.269.550,- atau 93,12%, realisasi fisik 100%.

f. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 9 (sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 20.964.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.367.577.955,- atau 82,84%, realisasi fisik 60,49%.

g. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.427.848.000,- atau 95,19%, realisasi fisik 100%.

h. Program pergantian dan pemeliharaan jembatan tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 96.847.445.670,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.924.887.920,- atau 100%, realisasi fisik 100%.

i. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di bidang infrastruktur

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7 (tujuh) kegiatan





dengan total anggaran sebesar Rp. 4.510.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.234.459.361,- atau 93,89%, realisasi fisik 100%.

- j. Program perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan Provinsi Kalimantan Tengah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 23.666.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.172.262.007,- atau 97,91%, realisasi fisik 100%.

- k. Program peningkatan/pembangunan jalan Provinsi Kalimantan Tengah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 407.752.150.602,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 399.973.274.602,- atau 98,09%, realisasi fisik 100%.

- l. Program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.000.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.614.851.050,- atau 97,04%, realisasi fisik 100%.

- m. Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 93.761.240.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.092.329.750,- atau 96,09%, realisasi fisik 100%.

- n. Program Peningkatan sarana dan prasarana umum dan masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 40.570.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.619.889,- atau 97,66%, realisasi fisik 100%.

- o. Program Pemeliharaan Fasilitas ke Cipta Karya





Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 320.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 314.340.000,- atau 98,23%, realisasi fisik 100%.

p. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.620.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.127.872.822,- atau 67,70%, realisasi fisik 99,97%.

q. Program Pemanfaatan Ruang

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.137.500,- atau 97,14%, realisasi fisik 100%.

r. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 710.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 673.191.046,- atau 94,82%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018, kecuali utk program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh khususnya kegiatan pembangunan lapangan futsal, penataan area parkir dan food court, spot center Plk belum mencapai target yang direncanakan tahun 2018.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib bidang perumahan rakyat dan pemukiman berkaitan dengan aspek pelayanan umum fokus pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja diukur dengan beberapa indikator yakni rumah tangga





pengguna air bersih (unit), rumah tangga pengguna listrik(unit), rumah tangga bersanitasi (%),lingkungan pemukiman kumuh (%), Rumah layak huni (unit). Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.341.883.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.109.318.615,- atau 93,04%, realisasi fisik 100%.

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 373.117.364,- atau 93,28%, realisasi fisik 100%.

c. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 22.248.850.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.830.839.500,- atau 98,12%, realisasi fisik 100%.

d. Program pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 29.339.150.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.521.958.000,- atau 97,21%, realisasi fisik 100%.

e. Program Pembiayaan Perumahan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 935.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 876.404.907,- atau 93,67%, realisasi fisik 100%.





Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berkaitan dengan aspek pelayanan umum pada fokus pelayanan dasar, capaian kinerja diukur dengan beberapa indikator yakni Pembinaan terhadap Ormas/LSM/ OKP aktif, Pembinaan organisasi asing, Pembinaan partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah, Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah, Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kalteng (nilai/predikat), Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan, Aparatur kesbangpol yang mampu mendeteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 710.822.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 701.247.700,- atau 98,65%, realisasi fisik 100%.

2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 447.148.525,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 415.796.850,- atau 92,99%, realisasi fisik 100%.

3) Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total





anggaran sebesar Rp. 2.525.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.460.750.475,- atau 97,46%, realisasi fisik 100%.

4) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 713.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 669.723.700,- atau 93,93%, realisasi fisik 100%.

5) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 304.703.150,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 288.375.900,- atau 94,64%, realisasi fisik 100%.

6) Program pendidikan politik masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.175.443.626,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.032.425.723,- atau 93,43%, realisasi fisik 100%.

7) Program peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekonomi

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 998.031.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 983.525.273,- atau 98,55%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan wajib bidang Pol PP berkaitan dengan aspek pelayanan umum fokus pelayanan dasar, capaian kinerja diukur dengan beberapa indikator yakni Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan, Penegakan Perda (buah), Cakupan patroli petugas Satpol PP, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (Orang). Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan





Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 790.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 784.790.720,- atau 99,34%, realisasi fisik 100%.

2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.676.930.862,- atau 92,31%, realisasi fisik 99,63%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

c. Penanggulangan Bencana

Urusan wajib bidang penanggulangan bencana berkaitan dengan aspek pelayanan umum fokus pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja diukur dari indikator persentase penurunan Indeks Resiko Bencana (IRB) dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pemadan Kebakaran

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.900.000,- atau 98,90%, realisasi fisik 100%.

2) Program Tanggap Paska Bencana

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 297.872.710,- atau 99,29%, realisasi fisik 100%.

3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1





(satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.701.320.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.285.886.880,- atau 34,11%, realisasi fisik 100%.

4) Program Pencegahan Bencana

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 284.358.600,- atau 81,25%, realisasi fisik 81,37%.

5) Program Penanganan Keadaan Darurat

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 443.901.700,- atau 98,64%, realisasi fisik 100%.

6) Program Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 163.987.759,- atau 93,71%, realisasi fisik 93,95%.

7) Program Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 130.750.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 123.590.800,- atau 94,52%, realisasi fisik 94,72%.

8) Program Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Telaahan Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-





dan realisasi anggaran sebesar Rp. 488.222.757,- atau 97,64%, realisasi fisik 98,56%.

9) Program Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi, Komunikasi dan Kehumasan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 219.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.416.050,- atau 94,15%, realisasi fisik 94,29%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

6. Bidang Sosial

Urusan wajib bidang sosial berkaitan dengan aspek pelayanan umum pada fokus pelayanan dasar, capaian kinerja diukur dengan beberapa indikator yakni jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit), PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Orang), Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus), Potensi dan Sumber Kesos (PSKS) yang mendapat Pembinaan, Jumlah Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KK), Jumlah PMKS yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inklusivitas (Orang).

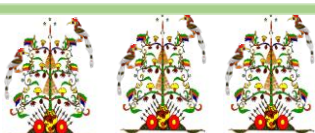
Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.530.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.507.400.040,- atau 99,11%, realisasi fisik 99,74%.

b. Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.359.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.246.723.068,- atau 97,90%, realisasi fisik 100%.





c. Program pembinaan anak terlantar

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.806.842,- atau 93,51%, realisasi fisik 100%.

d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 107.273.050,- atau 97,52%, realisasi fisik 100%.

e. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.325.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.267.417.700,- atau 95,65%, realisasi fisik 100%.

f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 525.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 431.110.208,- atau 82,12%, realisasi fisik 100%.

g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 935.805.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 925.880.951,- atau 98,94%, realisasi fisik 100%.

h. Program perlindungan dan jaminan sosial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.755.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.725.213.277,- atau 98,30%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.





Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

1. Tenaga Kerja

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang ketenagakerjaan diukur dari angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus), tingkat partisipasi angkatan kerja (%), pencari kerja yang ditempatkan sebanyak (orang), tingkat pengangguran terbuka (%). Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 425.735.950,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 420.295.950,- atau 98,72%, realisasi fisik 100%.

b. Program pendayagunaan dan tindak lanjut pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 675.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 672.744.128,- atau 99,67%, realisasi fisik 100%.

Bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat pada fokus Kesejahteraan Sosial, capaian Indikator kinerja bidang ketenagakerjaan diukur dari indikator rasio penduduk yang bekerja (%). Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 305.000.000,- dan realisasi





anggaran sebesar Rp. 297.008.800,- atau 99,38%, realisasi fisik 100%.

Outcomes dari program ini diantaranya terlatihnya tenaga kerja yang mampu bersaing didalam pasar kerja maupun berwirausaha melalui pemagangan dan pelatihan kewirausahaan.

b. Program peningkatan kesempatan kerja;

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 386.300.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 384.156.450,- atau 99,45%, realisasi fisik 100%.

Outcomes dari program ini diantaranya tersedianya informasi bursa kerja online.

c. Program pelatihan berbasis kompetensi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 374.477.350,- atau 99,86%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diukur dari indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%), partisipasi perempuan di lembaga swasta (%), rasio KDRT, persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%), partisipasi angkatan kerja perempuan (%), penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%), Indeks pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :





- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.87.453.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.84.368.650,- atau 96,47%, realisasi fisik 100%.
- b. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6(enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 746.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.727.171.330,- atau 97,48%, realisasi fisik 100%.
- c. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.403.071.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.719.844.327,- atau 71,57%, realisasi fisik 100%.
- d. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 156.427.600,- atau 97,77%, realisasi fisik 100%.
- e. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 268.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.859.850,- atau 99,95%, realisasi fisik 100%.





Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

3. Bidang Pangan

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian indikator kinerja bidang pangan diukur dari indikator jumlah regulasi ketahanan pangan (Pergub), ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton), penguatan cadangan pangan (%), penanganan Daerah Rawan Pangan.

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6(enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 265.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 225.417.450,- atau 85,06%, realisasi fisik 86,65%.

b. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 227.924.500,- atau 99,10%, realisasi fisik 100%.

c. Program good governance

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7(tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.800.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.766.262.051,- atau 99,10%, realisasi fisik 98,13%.

d. Program pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3(tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.328.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.320.315.000,- atau 97,45%, realisasi fisik 97,60%.





e. Program ketahanan pangan dan gizi keluarga

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.140.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.137.237.300,- atau 98,03%, realisasi fisik 99,79%.

f. Program peningkatan ketahanan pangan Kalteng Besuh

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.414.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.398.721.750,- atau 96,19%, realisasi fisik 100%.

g. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 9(sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.492.061.373,- atau 98,41%, realisasi fisik 100%.

h. Program peningkatan kesejahteraan petani

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.140.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.135.500.000,- atau 96,37%, realisasi fisik 96,79%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

4. Bidang Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Indikator kinerja bidang pertanahan adalah penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Ha) dan penyelesaian kasus tanah negara (jumlah kasus).

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3





(tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.947.075.925,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.930.703.422,- atau 98,27%, realisasi fisik 100%.

- b) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 446.344.075,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.436.390.035,- atau 97,77%, realisasi fisik 100%.
- c) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.225.700,- atau 86,04%, realisasi fisik 100%.
- d) Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018..

5. Bidang Lingkungan Hidup

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja lingkungan hidup diukur dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup pada 14 Kab/Kota, peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH pada 14 Kab/Kota, pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut, penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup 100%, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada 14 Kab/Kota, IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP).

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.711.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.646.970.100,- atau 90,99%, realisasi fisik 98,94%.





b. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui 10(sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.075.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.045.586.840,- atau 100%, realisasi fisik 100%.

c. Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.354.618.537,- atau 100%, realisasi fisik 100%.

d. Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7(tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.435.750.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.363.262.687,- atau 100%, realisasi fisik 100%.

e. Program pengendalian kebakaran hutan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.294.826.843,- atau 98,28%, realisasi fisik 98,28%.

f. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.331.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.326.360.000,- atau 98,52%, realisasi fisik 98,52%.

g. Program penataan hukum/peraturan perundang-undangan LH

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%, realisasi fisik 100%.





h. Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.68.762.700,- atau 98,23%, realisasi fisik 98,23%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2018 yang diukur dari indikator rasio penduduk ber KTP sebesar 106; rasio bayi berakte kelahiran 80,89; rasio pasangan berakte nikah 82,54, kepemilikan KTP 1.690.829 orang, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 76,4; Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) usia <17 tahun sebesar 70.545 orang, penerapan KTP Nasional berbasis NIK seluruh Kab/Kota. Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah melalui 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.227.667.008,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.196.364.249,- atau 97,45%, realisasi fisik 100%.

b. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah melalui 9 (sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 833.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 816.710.818,- atau 98%, realisasi fisik 100%.

c. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 386.895.992,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 377.064.900,- atau 97,46%, realisasi fisik 100%.





Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2018 yang diukur dari indikator aparatur desa yang terlatih sebanyak 1400 orang, anggota BPD terlatih sebanyak 50 orang, pendamping program pemberdayaan masyarakat terlatih sebanyak 795 orang, PKK aktif 1.854 unit, Posyandu aktif 2.325 unit, BUMDes aktif 422 unit, posyantek aktif 120 unit, Lembaga Pengembangan Kawasan Pesisir berbasis TTG 10 unit.

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.041.416.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.010.170.034,- atau 98,97%, realisasi fisik 100%.

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 923.081.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 902.159.600,- atau 97,73%, realisasi fisik 100%.

c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 838.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 793.265.700,- atau 94,57%, realisasi fisik 100%.

d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melalui 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.542.570.350,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.437.906.224,- atau 97,05%, realisasi fisik 100%.





e. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 112.929.650,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 107.094.350,- atau 94,83%, realisasi fisik 100%.

f. Program peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 908.081.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 873.318.047,- atau 96,17%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur dari indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga, Rasio akseptor KB, Cakupan peserta KB aktif (Orang), Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Keluarga Berencana

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui 17 (tujuh belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 294.182.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 287.219.890,- atau 97,63%, realisasi fisik 100%.

b) Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi





anggaran sebesar Rp.48.999.950,- atau 98,00%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018..

9. Bidang Perhubungan

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian kinerja bidang perhubungan diukur dari indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP), Load Factor Angkutan Jalan (%), Jumlah uji RIR angkutan umum (Unit), Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (Unit), Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional) (Armada), Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit), Jumlah Angkutan Sungai (Unit), Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah), Jumlah Bandara (Buah), Jumlah Dermaga Sungai (Buah), Jumlah Pelabuhan Laut (Buah), Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit), Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (Hari), Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.), Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit), Pemasangan Rambu Sungai (Unit), Pemasangan Rambu SBNP (Unit).

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program peningkatan pelayanan angkutan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.350.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.840.210.635,- atau 90,74%, realisasi fisik 90,69%.

b. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.220.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.189.817.750,- atau 97,53%, realisasi fisik 97,33%.

c. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar





Rp.75.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.62.695.900,- atau 83,59%, realisasi fisik 87,01%.

d. Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi dan workshop

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.95.174.750,- atau 63,45%, realisasi fisik 78,16%.

e. Program pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.850.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.773.768.418,- atau 91,03%, realisasi fisik 91,14%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika diukur dari indikator Desa dering/Telepon Pedesaan (Unit), Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Warung masyarakat Informasi, Pusat Komunitas Kreatif (buah), M-CAP (Mobile Capacity Acces Point), M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit), Data Center (buah), Media Center (buah), Rasio wartel/warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV local, Website milik pemerintah daerah (buah), Pameran/expo terkait Kominfo.

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pengembangan persandian daerah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.7.457.518.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.389.691.908,- atau 99,09%, realisasi fisik 100%.





b. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.40.303.939,- atau 80,61%, realisasi fisik 100%.

c. Program kerjasama informasi dan media massa

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.847.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.838.330.614,- atau 99,71%, realisasi fisik 100%.

d. Program pengembangan data/informasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.219.692.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.219.036.000,- atau 99,70%, realisasi fisik 100%.

e. Program peningkatan dan pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.110.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.105.980.616,- atau 96,35%, realisasi fisik 100%.

f. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melalui 11(sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.793.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.583.217.485,- atau 96,37%, realisasi fisik 100%.

g. Program penyelenggaraan sosialisasi seminar,publikasi dan workshop

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melalui





11(sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.793.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.583.217.485,- atau 96,37%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah diukur dari indikator Persentase koperasi aktif (%), Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit), Jumlah BPR/LKM (Unit), Usaha Mikro dan Kecil (Unit).

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program penguatan kelembagaan koperasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 11(sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.414.848.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.334.649.220,- atau 94,33%, realisasi fisik 97,89%.

b. Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.549.880.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.537.876.600,- atau 97,82%, realisasi fisik 100%.

c. Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.372.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.356.403.964,- atau 95,68%, realisasi fisik 100%.

d. Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan





dengan total anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.086.820.500,- atau 98,80%, realisasi fisik 100%.

e. Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 10(sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.175.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.997.972.174,- atau 93,79%, realisasi fisik 100%.

f. Program peningkatan daya saing UMKM

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 10(sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.450.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.327.003.500,- atau 72,57%, realisasi fisik 77,81%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

12. Bidang Penanaman Modal

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah diukur dari indikator Persentase koperasi aktif (%), Jumlah UKM non BPR/LKM (Unit), Jumlah BPR/LKM (Unit), Usaha Mikro dan Kecil (Unit).

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pameran promosi investasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.918.476.190,- atau 87,47%, realisasi fisik 100%.





b. Program capaian realisasi investasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.730.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.689.707.901,- atau 94,48%, realisasi fisik 100%.

c. Program perencanaan dan pengembangan potensi investasi daerah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.350.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.318.399.127,00- atau 97,66%, realisasi fisik 100%.

d. Program peningkatan pelayanan perizinan dan informasi publik

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah melalui 9(sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.4.695.944.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.518.197.075,15,- atau 74,92%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang kepemudaan dan olah raga diukur dari indikator Jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (buah), lapangan olahraga (lapangan volly, sepak bola, bulu tangkis, basket (buah).

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran





sebesar Rp.60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.53.400.000,- atau 89,00%, realisasi fisik 100%.

b. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Kalimantan Tengah melalui 8(delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.882.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.856.974.250,- atau 98,64%, realisasi fisik 100%.

c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.59.240.000,- atau 98,73%, realisasi fisik 100%.

d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.149.500.000,- atau 99,67%, realisasi fisik 100%.

e. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.475.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.466.967.769,- atau 98,31%, realisasi fisik 100%.

f. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.075.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.067.739.941,- atau 99,32%, realisasi fisik 100%.

g. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.199.987.333,- atau 99,99%, realisasi fisik 100%.





h. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.83.927.384,- atau 98,74%, realisasi fisik 100%.

i. Program pengembangan data dan informasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.172.774.250,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.161.644.250,- atau 93,56%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

14. Bidang Statistik

Bidang statistik merupakan bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar dengan indikator tersusunnya Buku " Kalimantan Tengah Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kalimantan Tengah" yang didukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

a. Program Pengembangan Persandian Daerah

Dalam program ini ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.200.039.400,- atau 95,26%, realisasi fisik 100%.
- 2) Pembinaan statistik sektoral dengan anggaran sebesar Rp.74.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.73.781.180,- atau 99,70%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.





15. Bidang Persandian

Bidang persandian merupakan bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar yang didukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

a. Program Pengembangan Persandian Daerah

Dalam program ini ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Koordinasi jaringan bidang persandian antar pusat dan daerah dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.95.249.300,- atau 95,25%, realisasi fisik 100%.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Provinsi, Kab/Kota se-Kalimantan Tengah dengan anggaran sebesar Rp.110.958.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.108.887.600,- atau 98,13%, realisasi fisik 100%.
- 3) Koordinasi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dengan anggaran sebesar Rp.33.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.32.067.000,- atau 97,17%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018

16. Bidang Kebudayaan

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang kebudayaan diukur dari indikator Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali), Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah).

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program peningkatan seni budaya

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.875.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.859.714.502,- atau 98,25%, realisasi fisik 100%.





Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

17. Bidang Perpustakaan

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang perpustakaan diukur dari indikator Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (eks), Jumlah masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, Jumlah perpustakaan (unit), Indeks kepuasan pengunjung terhadap perpustakaan, Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul).

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program peningkatan koleksi perpustakaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.163.300.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.158.791.832,- atau 97,24%, realisasi fisik 100%.

b. Program peningkatan SDM pengelola perpustakaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.61.835.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.54.043.906,- atau 87,40%, realisasi fisik 100%.

c. Program monitoring dan evaluasi pengembangan perpustakaan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.23.119.700,- atau 92,48%, realisasi fisik 100%.

d. Program pengembangan data/informasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.24.041.200,- atau 96,16%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.





18. Bidang Kearsipan

Pada fokus urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, capaian Indikator kinerja bidang kearsipan diukur dari indikator Jumlah SOPD menerapkan arsip secara baku sesuai standar kearsipan.

Indikator kinerja tersebut didukung pencapaiannya melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melalui 13(tiga belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.91.874.574,- atau 91,87% realisasi fisik 100%.

2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6(enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.127.551.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.123.861.689,- atau 97,11% realisasi fisik 100%.

3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6(enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.954.200,- atau 99,54% realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

URUSAN PILIHAN

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada fokus urusan pilihan, capaian Indikator kinerja bidang kelautan dan perikanan diukur dari Jumlah produksi perikanan, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun), Konsumsi ikan (Kg,Kap,Tahun), Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (Ton,Tahun), Peningkatan produksi benih ikan, Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi), Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%), Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana





Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (kasus), Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (%), Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha/Tahun), Luasan Kawasan Pesisir yang direhabilitasi (Ha/Tahun).

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 9(sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.19.155.141.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.18.394.963.854,- atau 96,03%realisasi fisik 100%.

b. Program peningkatan daya saing usaha produk kelautan dan perikanan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.026.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.975.977.900,- atau 95,05%, realisasi fisik 100%.

c. Program pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.199.680.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.157.991.382,- atau 96,53%, realisasi fisik 100%.

d. Program pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.981.727.500,-dan realisasi anggaran sebesar Rp.935.866.590,- atau 95,33% realisasi fisik 100%.

e. Program peningkatan kompetensi laboratorium perikanan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu)kegiatan dengantotal anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan realisasianggaran sebesar Rp.0,- atau 0% realisasi fisik 0%.





- f. Program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya produksi perikanan budidaya

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6(enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.587.641.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.434.153.966,- atau 94,07%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018, kecuali Program Peningkatan Kompetensi laboratorium Perikanan belum mencapai target yang direncanakan tahun 2018

2. Bidang Pariwisata

Pada fokus urusan pilihan, capaian Indikator kinerja bidang pariwisata diukur dari indikator Jumlah wisatawan (orang), Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%), Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui 13(tigabelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.775.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.762.468.900,- atau 99,29%, realisasi fisik 100%.

- b. Program Pengembangan destinasi pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui 19(sembilan belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.518.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.422.783.600,- atau 97,29%, realisasi fisik 100%.

- c. Program Pengembangan kemitraan pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6(enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.140.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.137.400.000,- atau 98,14%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.





3. Bidang Pertanian

Pada fokus urusan pilihan, capaian Indikator kinerja bidang pertanian diukur dari Luas tanam tanaman pangan, Luas panen tanaman pangan, Produktivitas tanaman pangan, Produksi tanaman pangan, Luas Panen Tanaman Holtikultura, Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura, Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura, Populasi Ternak, Jumlah Produksi Daging Ternak.

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program peningkatan kesejahteraan petani

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 9(sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.900.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.718.552.300,- atau 96,92%, realisasi fisik 98,02%.

b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 13(tiga belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.4.365.822.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.225.096.827,- atau 96,78%, realisasi fisik 100%.

c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.442.330.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.349.432.700,- atau 93,56%, realisasi fisik 100%.

d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 28(dua puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.18.708.644.850,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.12.989.668.666,16 atau 69,43%, realisasi fisik 70,19%.

e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.325.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.192.215.799,- atau 59,14%, realisasi fisik 60,61%.





f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 12(dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.486.629.150,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.365.662.912,- atau 91,86%, realisasi fisik 95,37%.

g. Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 15(lima belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.7.632.226.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.216.753.694,- atau 94,56%, realisasi fisik 96,89%.

h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.225.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.197.380.000,- atau 87,72%, realisasi fisik 89,42%.

i. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.650.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.458.372.895,- atau 70,52%, realisasi fisik 70,87%.

j. Program penanganan kawasan lahan gambut (PLG)

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.978.615.000,- atau 97,86%, realisasi fisik 99,77%.

k. Program penyelenggaraan penyuluhan dan sarana dan prasarana penyuluhan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.225.723.800,- atau 56,43% ,realisasi fisik 58,16%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018





4. Bidang Perkebunan

Urusan pilihan bidang Pertanian mencakup bidang Perkebunan dengan Indikator kinerja Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%), penerimaan devisa ekspor per tahun dari komoditas perkebunan (US\$ Juta), Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%), Peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US\$/KK/Tahun), Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun), Peningkatan pertumbuhan sub sektor-sektor perkebunan (%), Penumbuhan sentra-sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan), Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun).

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a) Program peningkatan kesejahteraan petani

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.397.960.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.432.344.855,- atau 101,43%, realisasi fisik 100%.

b) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 13(tiga belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.4.365.822.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.225.096.827,- atau 96,78%, realisasi fisik 100%.

c) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.442.330.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.349.432.700,- atau 93,56%, realisasi fisik 100%.

d) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 31(tiga puluh satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.11.225.061.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.221.615.544,- atau 100%, realisasi fisik 100%.

e) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar





Rp.115.040.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.107.965.000,00- atau 93,85%,realisasi fisik 100%.

f) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.117.340.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018..

5. Bidang Kehutanan

Pada fokus urusan pilihan, capaian Indikator kinerja bidang kehutanan diukur dari Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen), Persentase Peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat Baik (Persen), Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan (Persen), Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun (Jumlah), Jumlah kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan menurun 20% per tahun (Jumlah), Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah (Persen), Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Paket Kegiatan), Pencegahan, pengendalian dan penindakan *illegal logging* (frekuensi pengamanan hutan), Penghijauan dan reboisasi (jumlah batang pohon bibit), Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6(enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.710.876.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.270.578.518,- atau 83,76%, realisasi fisik 100%.

b. Program rehabilitasi hutan dan lahan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 10(sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.270.825.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.912.158.622,- atau 71,75%, realisasi fisik 75%.





c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 15(lima belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.96.220.870.250,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.33.148.230.355,- atau 34,45%, realisasi fisik 57%.

d. Program perencanaan dan pengembangan hutan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3(tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.580.346.850,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.451.707.094,- atau 77,83%, realisasi fisik 80,03%.

e. Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.775.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.410.734.441,- atau 53,00%, realisasi fisik 63%.

f. Program peningkatan penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial serta penanganan konflik tenurial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui 17(tujuh belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.015.991.250,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.715.745.148,- atau 85,11%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018, kecuali Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan belum memenuhi target yang direncanakan tahun 2018.

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada fokus urusan pilihan, capaian Indikator kinerja bidang kehutanan diukur dari ketersediaan daya listrik (MW), Rasio Ketersediaan tenaga listrik (%), Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%), rasio desa berlistrik (%).

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran





sebesar Rp.215.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.87.951.387,00,- atau 40,87%, realisasi fisik 100%.

- b) Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.234.350.000,- atau 93,74%, realisasi fisik 100%.

- c) Program Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.459.890.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.451.903.000,- atau 98,26%, realisasi fisik 100%.

- d) Program Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.124.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.121.340.895,- atau 97,38%, realisasi fisik 100%.

- e) Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui 14(empatbelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.55.882.131.950,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.49.661.104.938,- atau 88,87%, realisasi fisik 98,97%.

- f) Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.618.360.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.594.820.400,- atau 96,19%, realisasi fisik 100%.

- g) Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6(enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.165.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.006.062.238,- atau 86,32%, realisasi fisik 100%.





h) Program Penataan Wilayah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.243.457.559,- atau 97,38%, realisasi fisik 100%.

i) Program Pengawasan Energi dan Air Tanah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.99.900.000,- atau 99,90%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018..

7. Bidang Perdagangan

Pada fokus urusan pilihan, capaian Indikator kinerja bidang perdagangan diukur dari Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%), Ekspor Bersih Perdagangan (US\$), Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal/Penerbitan SIUP.

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui 19 (sembilan belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.760.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.454.900.940,- atau 82,66%, realisasi fisik 100%.

b. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.912.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.757.255.896,- atau 91,89%, realisasi fisik 100%.

c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 860.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.694.791.678,- atau 80,79%, realisasi fisik 100%.





Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

8. Bidang Perindustrian

Pada fokus urusan pilihan, capaian Indikator kinerja bidang perindustrian diukur dari Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%), Pertumbuhan Industri, (unit), Cakupan bina kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang).

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui 20 (dua puluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.115.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.981.140.752,- atau 93,63%, realisasi fisik 100%.

b. Program penumbuhan industri agro

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui 9 (sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.349.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.788.421.892,- atau 58,44%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018

9. Bidang Transmigrasi

Pada fokus urusan pilihan, Indikator kinerja bidang ketransmigrasian diukur dari jumlah transmigran yang ditempatkan (KK). Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 445.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 441.667.740,- atau 99,25%, realisasi fisik 100%.

b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5(lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 730.016.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 702.123.100,- atau 96,18%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.





Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui proses penyusunan dokumen perencanaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan selalu dalam koridor mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKPD Tahun 2018 berpedoman kepada RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Selanjutnya dokumen perencanaan akan menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten/kota dalam membangun Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan urusan bidang perencanaan, Provinsi Kalimantan Tengah telah 2 (dua) kali berhasil masuk dalam 15 besar penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang dilaksanakan oleh Bappenas.

Indikator kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.541.165.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.424.100.035,- atau 95,39%, realisasi fisik 100%.

b. Program Kerjasama Pembangunan

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.597.521,- atau 97,28%, realisasi fisik 100%.

c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.598.319.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.488.777.606,- atau 96,96%, realisasi fisik 100%.

d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 991.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 946.517.967,- atau 95,51%, realisasi fisik 100%.





e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.071.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.039.066.011,- atau 97,02%, realisasi fisik 100%.

f. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.464.725.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.376.928.296,- atau 94,01%, realisasi fisik 100%.

g. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 762.363.210,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 719.262.788,- atau 94,35%, realisasi fisik 100%.

h. Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 905.636.790,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 822.978.646,- atau 90,87%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

2. Keuangan

Pencapaian indikator kinerja bidang keuangan sebagai penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah diukur dengan presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer, presentase Belanja Langsung (BL) terhadap APBD.

Pencapaian indikator bidang Keuangan didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 20 (dua puluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.953.873.720,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.586.255.465,- atau 80,19%, realisasi fisik 90,37%.

Sedangkan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.491.241.951,- dan





realisasi anggaran sebesar Rp. 1.063.264.700,- atau 71,30%, realisasi fisik 75%.

b. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 9 (sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.847.160.651,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.132.360.042,- atau 91,92%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

3. Kepegawaian

Kepegawaian merupakan penunjang urusan Pemerintahan dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan. Indikator kinerja untuk urusan kepegawaian adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Kedinasan serta jumlah aparatur yang mendapat pembinaan dan pengembangan.

Pencapaian indikator di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Kedinasan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.203.658.932,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.178.941.137,- atau 87,86%, realisasi fisik 100%.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 15 (lima belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.225.220.753,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.963.118.203,- atau 91,87%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan merupakan penunjang urusan pemerintahan yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah. Pencapaian indikator di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah melalui 13 (tiga belas) kegiatan dengan total





anggaran sebesar Rp.6.836.701.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.125.591.325,00- atau 89,60%, realisasi 91,85%.

b. Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.733.753.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.689.399.050,00- atau 93,96%, realisasi fisik 94,17%.

c. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.162.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.158.141.375,00- atau 97,08%, realisasi fisik 98,65%.

d. Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3(tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.277.410.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.246.727.900,00- atau 88,94%, realisasi fisik 91,86%.

e. Program Pendidikan Kedinasan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3(tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.10.661.769.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.8.961.974.375,00- atau 84,06%, realisasi fisik 84,17%.

f. Program Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur

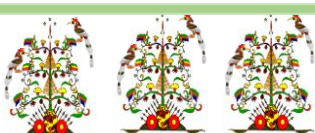
Program ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2(dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.550.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.369.572.200,00- atau 67,19%, realisasi fisik 67,61%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan merupakan penunjang urusan pemerintahan yang merupakan bagian dari perencanaan. Pencapaian indikator kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK





Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 633.706.971,- atau 97,49%, realisasi fisik 100%.

b. Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 631.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 620.907.046,- atau 98,40%, realisasi fisik 100%.

c. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

Program ini dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 327.910.850,- atau 87,44%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

6. Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan merupakan penunjang urusan Pemerintahan yang diukur dengan beberapa indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), nilai Inovasi Pelayanan Publik, nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Perda Kelembagaan Organisasi Daerah.

Pencapaian indikator kinerja Bidang Administrasi Pemerintahan dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 265.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 259.382.900,- atau 97,88%, realisasi fisik 100%.

Outcome dari program dan kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 13 (tigabelas) kegiatan dengan total anggaran





sebesar Rp. 1.072.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 998.640.633,- atau 93,08%, realisasi fisik 96,87%.

c. Program Tata kelola Pemerintahan yang baik dan Pemberantasan KKN

Program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 711.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 690.022.820,- atau 96,95%, realisasi fisik 100%.

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 836.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 805.097.524,- atau 96,30%, realisasi fisik 100%.

Seluruh Program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018.

7. Pengawasan

Pencapaian indikator kinerja Bidang Pengawasan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

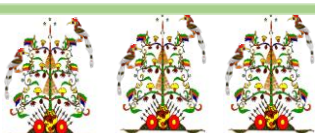
Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1(satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.195.190.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.176.575.948,- atau 90,46%, realisasi fisik 90,47%.

b. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.269.947.099,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.250.663.783,00,- atau 92,86%, realisasi fisik 37,49%.

c. Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui 8(delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.4.579.105.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.560.803.484,- atau 99,60%, realisasi fisik 99,38%.





d. Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3(tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.850.298.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.831.487.819,00- atau 97,79%, realisasi fisik 97,83%.

e. Program Peningkatan Pelayanan Publik atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4(empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.609.619.225,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.476.773.646,00- atau 91,75%, realisasi fisik 92,36%.

Berikut Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 sampai TW I dapat dilihat pada Tabel di bawah ini



TABEL 2.28
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 TRIWULAN I

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)																
		Bidang Urusan Kesehatan																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksannnya pengiriman surat dan paket sarana kesehata se-Kalteng 1 tahun	72	441,191,663	12	66,000,000	12	74,000,000	3	8,196,000	25. 00	11.08	15	74,196,000	20.83	16.82	Dinas Kesehatan
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan komunikasi, air dan listrik 1 tahun	72	5,788,078,992	12	877,583,690	12	900,000,066	3	164,968,628	25. 00	18.33	15	1,042,552,3 18	20.83	18.01	Dinas Kesehatan
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya tagihan barang milik daerah 1 tahun	72	115,986,994	12	12,000,000	12	12,000,000	3	10,472,031	25. 00	87.27	15	22,472,031	20.83	19.37	Dinas Kesehatan
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	72	7,027,314,375	12	1,060,400,000	12	1,876,700,000	3	159,444,000	25. 00	8.50	15	1,219,844,0 00	20.83	17.36	Dinas Kesehatan
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	meningkatnya kebersihan Lingkungan kantor	72	2,661,252,500	12	450,000,000	12	479,000,000	3	78,640,500	25.	16.42	15	528,640,500	20.83	19.86	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
			dinkes dan UPTD									00						
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya peralatan kerja yang dapat digunan	72	416,716,031	12	65,000,000	12	167,200,000	0	-	-	-	12	65,000,000	16.67	15.60	Dinas Kesehatan
		Penyediaan alat tulis kantor	Tsedianya alat tulis kantor	72	1,769,548,594	12	274,998,400	12	364,876,400	3	91,150,000	25.00	24.98	15	366,148,400	20.83	20.69	Dinas Kesehatan
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya administrasi perkantoran	72	2,038,202,000	12	307,570,000	12	367,668,000	3	37,599,200	25.00	10.23	15	345,169,200	20.83	16.93	Dinas Kesehatan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pencahayaan di ruang kerja dan disekitar kantor semakin baik.	72	662,563,125	12	122,000,000	12	140,710,000	3	25,640,000	25.00	18.22	15	147,640,000	20.83	22.28	Dinas Kesehatan
		Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	72	1,633,059,888	12	286,977,075	12	336,323,000	3	35,606,900	25.00	10.59	15	322,583,975	20.83	19.75	Dinas Kesehatan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatny pengetahuan dan informasi bagi PNS Dinkes dan UPTD	72	783,075,750	12	120,000,000	12	177,200,000	3	16,720,000	25.00	9.44	15	136,720,000	20.83	17.46	Dinas Kesehatan
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	72	1,104,557,313	12	170,000,000	12	170,000,000	0	-	-	-	12	170,000,000	16.67	15.39	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB			
																RPJMD s/d Tahun 2018					
																%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12			
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Adanya kesepahaman antara pusat dan provinsi dalam hal pelaksanaan program atau kegiatan	72	1,607,757,813	12	253,750,000	12	378,000,000	3	22,121,300	25.00	5.85	15	275,871,300	20.83	17.16	Dinas Kesehatan			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Adanya kesepahaman antara provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan kegiatan	72	2,202,320,938	12	359,280,000	12	431,610,000	3	20,552,942	25.00	4.76	15	379,832,942	20.83	17.25	Dinas Kesehatan			
		Rujukan berobat PNS	Membaiknya kesehatan PNS dinkes dan UPTD	48	501,794,969	8	25,000,000	8	124,562,504	0	-	-	-	8	25,000,000	16.67	4.98	Dinas Kesehatan			
		Jasa medis balai Labkes	Peningkatan Disiplin dan kinerja pegawai labkes 1 Tahun	336	1,985,442,500	56	280,000,000	56	280,000,000	0	-	-	-	56	280,000,000	16.67	14.10	Dinas Kesehatan			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Mobil Operasional Gudang Farmasi (DAK)	6	3,257,477,188	0		1	1,450,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya perlatan Gudang Farmasi Dinkes dan Bapelkes (APBD+DAK)	72	4,321,896,250	12	388,556,500	12	1,323,329,000	0	-	-	-	12	388,556,500	16.67	8.99	Dinas Kesehatan
		Pengadaan mebeleur	Tersdianya meubelair RSJ Kalawa Atei dan Labkesda dan Bapelkes	12	862,563,125	2	121,615,000	2	212,000,000	0	-	-	-	2	121,615,000	16.67	14.10	Dinas Kesehatan
		Pengadaan trafo dan pemasangan /perbaikan instalasi listrik	Meningkatnya pelayanan dan mutu obat dapat terjaga	24	2,761,534,063	4	250,385,000	4	100,000,000	0	-	-	-	4	-	16.67	-	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor Dinkes dan UPTD	72	5,070,932,027	12	617,884,875	12	763,172,749	0	-	-	-	12	617,884,875	16.67	12.18	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelaksanaan program/ kegiatan di luar gedung	48	1,902,914,375	8	267,460,000	8	290,960,000	3	31,441,000	37. 50	-	11	267,460,000	22.92	14.06	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terawatnya gedung kantor dinkes dan UPTD	72	1,732,823,594	12	226,820,000	12	221,300,000	3	13,580,000	25. 00	10.81	15	258,261,000	20.83	14.90	Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Membaiknya gedung kantor dinkes/UPTD (Dinkes, Labkesda dan Bapelkes) (APBD+DAK)	18	7,253,677,626	3	354,684,536	3	5,345,591,000	3	96,691,750	100 .00	6.14	6	368,264,536	33.33	5.08	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pembangunan Tower Untuk Penampungan Air Bersih	Jumlah Tower Penampungan Air bersih yang dibangun 100% 1 Paket	1	68,000,000							-	-	-	96,691,750	-	142.19	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah Jaringan Air bersih/air minum yang dibangun 1 Paket	1	20,000,000	1	20,000,000				-	-	-	1	20,000,000	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Linen	Terlaksananya pengadaan linen untuk Bapelkes 1 Paket	1	27,000,000						-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan disiplin aparatur									-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibelanjakan sebanyak ... 1 tahun	72	930,030,000			12	31,750,000	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						12	166,500,000	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									-	-	-	-	-	-	-	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksana pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun	100	1,581,407,813	100	200,000,000	100	351,302,150	0	-	-	-	100	200,000,000	50.00	12.65	Dinas Kesehatan
		Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Kesehatan						100	175,000,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan						100	370,750,000	25	6,470,000	25. 00	1.75	25	6,470,000	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Monitoring, Evaluasi Sinergitas Pembinaan Jabatan Fungsional Kab/Kota						100	198,600,000	25	24,240,000	25. 00	12.21	25	24,240,000	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Kapasitas Sistem Perencanaan						100	-	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Dinkes 1 tahun	100	137,038,256	100	21,000,000	100	18,442,300	0	-	-	-	100	21,000,000	50.00	15.32	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun 1 tahun	100	205,557,384	100	24,152,650	100	24,577,000	0	-	-	-	100	24,152,650	50.00	11.75	Dinas Kesehatan
		Penyusunan LAKIP						100	24,300,000	0	-	-	-	-	-	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
		Penyusunan LKPJ dan LPPD						100	13,200,000	0	-	-	-	-	-	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
		Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Daerah (BMD)						100	128,512,000	0	-	-	-	-	-	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
		Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)																
		Penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya Dokumen Renstra Dinkes Prov Kalteng 1 Dokumen	100	967,908,125	100	98,700,000	100	160,165,000	10	8,742,243	10.00	5.46	110	107,442,243	55.00	11.10	Dinas Kesehatan
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																
		Pengadaan obat buffer dan alat kesehatan	tersedianya obat buffer dan alkes (Obat IMS) 90%	100	7,865,000,000	100	500,535,000	100	935,000,000	0	-	-	-	100	500,535,000	50.00	6.36	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Mobil Instansi Farmasi Provinsi Kalteng						100	25,900,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	
		Tim perencanaan obat terpadu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Obat 1 Dokumen	100	207,340,000	100	35,000,000	100	75,000,000	0	-	-	-	100	35,000,000	50.00	16.88	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
		Pertemuan Koordinasi Evaluasi Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Tingkat Provinsi						100	214,521,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Monitoring Evaluasi Tim Bina Wilayah Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)						100	449,075,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Bimbingan dan Evaluasi Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)							363,150,000									
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan													-		-	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Masyarakat																
		Iklan layanan masyarakat	iklan layanan elektronik 24 kali, layanan media cetak 12 kali, blok halaman 12 bulan dan 12 baliho layanan elektronik 24 kali, media cetak 12 kali , blok halaman 12 bl, baliho 12 buah	100	2,056,324,400	100	265,925,000	100	345,000,000	3	9,875,000	3.00	2.86	103	275,800,000	51.50	13.41	Dinas Kesehatan
		Pengadaan baju kader untuk posyandu di desa PM2L	"bahan seragam bg kader posyandu di desa PM2L"	100	694,500,000													Dinas Kesehatan
		Orientasi Kapasitas Kader dan Tokoh Masyarakat Untuk Desa Siaga	Terlaksananya kemampuan kader utk 42 desa siaga	100	1,026,625,000													Dinas Kesehatan
		Pengadaan Posbindu Kit		100	414,422,344	100	121,000,000							100	121,000,000	100.00	29.20	Dinas Kesehatan
		Konsultasi Pusat Promkes						4	32,450,000	4	-	-	-	4	9,875,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		Bimtek Promkes (GERMAS)						50	84,190,000	50	-	-	-	50	12,387,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Lomba Tingkat Provinsi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						100	92,800,000	0	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi Gemas bagi Lintas Sektor, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan ORMAS						100	100,000,000	0	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	Dinas Kesehatan
		Pergerakan Massa Dalam Gerakan Masyarakat Hisdup Sehat						100	138,000,000	0	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	Dinas Kesehatan
		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hisdup Sehat melalui Saka Bakti Husada (SBH)						100	103,900,000	2	1,500,000	2.0 0	1.44	2	1,500,000	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat bagi Kader PKK						100	75,000,000	0	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	Dinas Kesehatan
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat																



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah kegiatan pendukung penanggulangan balita gizi kurang sebanyak 249.104 bungkus tabularia dan 500 alat pemantau pertumb. 249.104 bungkus tabularia	100	1,044,355,000			100		0								Dinas Kesehatan
		Lomba balita	"Jumlah balita sehat yang dinilai dalam lomba balita di 14 Kab/Kota 1 kegiatan "	100	2,979,970,750	100	342,309,000	100	307,135,000	0	-	-	-	100	342,309,000	50.00	11.49	Dinas Kesehatan
		Penanggulangan Masalah Kekurangan Gizi (Underweight) dan Masalah Gizi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek						100	157,500,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Pembinaan Surveilans Gizi		100	1,062,025,000	100	153,640,000	100	102,230,000	0	0	-	-	100	153,640,000	50.00	14.47	Dinas Kesehatan
		Pertemuan Koordinasi Pengelola Gizi						100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pemberian PMT Lokal Ibu Hamil KEK						100	1,214,004,000	0	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Orientasi Petugas Dalam Penanggulangan Anemia pada Ibu Hamil dan Remaja Putri						100	157,500,000	0	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Orientasi Masalah Gizi Kurang dan Pendek						100	118,025,000	0	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi Pencegahan Stunting bagi Kader PKK						100	75,000,000	0	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pembinaan Terhadap Posyandu dan Mengadakan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)						100	70,350,000	0	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat																
		Penyusunan dan Konsultasi Publik BpS, SSK Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Pokja Sanitasi	Terlaksananya kegiatan BPS di 3 Kabupaten	100	721,518,750	100	40,000,000	100	40,000,000	100	-	-	-	200	40,000,000	100.0 0	5.54	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pertemuan evaluasi program STBM se Kalimantan Tengah						100	95,700,000	100	77,164,400	100 .00	80.63	100	77,164,400	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular																
		Mobile VCT	Jumlah lokasi yang diperiksa dan dijadikan lokasi pemeriksaan melalui kegiatan mobile VCT	100	1,055,727,500	100	51,400,000	100	84,285,000	20	8,675,000	20. 00	10.29	120	60,075,000	60.00	5.69	Dinas Kesehatan
		Survei Evaluasi Filariasis	Jumlah lokasi yang disurvei/dipetakan	100	1,168,131,250	100			75,320,000		-							Dinas Kesehatan
		Seminar hari malaria sedunia	Terlaksananya Seminar malaria 1 PT	100	744,438,750	100			100,000,000		-							Dinas Kesehatan
		Pertemuan evaluasi program penanggulangan masalah kesehatan	Terlaksananya pelaksanaan pertemuan evaluasi Program Penanggulangan Masalah Kesehatan	100	1,037,025,000	100	89,480,000	100	125,000,000	0	-	-	-	100	89,480,000	50.00	8.63	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Insektisida dan Larvasida	Jumlah jenis pengendalian vektor yang dibeli	100	1,433,037,500	100	101,000,000	100	50,000,000	0	49,800,000	-	99.60	100	150,800,000	50.00	10.52	Dinas Kesehatan
		Mass Blood Survey (MBS)	Jumlah lokasi yang disurvei/dipetakan	100	1,608,543,750	100		100	50,000,000	0	-	-	-	100	-	100.0	-	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
																0		
		Penguatan KPAD	terlaksananya Penguatan KPAD 1 tahun	100	1,165,822,500	100	100,000,000		100,000,000		-	-	-	100	100,000,000	50.00	8.58	Dinas Kesehatan
		Penguatan Yayasan Kanker IndonesiaCab. Palangka Raya	terlaksananya penguatan yayasanKanker Indo Kab. Palangka Raya	100	1,055,825,000	100	78,360,000		78,360,000		-	-	-	100	78,360,000	50.00	7.42	Dinas Kesehatan
		Penguatan PPTI	terlaksananya penguatan PPTI	100	994,265,000	100	50,000,150		50,000,150		-	-	-	100	50,000,150	50.00	5.03	Dinas Kesehatan
		Survey Kontak Penderitaan Kusta	"Terlaksana Survey kontak di 5 Kab 5 lokasi 250 org"	100	865,822,500	100												Dinas Kesehatan
		Workshop RR SIHA	30 peserta mengikuti workshop RR dengan sistem SIHA 30 peserta	100	1,057,531,250	100												Dinas Kesehatan
		Pelatihan Tim Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)	Terlaksananya Pelatihan Tim Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) 30	100	1,097,531,250	100												Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Supervisi Manajemen Pengendalian Hdisp (Hepatitis, Diare, Infeksi Saluran Perencanaan) dan ISPA, Imunisasi	Terlaksananya Supervisi manajemen pengendalian Hdisp (Hepatitis, Diare, Infeksi Saluran Pencernaan) dan ISPA, imunisasi 26 OT di 14 Kab/Kota 26 OT	100	628,765,625	100		100	71,560,000	10	2,580,000	10. 00	3.61	110	2,580,000	55.00	0.41	Dinas Kesehatan
		Penguatan Penemuan dan Penanganan Kasus TB Paru dan Kusta	Meningkatnya penemuan kasus TB & Kusta 6 Lokasi	100	758,518,750	100		100	30,000,000	20	27,140,000	20. 00	90.47	120	27,140,000	60.00	3.58	Dinas Kesehatan
		Pertemuan Anggota Komda Kipi						100	53,701,700	0	11,761,700	-	21.90	-	11,761,700	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Pertemuan Koordinasi Kampanye Campak Rubella Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah						100	50,000,000	0	39,980,000	-	79.96	-	39,980,000	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Measies Rubella Dengan LP/LS Terkait Povinsi						100	158,286,500	0	127,259,916	-	80.40	-	127,259,916	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Triple Eliminasi (HIV, Sifilis, Hepatitis B) Bagi Ibu Hamil						100	125,000,000	20	17,220,000	20.00	13.78	20	17,220,000	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik						100	150,000,000	0	-	-	-	-	-	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
		Workshop Pembekalan dan Pembentukan Tim Teknis SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) dan Penguatan Surveilans Tuberkulosis						100	49,598,000	0	41,525,000	-	83.72	-	41,525,000	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
		Workshop Perencanaan Logistik Tuberkulosis (TB) Sensitive Obat dan Resisten Obat							76,276,000		-							
		Penguatan Penemuan dan Tatalaksana Kasus Tuberkulosis (TB) di Kabupaten/Kota							91,489,000		10,160,000							
		On The Job Training Desentralisasi Pasien Tuberkulosis Resisten Obat							42,500,000		-							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Revitalisasi Kapasitas Pengelola Malaria pada Fase Pemeliharaan Eliminasi							49,700,000		-							
		Pemantauan dan Koordinasi Tatalaksana Kasus Rabies						100	55,070,000	20	8,635,000	20. 00						
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																
		Audit internal	Jumlah dokumen	100	89,000,000	100	14,630,000	100	15,000,000	0	-	-	-	100	14,630,000	50.00	16.44	Dinas Kesehatan
		Kaji ulang manajemen (KUM)	"Jumlah pegawai yg di kaji ulang manajemen (KUM)"	100	88,000,000	100	15,126,900	100	15,000,000	0	-	-	-	100	15,126,900	50.00	17.19	Dinas Kesehatan
		Uji banding antar laboratorium	"Jumlah dokumen laporan hasil uji banding antar Lab"	100	101,999,800	100	25,954,900	100	30,000,000	0	-	-	-	100	25,954,900	50.00	25.45	Dinas Kesehatan
		Pelatihan ISO/IEC	Jumlah orang yg dilatih dlm SNI ISO / IEC	100	104,723,000	100	18,211,500	100	78,026,000	0	-	-	-	100	18,211,500	50.00	17.39	Dinas Kesehatan
		Evaluasi kinerja oleh KAN	"Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja "	100	292,500,000	100	49,200,000	100	50,000,000	0	-	-	-	100	49,200,000	50.00	16.82	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemantapan mutu eksternal	Jumlah Sampel Pengujian Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	100	45,000,000	100			65,000,000		51,900,000	-	79.85	100	51,900,000	50.00	115.33	Dinas Kesehatan
		Kalibrasi peralatan laboratorium kesehatan	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja	100	390,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	0	-	-	-	100	65,000,000	50.00	16.67	Dinas Kesehatan
		On Job Training Tenaga Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kabupaten							73,700,000		-							
		Benchmarking ke Lembaga Pengujian dan Kalibrasi yang menerapkan Good Laboratory Practice (GLP)							96,344,100		-							
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin																
		Pelayanan operasi katarak	"jumlah mata yang akan dilayani dalam operasi katarak"	100	3,454,875,000	100	320,270,000	100	409,650,000	0	-	-	-	100	320,270,000	50.00	9.27	Dinas Kesehatan
		Pengobatan masal	Dokumen laporan hasil pelayanan pengobatan massal	100	2,111,696,250	100												Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pelayanan Kesehatan Lapangan			2,189,556,250	100	247,495,000	100	300,000,000	0	1,500,000	-	0.50	100	248,995,000	100.00	11.37	Dinas Kesehatan
		Workshop Screening Pemeriksaan Katarak Mata						100	96,500,000	80	75,582,000	80.00						
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata																
		Studi Kelayakan/Fs Rsup	Studi Kelayakan/Fs Rsup					100	1,050,000,000	0	953,999,467	-	90.86	-	953,999,467	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
		Persiapan Pembangunan Rumah Sakit Umum						100	1,500,000,000	20	209,491,650	20.00						
		Orientasi Lapangan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO)						100	123,200,000	0	-							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita																
		Pelatihan manajemen BBLR bagi nakes	"Terlaksananya pelatihan manajemen BBLR bagi nakes"	100	591,163,650	100	155,151,150				-	-	-	100	155,151,150	50.00	26.25	Dinas Kesehatan
		Pertemuan Pengembangan Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS	Terlaksananya Pertemuan Pengembangan Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS 14 Kab/kota	100	568,994,650													Dinas Kesehatan
		Peningkatan Kapasitas R/R Terpadu Bagi Pengelola Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas R/R Terpadu bagi Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Dasar 42 OT	100	953,715,225			100	163,300,000	0	-							Dinas Kesehatan
		Konsultasi Dan Koordinasi Kesehatan Keluarga		100	902,175,000	100	36,060,000	100	37,250,000	0	-	-	-	100	36,060,000	25.00	4.00	Dinas Kesehatan
		Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Keluarga		100	1,170,205,225	100	120,420,950	100	126,150,000	0	-	-	-	100	120,420,950	50.00	10.29	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Konsultasi dan Koordinasi Kesehatan Anak						100	37,450,000	0	-							
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia																
		Pengadaan Peralatan Lanjut Usia	Tersedianya usila kit di posyandu lansia 50 Paket	100	486,012,500	100	49,700,000	100	105,000,000	50	44,568,000	50. 00	42.45	150	94,268,000	75.00	19.40	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Buku Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)						100	50,000,000	100	50,000,000	100 .00						
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak																
		Peningkatan Kapasitas Nakes Puskesmas Dalam Pelaksanaan Antenatal Terpadu + Kelas Ibu Hamil Tk. Kabupaten	"Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Nakes Puskesmas dalam Pelaksanaan Antenatal Terpadu + Kelas Ibu Hamil Tk. Kabupaten	100	874,239,625													Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Orientasi P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi) Bagi Nakes Puskesmas Tk. Kabupaten	Terlaksananya Orientasi P4K (Program Perencanaan dan Penanganan Komplikasi) bagi Nakes Tk. Kabupaten	100	868,216,825													Dinas Kesehatan
		Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi Dan Anak Balita		100	789,170,625	100	77,200,000	100	78,750,000	50	39,240,000	50. 00	49.83	150	116,440,000	75.00	14.75	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Perorangan																
		Bimbingan Akreditasi Ke Rs	"Terlaksananya penilaian RSSI/B di 11 RS"	100	360,309,000	100	52,740,000		105,450,000		-	-	-	100	52,740,000	50.00	14.64	Dinas Kesehatan
		Penilaian RSSI/B se Kalimantan Tengah	"Terlaksananya penilaian RSSI/B di 11 RS"	100	867,321,379	100					-	-	-	100	-	50.00	-	Dinas Kesehatan
		Lomba puskesmas berprestasi	"Terlaksananya Penilaian Puskesmas Berprestasi"	100	3,597,158,200	100	300,047,800	100	293,564,500	0	283,110,500	-	96.44	100	583,158,300	50.00	16.21	Dinas Kesehatan
		Penilaian RS pelayanan prima	Meningkannya pelayanan kesehatan di RS 100	100	3,910,125,706	100	199,995,925	100	241,100,000	0	-	-	-	100	199,995,925	50.00	5.11	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Bimbingan Akreditasi Puskesmas		100	360,309,000	100	52,560,000					-		100	52,560,000	50.00	14.59	
		Pendampingan Kab./Kota oleh Tim Pendamping Provinsi	Terlaksananya Pendampingan Kab./Kota oleh Tim Pendamping Provinsi	100	695,215,000	100	80,920,000	100	150,350,000	0	-	-	-	100	80,920,000	50.00	11.64	Dinas Kesehatan
		Pendampingan Tim Pra Akreditasi Kab./Kota Oleh Tim Pendamping Provinsi		100	1,017,575,000		158,840,000	100	150,350,000	0	-	-	-	-	158,840,000	-	15.61	Dinas Kesehatan
		Implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Melalui Public Savety Center (PSC) 119	Tersediya nya pelayanan kegawat darutan terpadu	100	1,918,713,401	100	495,630,299		-		-	-	-	100	495,630,299	100.0 0	25.83	Dinas Kesehatan
		Bimbingan Teknis Survei Akreditasi Puskesmas		100	367,329,000	100	58,560,000								58,560,000	-	15.94	Dinas Kesehatan
		Bimtek Kesehatan Rujukan						100	200,750,000	20	28,277,000	20. 00	14.09	20	28,277,000	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Monev Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga						100	85,000,000	0	82,950,000	-	97.59	-	82,950,000	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penilaian Puskkesmas Berprestasi							302,600,000		-							
		Pertemuan Koordinasi Rumah Sakit Dalam Penerapan Integrasi Data Rekam Medis						100	139,800,400	0	-							
		Pelatihan Pendampingan Akreditasi fasyankes Tingkat Pertama Bagi Tim Dinkes Kab/Kota						100	180,000,000	0	-							
		Bimtek Implementasi Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu Melalui PSC 119						100	195,250,000	30	51,675,000	30.00						
		Bimtek Pelaksanaan Telemedicine di Rumah Sakit Pengampu dan Wilayah Kerjanya						100	150,540,000	0	-							
		Bimtek dan Monitoring Perencanaan dan Pelaporan Berbasis Elektronik Kab/Kota						100	147,715,000	0	-							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Sumber Daya Manusia Kesehatan																
		Pertemuan koordinasi program pengembangan SDM kesehatan	Terlaksananya pertemuan Koordinasi Program Pengembangan SDM Kesehatan	100	531,935,300	100	94,087,650	100	92,000,000	100	80,005,000	100 .00	86.96	200	174,092,650	100.0 0	32.73	Dinas Kesehatan
		Pelatihan jabatan fungsional bidan	Jumlah orang ang dilatih jabatan fungsional Bidan	100	948,140,200													Dinas Kesehatan
		Konsultasi kewidyaiswaraan tentang kediklatan	Jumlah laporan	100	236,910,000	100	29,220,000	100	62,000,000	0	14,775,850	-	23.83	100	43,995,850	50.00	18.57	Dinas Kesehatan
		Konsultasi dan Koordinasi Program PSDMK Keluar Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke Pusat	100	533,700,000	-	-	100	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Untuk pendampingan dr/drg PTT sampai daerah tujuan	Terlaksananya pendampingan penempatan dr/drg	100	397,800,000	100		100	69,200,000	60	54,915,000	60. 00	79.36	160	54,915,000	80.00	13.80	Dinas Kesehatan
		Penempatan Dokter/Dokter Gigi PTT dan Bidan PTT	jumlah bidan/dr/drg yang menempati tempat tugasnya	100	423,878,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Seleksi berkas program pendidikan dokter spesialis (PPDS)	Mendapatkan dokter yang akan ditingkatkan pendidikannya menjadi dokter spesialis sebanyak 50 orang	100	36,000,000	100	6,500,000	100	6,000,000	0	312,000	-	5.20	100	6,812,000	50.00	18.92	Dinas Kesehatan
		Konsultasi ke pusat	Laporan Hasil Konsultasi dan Koordinasi	100	309,290,000	100	27,840,000	100	115,750,000	0	8,513,750	-	7.36	100	36,353,750	50.00	11.75	Dinas Kesehatan
		Peningkatan SDM Jafung	Terlaksananya penilaian kinerja SDM Jafung	100	64,825,000	-	-	100	12,965,000	0	6,482,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pelatihan Jafung Perawat	Jumlah Orang ang Dilatih jabatan fungsional Perawat	100	788,052,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Sinergisitas program registrasi dan akreditasi	meningkatnya kemampuan dan pemahaman tenaga pengelola program registrasi dan akreditasi	100	309,400,000	-	-	100	64,000,000	20	10,150,000	20.00	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Penilaian nakes teladan	penilaian Nakes teladan sekalteng	100	2,541,104,000	100	591,082,500	100	623,300,000	0	-	-	-	100	591,082,500	50.00	23.26	Dinas Kesehatan
		Insentif PTT Daerah untuk Dokter Umum/Dokter Gigi	Jumlah PTT dokter umum dan Dokter Gigi yang ditempatkan di Prov. Kalteng	100	2,486,840,000	100	414,456,000	100	3,087,156,000	20	326,610,000	20.00	10.58	120	741,066,000	60.00	29.80	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Insentif Bidan PTT Daerah	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil	100	20,878,144,000	100	1,304,884,000	100	1,310,000,000	20	188,105,000	20.00	14.36	120	1,492,989,000	60.00	7.15	Dinas Kesehatan
		Monev Dokter Umum/Dokter Gigi/Bidan PTT Daerah	Terlaksananya Monev Monev Dokter Umum/Dokter Gigi/Bidan PTT Daerah	100	491,900,000	100	80,180,000	100	53,961,000	25	12,420,000	25.00	23.02	125	92,600,000	62.50	18.82	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Jumlah nakes yang ditingkatkan pengetahuan	100	1,067,850,000	100	131,370,000	100	200,770,000	0	-	-	-	100	131,370,000	50.00	12.30	Dinas Kesehatan
		Pelatihan Pendamping Tim Akreditasi Fasilitas Pelayanan Primer	Jumlah Orang ang dilatih ttg Akreditasi Puskesmas	100	1,178,825,900	100		100	202,761,750	0	189,857,600	-	93.64	100	189,857,600	50.00	16.11	Dinas Kesehatan
		Pelatihan Pelayanan Prima Puskesmas	Jumlah Orang ang dilatih ttg pelayanan Prima Puskesmas	100	451,489,200	-	-	100	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pelatihan Membangun Kapasitas SDM Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Membangun kapasitas SDM Kesehatan	100	385,624,150	-	-	100	128,798,800	0	101,590,700	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Akreditasi Institusi Bapelkes	Terakreditasinya Institusi Bapelkes	100	210,931,600	-	-	100	100,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Monitoring Peserta Dokter Internsip	Terlaksananya Monitoring peserta program dokter internsip	100	211,000,000	100		100	38,336,000	20	6,596,000	20. 00	17.21	120	6,596,000	60.00	3.13	Dinas Kesehatan
		Pelatihan Manajemen Puskesmas		100	1,404,266,180	100	248,628,400	100		0				100	248,628,400	50.00	17.71	Dinas Kesehatan
		Konsultasi Psdmk Ke Luar Daerah		100	533,700,000	100	87,500,000	100	86,300,000	15	9,592,250	15. 00	11.12	115	97,092,250	57.50	18.19	Dinas Kesehatan
		Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan		100	800,000,000	100	160,400,000	100	167,802,750	0	162,223,050	-	96.67	100	322,623,050	50.00	40.33	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Dan Pembinaan Sdmk, Organisasi Profesi Dan Jabatan Fungsional		100	689,381,668	100	131,824,000	100	129,000,000	0	-	-	-	100	131,824,000	50.00	19.12	Dinas Kesehatan
		Advokasi Akreditasi Pelatihan						100	70,600,000		-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Pengawasan Institusi Pendidikan Kesehatan						100	24,072,000	100	3,390,000	-	14.08	100	3,390,000	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Evaluasi Pasca Pelatihan							60,000,000		-							
		Survey Kepuasan																



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pelanggan Bapelkes							15,000,000		-							
		Pendampingan dr/dr PTT Samapai Daerah Tujuan							68,800,000		39,460,000							
		Validasi Data Nakes ke Kabupaten/Kota							110,250,000		-							
		Pembinaan Organisasi Profesi							50,000,000		-							
		Monitoring dan Evaluasi Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)						100	36,600,000	55	19,160,000							
		Pelatihan Surveilans Dalam Mendukung Advokasi						100	175,000,000	0	-							
		Pelatihan Fasilitator Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)-Stunting						100	140,000,000	0	-							
		Bimbingan Teknik Laboratorium Lapangan Bapelkes						100	50,000,000	0	-							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
																RPJMD s/d Tahun 2018			
																%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.		
		Pelatihan Deteksi Dini Kanker dan Inspeksi Visual Asam Asetat Pemeriksaan IVA Sadanis						100	135,000,000	0	-								
		Program Penanggulangan Masalah Kesehatan																	
		Manajemen penanggulangan makes	Terlaksananya penanggulangan Ksus KLB penyakit menular maupun keracunan makanan 14 Kab/Kota	100	1,451,853,900	100		100	80,000,000	10	6,670,000	10. 00	8.34	110	6,670,000	55.00	0.46	Dinas Kesehatan	
		Penilaian eliminasi malaria di kabupaten/kota	Didapatnya hasil penilaian eliminasi malaria di kabupaten / kota endemis malaria	100	1,668,543,750	100	-	100	100,000,000	40	39,110,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Penyelidikan epidmiologi (PE) disangka/ KLB, wabah dan bencana secara terpadu	Jumlah lokasi penyelidikan KLB	100	1,453,037,500	100	80,000,000	100	100,000,000		-	-	-	100	80,000,000	50.00	5.51	Dinas Kesehatan	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan OJT Pencatatan Laporan Surveilans Epidemiologi	terlaksanan bimtek	100	1,167,531,250	100	40,000,000	100	100,000,000	25	13,230,000	25. 00	13.23	125	53,230,000	62.50	4.56	Dinas Kesehatan
		Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan (Akibat Bencana)	"Tersedianya barang tenda peleton, masker, APD, perahu karet dan kantong mayat 5 item Tenda, 47.500 Pcs Maskes; 50 APD; 1 bh Perahu Karet; 93 bh Kantong Mayat"	100	1,904,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pembuatan Buletin Epidemiologi	Tersedia 200 eks. Buletin Epidemiologi	100	84,651,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Peralatan PenanggulanganWabah	Tersedia 2 (dua) buah mesin fogging	100	719,518,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Operasional Mesin ULV dan Fogging	tersedianya biaya operasional 1 ULV dan 5 Fogging dalam keadaan siap pakai 1 Mesin ULV 3 Mesin Fogging	100	471,052,500	100	30,040,000	100	35,000,000	100	29,590,000	100 .00	84.54	200	59,630,000	100.0 0	12.66	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Operasional Pos Pelayanan Terpadu Pengobatan Saat Bencna	Tersediaan Honor Petugas, BBM, Spnaduk, Platik sampah dan Vitamin	100	25,000,000	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Media Center Kesehatan	Tersedianya dana Operasional Petugas pada Pos Pelayanan Kesehatan	100	25,000,000	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pemanfaatan Mesin ULV dan Fogging						100	35,000,000	0	-							
		Surpervisi dan Monitoring dalam Rangka Validasi Data UCI Desa dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah						100	81,300,000	10	4,480,000							
		OJT (on Job Training) Manajemen Vaksin						100	49,800,000	0	-							
		Surveilans dan Sosialiasasi Pelaksanaan Imunisasi Dasar dan Lanjutan						100	70,000,000	0	-							
		Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)						100	24,050,000	0	-							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan																
		Monitoring, evaluasi pelaksanaan program	Adanya data hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan di 14 Kab/kota	100	879,859,375	100	123,520,000	100	218,363,700	0	-	-	-	100	123,520,000	50.00	14.04	Dinas Kesehatan
		Rapat kerja bidang kesehatan se Kalimantan Tengah	Adanya kesepakatan antara dinkes prov dengan dinkes kab/kota tentang pelaksanaan program/kegiatan bidang kesehatan 45 orang/angkatan	100	1,892,237,844	100	149,491,000	100	173,889,850	0	-	-	-	100	149,491,000	50.00	7.90	Dinas Kesehatan
		Monitoring dan evaluasi DAK	Jumlah Kab/Kota yang mendapat alokasi dana DAK yang akan dievaluasi	100	472,841,156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi dan monev PM2L	Terlaksananya Sosialisasi kegiatan di Lokasi PM2L 14 kab/kota	100	228,906,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pengendalian, Pelaporan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dak Bidang Kesehatan						100	236,099,975	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Sinkronisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi						100	117,936,750	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Pertemuan Koordinasi Teknis Perencanaan, Data, Evaluasi Bidang Kesehatan						100	175,000,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Manajemen Pengelolaan BOK Provinsi (DAK Non Fisik)						100	78,468,250	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Advokasi Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan						100	392,476,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Koordinasi Pelaksa an Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota						100	127,400,000	0	-							
		Penyuluhan Masyarakat PHBS																
		Pengadaan Peralatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)	"Tersedianya UKS Kit di sekolah 50 PT "	100	55,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Program Kesehatan Haji																



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengiriman vaksin dan buku haji ke Kabupaten/Kota	tersedianya operasional Embarkasi antara Palangka Raya	100	106,202,500	100	10,000,000	100	25,000,000	0	-	-	-	100	10,000,000	50.00	9.42	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji di Embarkasi - Debarkasi Pertemuan Kesehatan Haji Linsek dan Lintas Program	"Terlaksananya pelayanan kesehatan haji di Embarkasi - debarkasi	100	1,740,219,650	100	245,090,000	100	169,219,460	0	-	-	-	100	245,090,000	50.00	14.08	Dinas Kesehatan
		Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji dalam Masa Tunggu (Deteksi Dini Faktor Risiko Jamaah Haji)						100	90,000,000	0	-							
		Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (PTM)																
		OJT Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Berhenti Merokok	terlaksananya OJT Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam upaya berhenti merokok	100	365,506,250	100		100	67,920,000	0	-	-	-	100	-	50.00	-	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Bimtek ke Puskesmas yg menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan atau Napza						100	98,679,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Pendampingan SPM (Penyakit Tidak Menular) dan Kesehatan Jiwa																
		Pertemuan Evaluasi PTM (Penyakit Tidak Menular) dan Kesehatan Jiwa						100	147,316,000	100	141,076,000	-	95.76	100	141,076,000	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Seminar PTM (Penyakit Tidak Menular) dan Kesehatan Jiwa																
		Pengawasan ke Kabupaten dan Kota yang Melaksanakan Kebijakan KTR Pada Tatanan Fasyankes						100	74,450,000		-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Deteksi Dini Penyakit Kanker (Iva Dan Sadanis)						100	149,500,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan
		Deteksi Dini Hipertensi, Jantung, DM						100	160,000,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pertemuan Evaluasi Program PTM							90,256,275		-							
		Pengawasan ke Kabupaten dan Kota yang Melaksanakan Kebijakan KTR Pada Tatanan Sekolah							71,042,000		14,132,000							
		Pelaksanaan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Posbindu dan Fasyankes						100	100,000,000	15	11,729,600							
		Pemeriksaan Faktor Resiko Ca Serviks dan Payudara pada Perempuan Usia 30-50 th						100	189,734,000	40	66,634,500							
		Bimtek ke RS yang Melaksanakan Pelayanan Psikiatri dan atau Napza						100	74,868,000	0	-							
		Pengadaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) KIT						100	100,000,000	0	-							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan																
		Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantau Lingkungan (UPL)	Terlaksananya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantau Lingkungan (UPL) 1 bh buku	100	172,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan UPT Labkesda dan Kalibrasi						100	58,717,325	25	14,540,322							
		Program Kesehatan Lingkungan																
		Pengawasan kualitas air	Terlaksananya pengambilan sampel air di 14 Kab/kota	100	1,172,645,000	100	50,000,000	100	170,790,000	0	-	-	-	100	50,000,000	50.00	4.26	Dinas Kesehatan
		Pendekatan Perubahan Perilaku Melalui STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Didapatnya perubahan perilaku dimasyarakat desa yang melaksanakan STBM 30 desa	100	1,516,900,000	100	71,050,000	100	289,500,000	10	25,860,000	10. 00	8.93	110	96,910,000	55.00	6.39	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Seminar dan Pemilihan Duta STBM se Kalimantan Tengah	Didapatnya Duta STBM Kalteng dan tersosialisasinya program STBM	100	847,250,000	100	100,000,000	100	100,000,000	0	-	-	-	100	100,000,000	50.00	11.80	Dinas Kesehatan
		Pembelajaran Kegiatan Penyehatan Lingkungan	Didapatnya informasi tentang keberhasilan program penyehatan lingkungan	100	553,750,000	100	105,000,000	100	105,000,000	0	-	-	-	100	105,000,000	50.00	18.96	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Kegiatan Penyehatan Lingkungan	Diperolehnya data Penyehatan lingkungan	100	265,506,250	100	50,000,000	100	50,000,000	0	-	-	-	100	50,000,000	50.00	18.83	Dinas Kesehatan
		Pertemuan Lintas Sektor Dalam Pencapaian Universal Akses Sanitasi 2019	Didapatnya komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan sanitasi	100	576,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	0	-	-	-	100	100,000,000	50.00	17.36	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Peralatan Kesehatan dan Bahan Penunjang Laboratorium																
		Pengadaan peralatan kesehatan di BLK	Tersedianya Peralatan Pengujian dan Pendukung Laboratorium di BLK prov. Kalteng	100	6,400,000,000	100	75,250,000	100	737,367,600	0	-	-	-	100	75,250,000	50.00	1.18	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan bahan penunjang laboratorium di BLK	jumlah dan jenis bahan penunjang yang akan diadakan	100	6,465,000,000	100	505,500,000	100	743,400,000	0	735,666,050	-	98.96	100	1,241,166,050	50.00	19.20	Dinas Kesehatan
		Pengadaan bahan kimia di BLK	jumlah dan jenis bahan laboratorium yang akan dibelanjakan	100	4,200,000,000	100	500,200,000	100	1,201,200,000	20	199,494,000	20.00	16.61	120	699,694,000	60.00	16.66	Dinas Kesehatan
		Program Pengujian dan Kalibrasi Peralatan Kesehatan (Sister Lab)																
		Pelatihan teknis tenaga penguji dan tenaga pemeliharaan peralatan kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Tenaga Penguji dan Tenaga Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	100	988,793,375	100	99,450,000	100	40,000,000	0	38,365,000	-	95.91	100	137,815,000	50.00	13.94	Dinas Kesehatan
		Pengadaan kalibrator peralatan kesehatan	Tersedianya Kalibrator Peralatan Kesehatan	100	1,308,085,375	100	72,603,000	100	75,000,000	0	-	-	-	100	72,603,000	50.00	5.55	Dinas Kesehatan
		Pengujian dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengujian dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	100	1,751,941,250	100	275,000,000	100	250,599,099	0	-	-	-	100	275,000,000	50.00	15.70	Dinas Kesehatan
		Informasi Publik dan Dokumentasi																
		Pengembangan dan	tersedianya Aplikasi	100	318,781,563	100		100		0								Dinas



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPd s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		pengelolaan PPID	Untuk input data				50,000,000		338,850,000		-	-	-	100	50,000,000	50.00	15.68	Kesehatan
		Pengelolaan perpustakaan dan arsiparis	Jumlah Buku dan Dokumen untuk Perpustakaan	100	168,090,781	100	7,000,000	100	20,500,000	0	-	-	-	100	7,000,000	50.00	4.16	Dinas Kesehatan
		Penyusunan Buku Profil Kesehatan		100	1,152,531,250	100	75,000,000	100	161,825,000	5	6,650,000	5.00	4.11	105	81,650,000	52.50	7.08	Dinas Kesehatan
		Program Pengawasan, Pembinaan Pengendalian Kesehatan Makanan																
		Pertemuan Evaluasi Program TPM (Tempat Pengolahan Makanan) se-Kalteng	"Terevaluasinya program PTM dan Komitmen Lintas Sektor terkait"	100	1,558,543,750	-	-	-	120,605,000	-	23,650,000.00	-	-	-	23,650,000	-	1.52	Dinas Kesehatan
		Pengawasan Tempat Pengolahan TPM						100	80,000,000	0	-	-	-	-	-	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
		Penguatan Program Hsp Lp/Ls Se Kalteng		100	739,620,000	100	53,245,000	100	54,000,000	0	51,529,700	-	95.43	100	104,774,700	50.00	14.17	Dinas Kesehatan
		Program Pembiayaan Kesehatan																



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Monitoring Dalam Rangka Pemetaan Pembiayaan Kesehatan	Meminimalisir Kesalahan Program Pembiayaan Kesehatan di Kab/Kota /Rumah Sakit	100	1,545,820,000	100	54,760,000	100	54,760,000	0		-	-	100	54,760,000	50.00	3.54	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan																
		Monev Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan di Kab./Kota	Persentase (%) Kesesuaian obat untuk Fasilitas kesehatan Kab/Kota sesuai dengan Formularium Nasional dalam JKN ke 14 kab/kota	100	649,650,000	-	-	100	90,954,500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Instalasi Farmasi dan Gudang Vaksin	Persentase (%) Kesesuaian obat untuk Fasilitas kesehatan Kab/Kota sesuai dengan Formularium Nasional dalam JKN ke 14 kab/kota	100	321,132,000	100	18,700,000	100	40,000,000	0	-	-	-	100	18,700,000	50.00	5.82	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke Pusat	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	100	208,000,000	100	30,000,000	100	49,750,060	0	-	-	-	100	30,000,000	50.00	14.42	Dinas Kesehatan
		Pemusnahan Obat Dan Bhp		100	270,000,000	100	50,000,000	100	43,899,600	0	45,624,100	-	103.9 3	100	95,624,100	50.00	35.42	Dinas Kesehatan
		Distribusi Obat dan Vaksin ke Kabupaten/Kota							50,000,000		-							
		Program Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian																
		Pengembangan Kebun Partisi Tanaman Obat	Terlaksananya penataan lahan kebun partisi 1 Paket dan distribusi kefarmasian dan atau makanan	5	615,000,000	-	-	100	-	0	-	-	-	-	-		-	Dinas Kesehatan
		Pengolahan Tanaman Tradisional Menjadi Jamu Skala Laboratorium	Pembuatan produk jamu dari tanaman tradisional	15	254,775,000	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
%																		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan Kebun Percontohan dan Kebun Partisi	Pemeliharaan kebun percontohan dan kebun	72	1,410,000,000	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pembangunan P4TO,PED, Laboraturium Mutu Bahan Baku dan Produk Obat Tradisional	Jumlah Bangunan P4TO, Bangunan PED, Bangunan Laboratorium Jaminan Mutu yang di bangun		2,490,000,000	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pembangunan kawasan pusat pengembangan tanaman obat		5	17,200,000,000	1	1,896,970,000	100	1,252,975,000	5	1,159,791,800	5.00	92.56	6	3,056,761,800	120.00	17.77	Dinas Kesehatan
		Pengumpulan Tanaman Berkhasiat ObatUntuk Pengembangan	Pengumpulan Tanaman tradisional khas kalimantan tengah untuk dibudidayakan di kebun partisi sebanyak	232	320,000,000	-	-	100	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Monev Makanan, Jajanan Anak Sekolah, Kosmetik di Kab./Kota	Jumlah fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian dan atau makanan dalam rangka pengawasan	148	400,000,000	29	52,760,000	100	80,000,000	20	13,480,000	20.00	16.85	49	66,240,000	33.11	16.56	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeriksaan Sampel Makanan, Jajanan Anak Sekolah, Kosmetik di Kab./Kota	Jumlah fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian dan atau makanan dalam rangka pengawasan	133	370,000,000	100	59,050,000		-		-	-	-	100	59,050,000	75.19	15.96	Dinas Kesehatan
		Koordinasi Peningkatan Distribusi Kefarmasian Ke Kementrian Kesehatan Dan Balai Penelitian Dan Pengembangan		100	501,012,500	100	70,000,000	100	72,020,000	10	7,342,000	10.00	10.19	110	77,342,000	55.00	15.44	Dinas Kesehatan
		Koordinasi Lintas Sektor Terkait Pengembangan Obat Asli Indonesia		100	394,810,000	100	35,000,000	100	82,620,000	0	-	-	-	100	35,000,000	50.00	8.87	Dinas Kesehatan
		On Job Training Sistem Informasi Pelaporan Narkotika Dan Psikotropika		100	414,422,344	100	74,420,000	100	94,650,000	0	-	-	-	100	74,420,000	50.00	17.96	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Kawasan Pusat Pengembangan Tanaman Obat							1,480,000,000		2,700,000							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
%																		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengumpulan Tanaman Berkhasiat Obat untuk Pengembangan							75,000,000		13,780,000							
		Program Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Serta Peralatan Kesehatan																
		Monitoring Sarana, Perizinan dan Peralatan Kesehatan	Terlaksananya Monitoring sarana, perizinan dan peralatan kesehatan	645	1,026,421,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta Peralatan Kesehatan ke Pusat	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta Peralatan Kesehatan ke Pusat	44	866,721,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Pertemuan Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Bina Jamsarkes	Tercapainya koordinasi evaluasi dan perencanaan program Jamsarkes	170	244,178,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bina Jamsarkes	Tercapainya koordinas pelaksanaan program Jamsarkes	170	244,328,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Program Jaminan Kesehatan																
		Konsultasi ke Pusat Dengan PPJK Kemenkes	Terjadinya koordinasi program pusat dan daerah	50	505,690,000			100	50,400,000	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Monitoring Jaminan Kesehatan ke Kab./Kota	Termonitornya program jamkes di kab/kota/ Rumah Sakit/ Puskesmas	218	1,582,220,000	36	80,368,000	100	92,400,000	10	6,770,000	10.00	7.33	46	87,138,000	21.10	5.51	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Kartu Kalteng Berkah	Terkelolanya Kartu Kalteng Berkah	6	2,336,080,000	1	94,700,000	100		0				1	94,700,000	16.67	4.05	Dinas Kesehatan
		Premi Kartu Kalteng Berkah	Terbayarnya premi KKB	190283	50,705,512,000	14282	2,299,402,000	100	25,000,080,000	0	-	-	-	14,282	2,299,402,000	7.51	4.53	Dinas Kesehatan
		Rapat Tim Koordinasi Jamkes Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor	156	528,726,000	26	26,330,000	100	85,700,000	0	80,098,000	-	93.46	26	106,428,000	16.67	20.13	Dinas Kesehatan
		Rapat Lintas Sektor dalam Rangka UHC						100	101,725,000	0	-							
		Pertemuan Monev JKN dalam Rangka UHC						100	105,060,000	0	-							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB			
																RPJMD s/d Tahun 2018					
																%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12			
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.				
		Program Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan																			
		Monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas	Jumlah fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian dan atau makanan dalam rangka pengawasan	154	378,776,300	15	49,600,000	100	121,502,000	15	16,880,000	15. 00	13.89	30	66,480,000	19.48	17.55	Dinas Kesehatan			
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja																			
		Peningkatan Kapasitas Puskesmas Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKPR)	Terlaksananya pelayanan remaja di Puskesmas 70 org	56	490,876,225				99,750,000									Dinas Kesehatan			
		Pertemuan Pengelola Program Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu Dan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin		406	1,200,000,000	100	192,638,300				-	-	-	100	192,638,300	24.63	16.05	Dinas Kesehatan			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
																RPJMD s/d Tahun 2018			
																%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.		
		Pertemuan Penguatan Pelayanan Teknis dan Manajemen Kesehatan Reproduksi						100	116,225,000	0	-	-	-	-	-	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan	
		Orientasi Fasilitator Kelas Ibu						100	114,281,750	0	105,111,750	-	91.98	-	105,111,750	100.0 0	100.0 0	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan KIT Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin						100	30,000,000	100	30,000,000	100 .00	100.0 0						
		Program Pengembangan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak																	
		Bintek penjangiran anak usia sekolah	"Meningkatnya pelayanan kesehatan anak usia sekolah" 14 kab/Kota"	170	1,280,764,145													Dinas Kesehatan	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Bimtek dalam penanganan gangguan tumbuh kembang	"Terlaksananya Bimteks penanganan tumbuh kembang mengalami gangguan di Pusk.yang banyak mengalami tumbuh kembang"	183	1,308,146,145	-	-	100	77,840,000	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Monitoring Evaluasi Penjaringan Anak Usia Sekolah		220	719,068,750	44	119,140,000							44	119,140,000	20.00	16.57	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga																
		Pendampingan Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Anak Sekolah						100	17,800,000	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		Pendampingan Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji						100	56,996,000	40	20,430,000	40.00	35.84	40	20,430,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		Penilaian Mitra Bhakti Husada Tingkat Provinsi						100	21,000,000	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		Kesehatan Muhibah Borneo (Sukan Borneo)						100	257,000,000	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)																
		Pangan																
		Dinas Ketahanan Pangan																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Jumlah Pagu Dana Belanja Pemeliharaan dengan pagu dana SKPD tahun berjalan		7,599,600,00 0		1,226,727,15 9		1,560,600,000		167,355,742		190		1,394,082,9 01		18	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat- menyurat kantor tahun berjalan	6000	90,000,000	1209	18,130,500	1000	20,000,000	438	7,932,500	44	40	164 6	26,063,000	27	29	DKP Provinsi
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang dibayar tahun berjalan	36	1,080,000,000	4	119,925,151	6	220,000,000	1	28,196,542	24	13	5	148,121,693	15	14	DKP Provinsi
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	30	60,000,000	4	8,635,000	5	5,000,000	0	-	0	-	4	8,635,000	14	14	DKP Provinsi
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah gedung milik kantor yg terjamin	18	42,000,000	1	3,273,642	3	4,000,000	0	-	0	-	1	3,273,642	8	8	DKP Provinsi
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pembayaran pajak kendaraan Dinas R2 dan R4 yg terbayar	180	84,000,000	13	6,112,000	30	10,000,000	13	2,611,700	43	26	26	8,723,700	14	10	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga jasa admisnitrasi keuangan tahun berjalan	72	1,533,600,000	11	239,175,125		369,600,000	0	22,367,000		6	11	261,542,125	16	17	DKP Provinsi
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor tahun berjalan	72	1,710,000,000	12	288,514,590	12	309,000,000	2	43,826,000	15	14	14	332,340,590	19	19	DKP Provinsi
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja kantor tahun berjalan	30	240,000,000	2	19,838,000	5	25,000,000	0	-	0	-	2	19,838,000	8	8	DKP Provinsi
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah unit Alat Tulis Kantor tahun berjalan	150	210,000,000	17	24,180,000	30	20,000,000	5	4,000,000	17	20	22	28,180,000	15	13	DKP Provinsi
		Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Jumlah unit Cetak dan Penggandaan keperluan kantor tahun berjalan	60	150,000,000	10	24,920,000	10	25,000,000	4	9,000,000	36	36	14	33,920,000	23	23	DKP Provinsi
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah unit Komponen listrik penerangan	30	150,000,000	3	12,745,000	6	25,000,000	0	-	0	-	3	12,745,000	8	8	DKP Provinsi
		penyedia peralatan rumah tangga			-		-		8,000,000		-		-	0	-			DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah unit langganan harian surat kabar dan Jumlah buku tahun berjalan	5	240,000,000	1	29,760,000	4	40,000,000	1	6,540,000	22	16	1	36,300,000	30	15	DKP Provinsi
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi,Pelatiha n, pd Luar daerah tahun berjalan	132	1,110,000,000	20	169,998,550	22	220,000,000	3	24,000,000	14	11	23	193,998,550	18	17	DKP Provinsi
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi,Pelatiha n, dll, pd dalam daerah tahun berjalan	204	810,000,000	66	261,519,601	34	250,000,000	2	18,882,000	7	8	68	280,401,601	33	35	DKP Provinsi
		Rujukan Berobat PNS	Jumlah PNS yg menerima bantuan biaya kesehatan untuk berobat	18	90,000,000	0	-	2	10,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	DKP Provinsi
		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Jumlah Pagu Dana Belanja Modal dengan pagu dana SKPD tahun berjalan		3,110,475,000		1,092,499,914		4,375,000,000		276,107,200		5,055		1,368,607,114		44	
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1	230,475,000	1	228,825,000	2	600,000,000	1	-	50	-	2	228,825,000	199	99	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor tahun berjalan	30	180,000,000	5	32,180,000	4	15,000,000	0	5,580,000	0	37	5	37,760,000	18	21	DKP Provinsi
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor tahun berjalan	30	450,000,000	15	224,812,500	6	80,000,000	2	81,700,000	36	102	17	306,512,500	57	68	DKP Provinsi
		Pembangunan pagar dan tempat parkir	Jumlah pembangunan tempat Parkir, pagar tahun berjalan	6	720,000,000	1	120,000,000				-			1	120,000,000	17	17	DKP Provinsi
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Rumah Dinas	6	600,000,000	4	402,826,500	2	3,500,000,000		-	0	-	4	402,826,500	67	67	DKP Provinsi
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah pemeliharaan gedung Kantor	6	390,000,000	1	42,773,597	1	70,000,000	4	185,000,000	433	264	5	227,773,597	83	58	DKP Provinsi
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	18	240,000,000	1	16,497,317	8	80,000,000	2	3,827,200	23	5	3	20,324,517	17	8	DKP Provinsi
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R2,R4	36	150,000,000	5	18,890,000	7	15,000,000	0	-	0	-	5	18,890,000	13	13	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah Pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	30	150,000,000	1	5,695,000	5	15,000,000	0	-	0	-	1	5,695,000	4	4	DKP Provinsi
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Jumlah Aparatur PNS dengan Jumlah Pakaian Dinas yg dibagi		72,000,000		6,800,000		85,200,000		38,300,000		3,06 6		45,100,000		63	
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian olahraga	72	36,000,000	14	6,800,000	80	42,600,000	0	31,500,000	0	74	14	38,300,000	19	106	DKP Provinsi
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	72	36,000,000	0	-	60	42,600,000		6,800,000	0	16	0	6,800,000	0	19	DKP Provinsi
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Jumlah Aparur yang mengikuti pelatihan dengan jumlah Apartur SKPD		240,000,000		9,413,708		15,000,000		-		1,49 1		9,413,708		4	
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yg Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	18	240,000,000	1	9,413,708	2	15,000,000	0	-	0	-	1	9,413,708	4	4	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah Realisasi Anggaran dengan jumlah pagu anggaran belanja SKPD		300,000,000		50,040,000		81,000,000		-		809		50,040,000		17	
		Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah realisasi Indikator Kinerja SKPD yang mencapai sasaran	12	150,000,000	2	27,562,000	2	50,000,000	0	-	0	-	2	27,562,000	18	18	DKP Provinsi
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Realisasi Keuangan semeter I SKPD	6	30,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000	0	-	0	-	1	5,000,000	17	17	DKP Provinsi
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Realisasi Keuangan SKPD	6	120,000,000	1	17,478,000	1	25,000,000	0	-	0	-	1	17,478,000	15	15	DKP Provinsi
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase jumlah Unit Aset yg di pakai dengan jumlah unit aset yg tersedi di SKPD		266,400,000		26,568,000		40,000,000		-		413		26,568,000		10	
		Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah Inventaris Barang Milik Daerah	0	266,400,000	0	26,568,000	1	40,000,000	0	-	0	-	0	26,568,000		10	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan	Persentase Jumlah Lumbung Pangan dengan Jumlah Desa yang ada		1,860,000,00 0		237,121,072		270,000,000		3,278,000		262		240,399,07 2		13	
		Pengembangan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Segar dan Olahan	Jumlah fisik lumbung pangan desa yang terbangun	108	300,000,000	13	36,414,572	25	50,000,000	2	-	8	-	15	36,414,572	14	12	DKP Provinsi
		Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah kelompok lumbung yang mandiri di kab/kota	6	420,000,000	1	47,381,500	3	50,000,000	0	1,350,000	3	3	1	48,731,500	13	12	DKP Provinsi
		Sosialisasi Keamanan Pangan pada Anak SD/MI	Jumlah pembinaan kelompok lembaga distribusi pangan (LDPM)	12	300,000,000	2	48,665,000	100	50,000,000	2	1,183,000	2	2	4	49,848,000	36	17	DKP Provinsi
		Pengembangan Sarana dan Prasarana laboraturium Keamanan Pangan Segar	Jumlah cadangan pangan provinsi dan pembinaan cadangan pangan pemerintah provinsi	24	240,000,000	4	38,315,000	5	40,000,000	0	745,000	2	2	4	39,060,000	16	16	DKP Provinsi
		Pelatihan/Workshop Pengambilan Sampel dan Analisis Keamanan Pangan Segar	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	0	360,000,000	0	31,705,000	40	40,000,000		-	0	-	0	31,705,000		9	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Promosi dan Publikasi Keamanan Pangan Segar	Jumlah promosi dan publikasi keamanan pangan segar	0	240,000,000	0	34,640,000	5	40,000,000		-	0	-	0	34,640,000		14	DKP Provinsi
		Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan jumlah Kelompok wanita tani yg pemanfaatan pekarangan		1,950,000,00 0		204,808,000		271,000,000		5,140,000		127		209,948,00 0		11	
		Pengembangan Protein Pangan Hewan di Lokasi Demapan	Jumlah Pengembangan Protein Pangan Hewan di Lokasi Demapan	12	270,000,000	2	38,063,000	2	30,000,000	0	5,140,000	14	17	2	43,203,000	16	16	DKP Provinsi
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah pengembangan desa mandiri pangan	6	150,000,000	1	22,749,000	1	50,000,000	0	-	0	-	1	22,749,000	15	15	DKP Provinsi
		Analisis dan Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)	Jumlah Laporan Analisis dan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA)	6	330,000,000	1	36,131,000	1	40,000,000		-	0	-	1	36,131,000	11	11	DKP Provinsi
		Analisis dan Penyusunan Peta Situasi Pangan dan Gizi	Jumlah Laporan Analisis dan Peta Situasi Pangan dan Gizi (SKPG)	6	330,000,000	1	54,888,000	1	69,000,000		-	0	-	1	54,888,000	17	17	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Indentifikasi, Investigasi dan Pemantauan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	6	210,000,000	1	28,999,500	1	36,000,000		-	0	-	1	28,999,500	14	14	DKP Provinsi
		Pembinaan Demapan Tahun 2006 - 2012	Jumlah Pembinaan Desa mandiri pangan Tahun 2006-2012	120	660,000,000	4	23,977,500	20	46,000,000		-	0	-	4	23,977,500	4	4	DKP Provinsi
		Program Good Governance	Persentase pertumbuhan produksi pangan daerah		5,538,000,00 0		592,548,385		855,000,000		-		110		592,548,38 5		11	
		Kelembagaan DKP Provinsi	Jumlah rapat koordinasi dewan ketahanan pangan tahun berjalan	36	1,200,000,000	3	108,470,017	6	235,000,000	0	-	0	-	3	108,470,017	9	9	DKP Provinsi
		Penyusunan program dan kegiatan	jumlah dokumen program dan kegiatan tahun berjalan	12	840,000,000	3	185,835,204	2	210,000,000		-	0	-	3	185,835,204	22	22	DKP Provinsi
		Penyusunan data base ketahanan pangan	Jumlah Laporan data Base tahun berjalan	6	300,000,000	1	41,437,000	1	60,000,000		-	0	-	1	41,437,000	14	14	DKP Provinsi
		Evaluasi dan monitoring	Jumlah Laporan Evaluasi Badan tahun berjalan	6	390,000,000	1	64,289,300	1	100,000,000		-	0	-	1	64,289,300	16	16	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Satlak SPI dan SPM Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Petunjuk kegiatan tahun berjalan	12	108,000,000	2	18,140,000	2	30,000,000		-	0	-	2	18,140,000	17	17	DKP Provinsi
		Rapat kerja teknis ketahanan pangan	Jumlah peserta Rapat Teknis yang hadir	240	660,000,000	42	114,350,428	70	150,000,000		-	0	-	42	114,350,428	17	17	DKP Provinsi
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian	Jumlah laporan mengikuti musrenbangtan	6	2,040,000,000	0	60,026,436	1	70,000,000		-	0	-	0	60,026,436	3	3	DKP Provinsi
		Program pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat	Persentase Jumlah sampel pangan yg terindikasi dengan jumlah sampel pangan yg diambil		780,000,000		297,354,925		328,700,000		9,617,572		68		306,972,49 7		39	
		Pembinaan dan Kemandirian Lumbung Pangan	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	60	300,000,000	8	38,999,000	12	90,000,000	3	8,185,572	21	9	10	47,184,572	17	16	DKP Provinsi
		Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	54	180,000,000	27	89,995,000	9	30,000,000	0	1,432,000	2	5	27	91,427,000	50	51	DKP Provinsi
		Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan pangan pemerintah provinsi	1500 0	300,000,000	8418	168,360,925	2500	208,700,000	0	-	0	-	841 8	168,360,925	56	56	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program ketahanan pangan dan gizi keluarga	Persentase Jumlah desa ditangani sesuai yg berlaku dengn desa terindikasi rawan/Kerentanan Pangan		1,080,000,000		166,338,000		140,000,000		968,000		27		167,306,000		15	
		Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga	jumlah Kelompok Wanita Pemanfaat lahan pekarangan dan kebun percontohan	24	720,000,000	4	129,228,000	3	100,000,000	0	968,000	1	1	4	130,196,000	18	18	DKP Provinsi
		Sosialisasi Diversifikasi Pangan bagi Ibu-Ibu Kelompok Tani, PKK	Jumlah peserta sosialisasi diversifikasi pangan (ibu-ibu kelompk tani/PKK)	180	360,000,000	19	37,110,000	30	40,000,000	0	-							DKP Provinsi
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kalteng Besuh	Persentase Jumlah Kegiatan pd RKPD dengan jumlah kegiatan pada DPA-SKPD tahun berjalan		540,000,000		292,571,300			0	-		17		292,571,300		54	
		Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah	jumlah Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah	18	540,000,000	10	292,571,300	1	425,000,000	0	-	0	-	10	292,571,300	54	54	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebuna n	Persentase Jumlah Kelompok tani yg mengikuti petihan dengan jumlah kelompok tani		3,060,000,00 0		1,001,275,40 2		500,000,000		-		9		1,001,275,4 02		33	
		Penyiapan dan penetapan sasaran produksi pangan daerah (TPH, Perkebunan, Pernakan dan Perikanan)	Jumlah dokumen Penetapan Sasaran Produksi Pangan daerah (TPH,Bun,Nak, Ikan)	6	240,000,000	1	34,279,000	1	35,000,000	80	-	800 0	-	81	34,279,000	1348	14	DKP Provinsi
		Pemantauan dan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	jumlah Dokumen Laporan pemantaun Analisis Tren Harga Pangan Pokok	6	240,000,000	1	54,375,000	1	65,000,000	0	-	0	-	1	54,375,000	23	23	DKP Provinsi
		Lomba Cipta Menu 3 B Tingkat Provinsi/Nasional	Jumlah pemenang Lomba Cipta Menu 3B Tingkat Prov/Nasional	42	840,000,000	31	620,942,804	9	140,000,000		-	0	-	31	620,942,804	74	74	DKP Provinsi
		Promosi Percepatan Diversifikasi Pangan Masyarakat / P2KP	Jumlah Kegiatan Promosi Diversifikasi Pangan Masyarakat/P2KP	6	420,000,000	1	36,623,898	1	40,000,000		-	0	-	1	36,623,898	9	9	DKP Provinsi
		Analisis Pola Pangan Harapan	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan	6	390,000,000	0	24,160,000	1	25,000,000		-	0	-	0	24,160,000	6	6	DKP Provinsi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
			Harapan															
		Pemantauan dan Analisis akses Pangan	Jumlah Dokumen pemantuan Analisis Akses Pangan	6	240,000,000	2	62,200,000	1	65,000,000		-	0	-	2	62,200,000	26	26	DKP Provinsi
		Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan	jumlah Dokumen Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan	6	210,000,000	2	76,220,000	1	25,000,000		-	0	-	2	76,220,000	36	36	DKP Provinsi
		Pembinaan dan Pemantauan distribusi Pangan	jumlah daerah Pembinaan dan Pemantuan distribusi pangan	6	240,000,000	2	63,974,700	1	75,000,000		-	0	-	2	63,974,700	27	27	DKP Provinsi
		Analisis Ketersediaan Pangan Pokok	jumlah Dokumen laporan Analisis Ketersedian Pangan Pokok	6	240,000,000	1	28,500,000	1	30,000,000		-	0	-	1	28,500,000	12	12	DKP Provinsi
		Pelatihan Analisis Pola Konsumsi Pangan					-							0	-			
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Jumlah Ketersedian Pangan Pokok (padi) dengan jumlah penduduk		350,000,000		34,279,000		70,000,000		3,060,000		4		37,339,000		11	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI)	Meningkatkan stabilitasi harga pangan	5	350,000,000	0	34,279,000	5	70,000,000	0	3,060,000	9	4	1	37,339,000	19	11	DKP Provinsi
		Urusan Pilihan																
		Bidang Urusan Kehutanan																
		Dinas Kehutanan																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	16	15,035,227,000.00	16	7,570,255,646	16	8,371,280,000.00	11	1,005,410,275.00	0.69	0.12	27	8,575,665,921	168.75	57.04	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	12,000	90,000,000.00	5,988	69,528,000	8,000	88,000,000.00	1,013	9,738,500.00	0.13	0.11	7,001	79,266,500	58.34	88.07	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran tenaga air,listrik dan telekomunikasi	18	2,630,000,000.00	2	691,377,678	4	1,097,709,000.00	0	124,054,390.00	0.12	0.11	2	815,432,068	13.24	31.01	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	726	454,000,000.00	500	163,830,000	100	65,000,000.00	28	17,350,000.00	0.28	0.27	528	181,180,000	72.73	39.91	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang diasuransikan	66	120,000,000.0 0	6	10,782,668	30	100,000,000.00	-	0.00	-	-	6	10,782,668	9.73	8.99	Dinas Kehutanan
		Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perpanjangan STNK dan Jasa KIR	52	770,000,000.0 0	44	895,457,968	50	1,059,571,000.0 0	5	98,560,670.00	0.1 0	0.09	48	994,018,63 8	93.24	129.0 9	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honorarium	2,44 8	4,708,852,000. 00	1,212	1,234,491,450	1,212	1,410,000,000.0 0	194	220,480,900.00	0.1 6	0.16	1,4 06	1,454,972,3 50	57.43	30.90	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis sarana pendukung kebersihan kantor	12	790,000,000.0 0	2	590,213,475	2	700,000,000.00	0	50,744,000.00	0.0 8	0.07	2	640,957,47 5	17.95	81.13	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah mesin pemotong rumput yang memerlukan service	30	36,000,000.00	5	6,000,000	5	6,000,000.00	-	0.00	-	-	5	6,000,000	16.67	16.67	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang diperlukan	179	390,000,000.0 0	28	652,306,515	28	690,000,000.00	4	108,191,500.00	0.1 6	0.16	32	760,498,01 5	18.15	195.0 0	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	49	400,000,000.0 0	8	394,707,250	8	300,000,000.00	1	32,420,500.00	0.1 2	0.11	9	427,127,75 0	18.23	106.7 8	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	37	162,000,000.00	5.43	126,401,000	6	125,000,000.00	0.60	11,490,000.00	0.10	0.09	6	137,891,000	16.30	85.12	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran	103,632	600,000,000.00	24,828	83,110,000	40,000	100,000,000.00	800	1,285,000.00	0.02	0.01	25,628	84,395,000	24.73	14.07	Dinas Kehutanan
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat yang diadakan	1,250	84,375,000.00	250	16,875,000	250	20,000,000.00	49	3,250,000.00	0.20	0.16	299	20,125,000	23.95	23.85	Dinas Kehutanan
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dan luar negeri	420	2,750,000,000.00	155	1,084,475,487	194	1,420,000,000.00	18	126,474,815.00	0.09	0.09	173	1,210,950,302	41.13	44.03	Dinas Kehutanan
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah	360	900,000,000.00	374	1,550,699,155	374	1,160,000,000.00	67	201,370,000.00	0.18	0.17	441	1,752,069,155	122.41	194.67	Dinas Kehutanan
		Rujukan berobat PNS	Jumlah pegawai yang memerlukan rujukan berobat ke luar daerah	30	150,000,000.00	-	-	5	30,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	15	6,817,060,00 0.00	14	5,393,321,17 0	15	12,033,334,661 .20	5	472,494,600.0 0	0.3 3	0.04	19	5,865,815,7 70	126.6 7	86.05	Dinas Kehutanan
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor RPH dan UPT-KPH yang di bangun	6	3,317,000,000. 00	6	3,280,300,000	14	9,172,334,661.2 0	1	343,500,000.00	0.0 4	0.04	7	3,623,800,0 00	108.9 4	109.2 5	Dinas Kehutanan
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	30	2,100,000,000. 00	22	108,230,000	20	500,000,000.00	0	4,500,000.00	0.0 1	0.01	22	112,730,00 0	73.93	5.37	Dinas Kehutanan
		Pembangunan Pagar dan Tempat Parkir	Jumlah Pagar dan Tempat Parkir yang di Bangun (pagar panjang 92 M dan Tempat Pakir 110,4 M2)	1	180,000,000.0 0	-	-	1	180,000,000.00	0	1,500,000.00	0.0 1	0.01	0	1,500,000	0.83	0.83	Dinas Kehutanan
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	6	162,020,000.0 0	1	19,995,000	1	30,000,000.00	0	1,480,000.00	0.0 5	0.05	1	21,475,000	12.21	13.25	Dinas Kehutanan
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6	225,040,000.0 0	20	463,446,000	20	550,000,000.00	1	15,050,000.00	0.0 3	0.03	21	478,496,00 0	343.3 3	212.6 3	Dinas Kehutanan
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara	32	345,000,000.0 0	17	134,384,500	29	250,000,000.00	5	37,984,600.00	0.1 6	0.15	22	172,369,10 0	67.94	49.96	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6	30,000,000.00	1	5,000,000	1	5,000,000.00	-	0.00	-	-	1	5,000,000	16.67	16.67	Dinas Kehutanan
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	385	150,000,000.00	1	59,800,000	19	156,000,000.00	-	0.00	-	-	1	59,800,000	0.26	39.87	Dinas Kehutanan
		Pemeliharaan Rutin Berkala Mess KKMA Palangka Raya	Luas Gedung Asrama Mess KKMA yang di pelihara	85	350,000,000.00	2	28,222,570	2	50,000,000.00	0	7,980,000.00	0.16	0.16	2	36,202,570	2.73	10.34	Dinas Kehutanan
		Pemeliharaan Taman dan Halaman	Jumlah Kantor yang dipelihara tanaan/halaman	1	50,000,000.00	1	48,300,000	1	110,000,000.00	0	1,500,000.00	0.01	0.01	1	49,800,000	101.36	99.60	Dinas Kehutanan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalteng	Luas Kamar Mandi/WC Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalteng yang di Rehabilitasi	112	380,000,000.00	462	233,900,000	20	145,000,000.00	0	1,500,000.00	0.01	0.01	462	235,400,000	412.68	61.95	Dinas Kehutanan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi pada Plafon Kantor dan Penyediaan Ruangan bagi Perokok	174	340,000,000.00	1,250	196,100,000	174	340,000,000.00	12	22,500,000.00	0.07	0.07	1,262	218,600,000	725.15	64.29	Dinas Kehutanan
		Sewa Rumah/Gedung/Guda ng/Parkir	Tersedianya sarana Kantor untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan	70	1,750,000,000.00	2	47,500,000	2	60,000,000.00	0	7,500,000.00	0.14	0.13	2	55,000,000	3.26	3.14	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Rehabilitasi Atap Kantor Dishut	Luas Atap Kantor Dinas Kehutanan yang direhabilitasi	1,070	700,000,000.00	1	737,593,100	450	430,000,000.00	28	26,000,000.00	0.06	0.06	29	763,593,100	2.73	109.08	Dinas Kehutanan
		Rehabilitasi /Perbaikan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabiitasi untuk penyediaan ruangan literasi	10	55,000,000.00	48	30,550,000	10	55,000,000.00	0	1,500,000.00	0.03	0.03	48	32,050,000	482.73	58.27	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional	2	395,000,000.00	2	-	2	397,770,000.00	-	0.00	-	-	2	-	100.00	-	Dinas Kehutanan
		Pegadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Olah Raga	340	235,000,000.00	-	-	714	126,450,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
		Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Batik Tradisional	340	160,000,000.00	-	-	714	271,320,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terfasilitasinya pegawai yang pindah dan purna tugas	1	60,000,000.00	1	-	1	10,000,000.00	-	0.00	-	-	1	-	100.00	-	Dinas Kehutanan
		Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Prosentase pegawai yang tewas dalam tugas	12	60,000,000.00	-	-	2	10,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur dalam peningkatan kapasitas sumber daya	3	614,110,000. 00	2	40,619,796	3	230,000,000.00	-	0.00	-	-	2	40,619,796	66.67	6.61	Dinas Kehutanan
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur	28	144,110,000.0 0	5	18,963,569	10	50,000,000.00	-	0.00	-	-	5	18,963,569	17.86	13.16	Dinas Kehutanan
		Penilaian Angka Kredit Fungsional Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Provinsi Kalimantan Tengah	100	120,000,000.0 0	-	-	100	120,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
		Studi Lapangan di Dalam Negeri	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mendampingi anggota Legislatif	90	350,000,000.0 0	7	21,656,227	15	60,000,000.00	-	0.00	-	-	7	21,656,227	7.50	6.19	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan penyediaan laporan caapaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi yang akurat	2	94,000,000.0 0	2	253,525,781	2	344,000,000.00	1	57,920,000.00	0.5 0	0.17	3	311,445,78 1	150.0 0	331.3 3	Dinas Kehutanan
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	30	600,000,000.0 0	5	253,525,781	5	250,000,000.00	1	57,920,000.00	0.2 5	0.23	6	311,445,78 1	20.84	51.91	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyusunan Analisa Jabatan	Jumlah dokumen Analisa Jabatan	19	94,000,000.00	5	253,525,781	19	94,000,000.00	-	0.00	-	-	5	253,525,781	26.32	269.71	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset /Barang Daerah	Meningkatkan penyediaan Laporan Barang Milik Daerah yang akurat, terkendali	1	360,000,000.00	1	279,374,500	1	200,000,000.00	1	23,160,000.00	1.00	0.12	2	302,534,500	200.00	84.04	Dinas Kehutanan
		Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah Dokumen Penataan Aset/Barang milik Daerah	6	360,000,000.00	6	279,374,500	6	200,000,000.00	1	23,160,000.00	0.12	0.12	7	302,534,500	112.25	84.04	Dinas Kehutanan
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase Pencapaian Target produksi Hasil Hutan	6	6,703,680,000.00	6	1,603,571,458	6	1,420,000,000.00	2	63,711,250.00	0.33	0.04	8	1,667,282,708	133.33	24.87	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Terpenuhinya Jumlah Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	18	450,000,000.00	58	210,565,412	18	450,000,000.00	-	0.00	-	-	58	210,565,412	322.22	46.79	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Jumlah IUPHHK yang dimonev produksi kayu bulatnya dan kewajiban Pembayaran PSDH dan DR nya	348	2,708,680,000.00	58	210,565,412	58	370,000,000.00	7	42,421,250.00	0.12	0.11	65	252,986,662	18.75	9.34	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Monitoring dan Evaluasi Standar Akutansi Kehutanan	Jumlah IUPHHK yang diMonev dalam pelaksanaan penerapan standar akutansi kehutanan	310	1,140,000,000. 00	35	89,480,800	35	100,000,000.00	-	0.00	-	-	35	89,480,800	11.29	7.85	Dinas Kehutanan
		Identifikasi Areal Hutan Alam untuk Prokondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasling	Jumlah Areal Hutan Alam yang diidentifikasi	18	1,260,000,000. 00	18	1,073,540,100	18	200,000,000.00	-	0.00	-	-	18	1,073,540,1 00	100.0 0	85.20	Dinas Kehutanan
		Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK- HA, IUPHHK- HT dan IUPHHK- RE	Jumlah IUPHHK yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian	150	860,000,000.0 0	26	111,441,546	35	175,000,000.00	-	0.00	-	-	26	111,441,54 6	17.50	12.96	Dinas Kehutanan
		Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPPKH, IPKH/TMKH dan APL	Jumlah unit usaha pemegang IPK yang dilakukan pembinaan dan pengendalian Ijin Pemanfaatan Kayu	170	735,000,000.0 0	30	118,543,600	30	125,000,000.00	6	21,290,000.00	0.1 9	0.17	36	139,833,60 0	20.96	19.02	Dinas Kehutanan
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	8	7,509,763,00 0.00	6	842,158,622	8	1,250,000,000. 00	4	94,420,000.00	0.5 0	0.08	10	936,578,62 2	125.0 0	91.04	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan RHL	84	884,873,000.0 0	-	-	14	100,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
		Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan	Jumlah benih/bibit tanaman kehutanan	148, 600	1,911,680,000. 00	40,00 0	177,895,000	40,00 0	300,000,000.00	-	0.00	-	-	40, 000	177,895,00 0	26.92	9.31	Dinas Kehutanan
		Monev Pelaksanaan Reklamasi Hutan	Jumlah Unit Usaha Pertambangan yang dimonev dalam pelaksanaan Reklamasi Hutan	120	833,883,000.0 0	20	150,000,000	20	120,000,000.00	5	26,700,000.00	0.2 4	0.22	25	176,700,00 0	20.58	21.19	Dinas Kehutanan
		Penyusun Rencana Pembangunan/Pengem bagan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Dokumen	70	2,500,000,000. 00	14	201,675,000	14	200,000,000.00	-	0.00	-	-	14	201,675,00 0	20.00	8.07	Dinas Kehutanan
		Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik	Jumlah Lokasi Identifikasi	25	500,000,000.0 0	5	100,000,000	5	100,000,000.00	1	24,050,000.00	0.2 6	0.24	6	124,050,00 0	25.16	24.81	Dinas Kehutanan
		Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	35	900,000,000.0 0	7	90,000,000	7	90,000,000.00	1	13,010,000.00	0.1 6	0.14	8	103,010,00 0	23.16	11.45	Dinas Kehutanan
		Monev Pelaksanaan Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan	56	720,000,000.0 0	14	122,588,622	14	200,000,000.00	2	30,660,000.00	0.1 6	0.15	16	153,248,62 2	29.12	21.28	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																RPJMD s/d Tahun 2018		
%																		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi melalui Penanaman/Penghijauan di Kab/Kota	Jumah Dokumen Reboisasi Hutan dan Lahan yang tersedia	1	144,200,000.00	-	-	1	140,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan	11	10,410,890,000.00	7	1,283,823,999	11	2,725,410,000.00	3	327,475,000.00	0.27	0.12	10	1,611,298,999	90.91	15.48	Dinas Kehutanan
		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Upaya Pencegahan Karhutla	3,000	1,213,500,000.00	-	-	19	500,000,000.00	18	0.00	0.86	0.84	69	168,932,000	17.23	11.41	Dinas Kehutanan
		Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Dalkarhutla	400	1,480,000,000.00	34	84,466,000	40	155,000,000.00	0	141,040,000.00	-	0.91	34	225,506,000	8.62	15.24	Dinas Kehutanan
		Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi kebakaran hutan yang dipadamkan	360	2,656,712,000.00	60	328,990,499	60	535,410,000.00	15	0.00	0.25	-	75	328,990,499	20.87	12.38	Dinas Kehutanan
		Operasi Pengamanan Hutan	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Hutan di Wilayah UPTD-KPH	18	540,000,000.00	18	535,086,900	18	580,000,000.00	0	144,125,000.00	-	0.25	18	679,211,900	100.00	125.78	Dinas Kehutanan
		Pengamanan Hutan Terpadu	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pengamanan Hutan	4	489,178,000.00	4	146,250,000	4	100,000,000.00	0	0.00	-	-	4	146,250,000	100.00	29.90	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kehutanan	4	310,000,000.0 0	1	63,450,000	1	75,000,000.00	0	0.00	0.0 8	-	1	63,450,000	24.20	20.47	Dinas Kehutanan
		Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran di Bidang Kehutanan	Jumlah IUPHHK dan Izin Sah Lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut pelanggaran dibidang kehutanan	350	2,150,000,000. 00	47	46,940,000	58	425,000,000.00	0	32,500,000.00	-	0.08	47	79,440,000	13.31	3.69	Dinas Kehutanan
		Penyuluhan Perundang-undangan Kehutanan	Terlaksanannya Peningkatan Pengetahuan terkait perundang- undangan Kehutanan	6	585,000,000.0 0	-	-	50	75,000,000.00	0	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
		Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Unit TAHURA yang di bangun	1	300,000,000.0 0	1	78,640,600	1	80,000,000.00	0	0.00	-	-	1	78,640,600	92.26	26.21	Dinas Kehutanan
		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Terlaksanannya Peningkatan Pengetahuan terkait KEE	17	1,000,000,000. 00	-	-	20	100,000,000.00	2	9,810,000.00	0.1 1	0.10	2	9,810,000	13.41	0.98	Dinas Kehutanan
		Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/ KPA	Meningkatkan Kemampuan terkait Konservasi Kawasan Hutan	27	900,000,000.0 0	-	-	25	100,000,000.00	0	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Jumlah peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan pengelolaan hutan dan Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	3	3,246,076,000.00	3	451,707,094	3	525,025,000.00	-	33,960,000.00	-	0.06	3	485,667,094	100.00	14.96	Dinas Kehutanan
		Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana teknis dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan	18	1,425,000,000.00	3	172,888,850	3	240,000,000.00	0	33,960,000.00	0.14	0.14	3	206,848,850	19.03	14.52	Dinas Kehutanan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen perencanaan kehutanan	12	590,000,000.00	7	217,130,844	7	192,000,000.00	0	0.00	-	-	7	217,130,844	58.33	36.80	Dinas Kehutanan
		Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Majalah Kehutanan yang dicetak	6,300	1,231,076,000.00	405	61,687,400	1,000	93,025,000.00	0	0.00	-	-	405	61,687,400	6.43	5.01	Dinas Kehutanan
		Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase operasional KPH yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur	6	5,040,000,000.00	3	410,734,441	6	803,550,000.00	1	16,760,000.00	0.17	0.02	4	427,494,441	66.67	8.48	Dinas Kehutanan
		Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Tersedianya Data NSDH Prov. Kalteng	4	800,000,000.00	-	-	1	93,550,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Minitoring dan Evaluasi Perizinan Pemanfaatan/Penggun aan Kawasan Hutan	Jumlah Perizinan Pemanfaatan/Penggu naan Kawasan Hutan yang di Monev	14	150,000,000.0 0	-	-	14	150,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
		Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng	Jumlah Unit yang dikelola	1	1,800,000,000. 00	-	-	1	100,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
		Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK- HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan/Non Pertambangan	Jumlah Perizinan yang dimonitoring dan dievaluasi	75	800,000,000.0 0	15	167,500,000	15	160,000,000.00	2	16,760,000.00	0.1 2	0.10	17	184,260,00 0	22.31	23.03	Dinas Kehutanan
		Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	2	750,000,000.0 0	10	91,653,100	14	100,000,000.00	0	0.00	-	-	10	91,653,100	500.3 6	12.22	Dinas Kehutanan
		Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah dokumen rencana jangka menengah dan jangka pendek Pengelolaan KPH	24	1,690,000,000. 00	10	151,581,341	12	200,000,000.00	0	0.00	-	-	10	151,581,34 1	40.03	8.97	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial	Meningkatkan Kualitas Penyuluh dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penyelesaian Konflik Tenurial	17	7,874,019,338.80	7	1,035,452,800	17	3,194,019,338.80	3	123,090,000.00	0.18	0.04	10	1,158,542,800	58.82	14.71	Dinas Kehutanan
		Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen	5	300,000,000.00	1	54,177,500	1	80,000,000.00	0	0.00	-	-	1.00	54,177,500	20.00	18.06	Dinas Kehutanan
		Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	Jumlah Tenaga Penyuluh yang mengikuti Diklat/Bimtek	224	800,000,000.00	40	90,338,100	40	150,000,000.00	0	0.00	-	-	40	90,338,100	17.86	11.29	Dinas Kehutanan
		Penyusunan Materi Penyuluhan Publikasi	Jumlah Materi Penyuluhan	20	400,000,000.00	4	26,000,000	4	70,000,000.00	3	45,500,000.00	0.66	0.65	7	71,500,000	33.14	17.88	Dinas Kehutanan
		Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat Produktif	Terlaksananya Pendampingan KTH	20	400,000,000.00	-	-	5	100,000,000.00	0	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
		Monev Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Laporan Hasil Monev	56	400,000,000.00	8	74,110,000	8	70,000,000.00	0	0.00	-	-	8	74,110,000	14.29	18.53	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/ 5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat dalam pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Aneka Usaha Kehutanan	160	850,000,000.0 0	25	87,746,000	25	430,000,000.00	0	0.00	-	-	25	87,746,000	15.59	10.32	Dinas Kehutanan
		Pameran Kehutanan	Jumlah Kali Mengikuti Kegiatan Pameran	8	800,000,000.0 0	2	178,700,000	2	200,000,000.00	0	0.00	-	-	2	178,700,000 0	25.00	22.34	Dinas Kehutanan
		Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah Laporan dan Jumlah Unit HTR	52	440,000,000.0 0	13	77,566,000	14	90,000,000.00	0	0.00	-	-	13	77,566,000	24.25	17.63	Dinas Kehutanan
		Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Hutan Rakyat	56	320,000,000.0 0	-	-	2	80,000,000.00	1	18,750,000.00	0.2 5	0.23	1	18,750,000	0.90	5.86	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan kemampuan KTH dalam pengelolaan Kawasan Hutan	28	280,000,000.0 0	-	-	7	70,000,000.00	0	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	Tersusunnya Rencana Kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial untuk mempercepat dukungan usulan- usulan masyarakat dalam Bidang Perhutanan Sosial	1	70,000,000.00	1	100,375,200	1	230,000,000.00	0	0.00	-	-	1	100,375,200	100.00	143.39	Dinas Kehutanan
		Monev Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH	58	150,000,000.00	12	122,000,000	12	260,000,000.00	2	35,680,000.00	0.15	0.14	14	157,680,000	23.85	105.12	Dinas Kehutanan
		Identifikasi Hutan Adat	Jumlah Dokumen Identifikasi Hutan Adat	2	150,000,000.00	1	50,000,000	1	120,000,000.00	0	18,660,000.00	0.17	0.16	1	68,660,000	58.29	45.77	Dinas Kehutanan
		Pendampingan Penetapan/Pengakuan masyarakat Hukum Adat	Jumlah Penetapan Wilayah Hutan Adat	1	100,000,000.00	1	80,000,000	1	80,000,000.00	0	4,500,000.00	0.07	0.06	1	84,500,000	106.50	84.50	Dinas Kehutanan
		Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan	Jumlah Desa yang difasilitasi	79	950,000,000.00	3	33,100,000	3	100,000,000.00	0	0.00	-	-	3	33,100,000	3.64	3.48	Dinas Kehutanan
		Sosialisasi Hutan Adat	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	200	500,000,000.00	40	61,340,000	40	100,000,000.00	0	0.00	-	-	40	61,340,000	20.00	12.27	Dinas Kehutanan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode RPJMD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2019) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2019		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
																%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12
	1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif yang dikembangkan	18	964,019,338.8 0	-	-	18	964,019,338.80	0	0.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Kehutanan





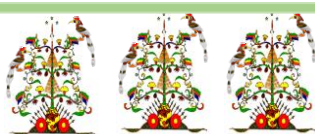
2.3. Permasalahan Pembangunan Kalimantan Tengah

Setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan, memiliki permasalahan yang berbeda menurut dimensi maupun kurun waktu. Permasalahan yang merupakan tantangan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasinya akan menjadi fokus utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama dalam penyusunan program kegiatan dan arah kebijakan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan pokok, global, dan menyeluruh baik dari segi wilayah maupun waktu karena permasalahan tersebut terus muncul berdampingan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator dalam melihat permasalahan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan memperhatikan kesenjangan antara kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dicapai saat ini dengan target pembangunan yang disusun dalam dokumen perencanaan sebagai tujuan yang ingin dicapai di masa datang. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada kondisi atau gambaran umum daerah sekaligus evaluasi kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 antara lain permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.





2.3.1.1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan;

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup:

a. Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan.

Karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan transportasi antar moda yang memadukan antara transportasi darat dan sungai.

b. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 1,2 persen. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya.

c. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.

Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Tengah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang hingga saat ini masih hanya bisa dinikmati oleh warga diperkotaan sementara untuk wilayah pedalaman/perdesaan belum seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik.

d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota.

Pelayanan umum karena semakin membaiknya akses jaringan jalan ke semua wilayah baik antar kecamatan, kabupaten, hingga





antarprovinsi mesti diimbangi dengan jasa layanan angkutan secara terpadu untuk memenuhi lalu lintas jalan barat-timur dan utara-selatan. Kondisi sarana dan prasarana sektor angkutan, khususnya terminal yang memadai dan modern masih belum memadai.

- e. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar tidak merata menyebabkan pelayanannya menjadi sulit.**

2.3.1.2. Masalah pengembangan ekonomi lokal;

Permasalahan bidang ekonomi menjadi isu utama perencanaan pembangunan menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Permasalahan dalam bidang ekonomi antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, kesejahteraan nelayan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi.

2.3.1.3. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan

Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah. Tingkat kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihinya. Tak terkecuali provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui terkait dengan bidang pendidikan, adalah:

- a. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas dan sulit dijangkau memerlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.
- b. Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/terpencil/terpinggir.
- c. Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan.





- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

2.3.1.4. Masalah bidang kesejahteraan sosial

Permasalahan sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan layanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi isu utama tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, baik sebagai *enabler* aktivitas pembangunan maupun tujuan dari pembangunan itu sendiri. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping untuk meningkatkan derajat kesejahteraan juga berfungsi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan layanan yang baik, seperti layanan bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan budaya dan wisata. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita kurang gizi.
- b. Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan.
- c. Terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular.
- d. Masih perlunya ditingkatkan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

2.3.1.5. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi

Kapasitas kelembagaan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai agen pembangunan masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan juga menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah,





utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur.

Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan ini ditandai dengan:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah yang masih setengah-setengah, antara lain dengan masih banyaknya instansi pemerintah di daerah (“kanwil-kanwil”) menyebabkan proses koordinasi masih lemah.
- b. Masih kurangnya peran gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- c. Masih adanya “kebijakan” pembangunan oleh pemerintah yang kurang berpihak ke wilayah Indonesia bagian timur.
- d. Masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
- e. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
- f. Ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan secara lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- g. Masih perlu ditingkatkan pemahaman pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta masih perlunya ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- h. Pembangunan di sektor lingkungan hidup belum menjadi isu sentral pembangunan.
- i. Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.

2.3.1.6. Masalah pengelolaan sumber daya alam

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun





demikian masih banyak izin-ijin pengelolaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam umumnya masih pada tahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah yang rendah.

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah tersebar pada beberapa kawasan. Di bagian barat, terhampar tanaman perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 900.000 Ha. Perkebunan karet tersebar hampir di semua kawasan. Sedangkan potensi tambang batubara berada di bagian timur-utara, dengan jumlah potensi cadangan sekitar 4,8 milyar ton.

Selain mempunyai nilai ekonomi, potensi sumber daya alam juga mempunyai nilai daya dukung lingkungan yang strategis. Kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mencapai luas sekitar 3 juta hektar dengan kandungan gambut sekitar 6,3 giga ton merupakan merupakan ekosistem yang perlu dilindungi karena berfungsi sebagai sumber air dan sumber plasma nutfah yang sangat berharga. Selain itu kawasan gambut juga berfungsi penting sebagai penahan emisi karbon yang jika terusik dan rusak akan berdampak terhadap perubahan iklim global.

Kawasan lainnya yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan penting adalah kawasan *Heart of Borneo* (HoB). Inisiatif *Heart of Borneo* (Jantung Borneo) adalah sebuah inisiatif yang dirancang sebagai program pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi yang bertujuan mempertahankan keberlanjutan manfaat salah satu hutan terbaik yang masih tersisa di Pulau Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Cakupan wilayah kerja *HoB* membentang pada rangkaian dataran tinggi Borneo yang terhubung secara langsung dengan dataran rendah di bawahnya. Wilayah kerja ini melintasi wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam meliputi areas seluas kira-kira 22 juta hektar yang secara ekologis saling terhubung. Jika pola pendayagunaan sumber daya alam terus berlanjut seperti sekarang yang cenderung tidak terkendali maka berbagai kawasan seperti kawasan lahan gambut dan kawasan *HoB* serta





kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan lainnya yang merupakan sumber daya alam yang tak ternilai akan terancam serta terdegradasi semakin meluas dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim global.





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, perlu menekankan perihal program dan kegiatan periode sebelumnya yang memiliki kekuatan lebih dalam pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat program dan kegiatan terkait arah kebijakan yang disusun, terutama yang terkait pendanaan, harus memiliki keterkaitan dengan perencanaan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan tahun 2019 hingga Triwulan I akan menjadi acuan dasar dalam melanjutkan kinerja pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah daerah pada tahap selanjutnya.

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran, baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang diambil haruslah melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan, seperti: ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal, baik dari luar regional maupun internasional.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, termasuk dalam merumuskan *budget policy*, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan





cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan asumsi perencanaan pembangunan daerah.

3.1.1. Perubahan Asumsi Dasar RKPD

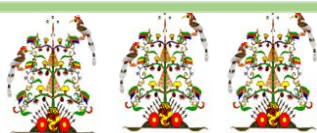
Perubahan asumsi dasar RKPD meliputi aspek perubahan perkembangan indikator ekonomi makro daerah dan aspek keuangan daerah. Dari sisi perkembangan indikator ekonomi makro daerah, pada dasarnya tidak ada perubahan asumsi dasar RKPD Tahun 2019.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam RKPD Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 7,0 persen, mengacu pada target Kalimantan Tengah dalam RPJMN Tahun 2015–2019. Berdasarkan Berita Resmi Statistik oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan I-2018 terhadap triwulan I-2017 yang mencapai 5,64 persen.

Berdasarkan asumsi indikator pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 diperkirakan tumbuh meningkat berada pada kisaran 5,80-6,20, ekonomi tumbuh dengan asumsi sebagai berikut :

1. Lapangan usaha pertanian akan tumbuh didorong oleh peningkatan produksi TBS
2. Peningkatan produksi TBS akan mendorong LU industri pengolahan untuk tumbuh lebih baik. Proyeksi World Bank dalam Commodity Market Outlook (CMO) Periode Oktober 2018 akan membaik di Tahun 2019.
3. World Bank memproyeksikan harga batu bara akan mengalami pelemahan di Tahun 2019. Meskipun demikian, kinerja LU pertambangan diperkirakan tetap tumbuh terbatas tahun 2019 di dorong oleh *baseline effect*.





Selain berdasarkan Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 berdasarkan capaian kinerja Tahun 2018 pada Perubahan RKPD Tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,5-6,5 persen. Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2018 sebesar 5,5-6,5 persen ini lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi nasional dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 8,7 persen.

b. Laju Inflasi

Tingkat inflasi tahun 2019 dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 sesuai dengan target Kalimantan Tengah dalam RPJMN Tahun 2015–2019 yang diproyeksikan sebesar 2,5 persen.

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah per tanggal 2 Mei 2019, Inflasi tahunan Palangka Raya 0,32 persen dan di Sampit 0,66 persen. Kedua kota tersebut menempati peringkat ke 57 dan ke 14 kota inflasi tertinggi di tingkat nasional. Berdasarkan dua kota acuan (Palangka Raya dan Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi 0,44 persen yang diikuti oleh laju inflasi tahun kalender 0,66 persen dan inflasi tahun ke tahun 3,86 persen, inflasi ini didominasi oleh pengaruh komponen harga bergejolak (*volatile foods*). Komoditas bawang merah, bawang putih, dan jasa angkutan udara secara kolektif mendominasi dengan andil yang cukup tinggi terhadap inflasi di Palangka Raya dan Sampit.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pada Perubahan RKPD Tahun 2019, laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 4,1-4,2 persen. Untuk itu diperlukan upaya-upaya nyata untuk pengawalan program-program pembangunan agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta sesuai target yang telah ditetapkan.

c. Tingkat Pengangguran

Mengacu pada target Kalimantan Tengah dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Tengah tahun 2019 dalam Perubahan RKPD Tahun





2019 target sebesar 4,5-5 persen, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,5 persen.

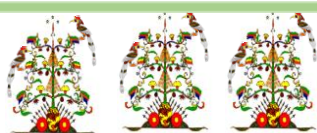
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah pada Berita Resmi Statistik per tanggal 6 Mei 2019, tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2018 sebesar 3,33 persen, mengalami peningkatan dibandingkan TPT pada Februari 2018 sebesar 0,15 persen. Pada Februari 2019, lapangan pekerjaan utama paling banyak terdapat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (38,11 persen), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (16,86 persen), serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan sosial (7,90 persen).

Pada Perubahan RKPD Tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 4 persen, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,5 persen. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang sistematis untuk menurunkan angka pengangguran pada tahun 2019 ini, dengan catatan semua pihak terkait mempunyai komitmen yang tinggi terhadap permasalahan ini.

d. Angka Kemiskinan

Dalam RKPD Tahun 2018, angka kemiskinan tahun 2019 berdasarkan pada target Kalimantan Tengah pada RPJMN Tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar 4,3 persen.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2019, target angka kemiskinan Kalimantan Tengah berdasarkan capaian kinerja Tahun 2018 diproyeksikan 4,5-5 persen. Sehubungan dengan penurunan angka kemiskinan ini diperlukan upaya-upaya dan kerja lebih keras lagi, serta semua pihak terkait harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan ini. Melalui pengawalan program-program pembangunan yang sistematis dan pelaksanaan program-program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh komponennya dalam rangka penurunan angka kemiskinan, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,5-5 persen pada tahun 2019 ini.





Tabel 3.1
Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro
Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2013-2018

No	Indikator Makro	Target dan Realisasi Capaian Kinerja (%)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,1	6,69	7,3	6,21	7,5	7,01	6,2-6,5	6,2-6,5	6,5	6,74	6,5	5,64
2	Laju Inflasi (%)	4	6,79	3,0	7,07	2,5	4,74	4,5-4,6	4,5-4,6	4,4-4,5	3,18	4,3-4,4	4,52
3	Angka Kemiskinan (%)	3	6,23	2,5	6,07	2	5,91	5,8	5,8	5,3	5,26	5,02	5,10
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,75	3,00	2,5	3,24	2	4,54	4,5	4,5	4,5	4,23	4,00	4,01

3.1.2. Perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Salah satu kajian utama dalam melihat fenomena perekonomian daerah adalah analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun analisis stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok melalui indikator laju inflasi. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis PDRB harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB maupun indikator turunannya seperti laju pertumbuhan ekonomi maupun struktur perekonomian wilayah, sedangkan perekonomian mikro dapat diindikasikan melalui kestabilan harga kebutuhan hidup masyarakat di setiap bulannya.

Salah satu kajian utama dalam melihat fenomena perekonomian daerah adalah analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun analisis stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok melalui indikator laju inflasi. Tujuan





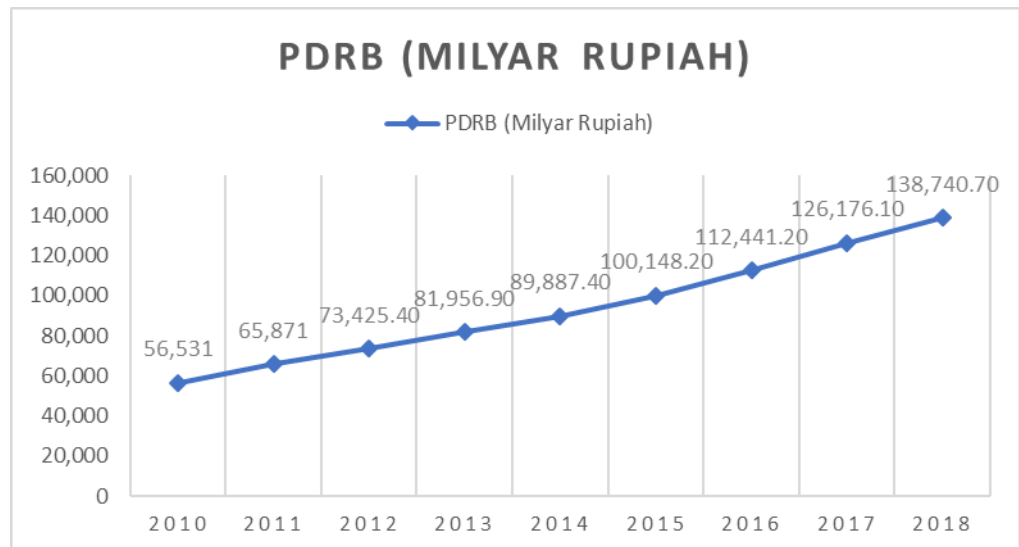
pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis PDRB harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB maupun indikator turunannya seperti laju pertumbuhan ekonomi maupun struktur perekonomian wilayah, sedangkan perekonomian mikro dapat diindikasikan melalui kestabilan harga kebutuhan hidup masyarakat di setiap bulannya.

a. Pertumbuhan PDRB Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah. Secara definitif, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu.

Nilai PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi kenaikan dari tahun ke tahun secara konsisten, di mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Angka PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur atas harga berlaku (ADHB) mencapai 65.871 milyar rupiah di tahun 2011 dan meningkat signifikan di tahun 2017 sebesar 126.176,10 milyar rupiah dan pada tahun 2018 mencapai 138.740,7 milyar rupiah.



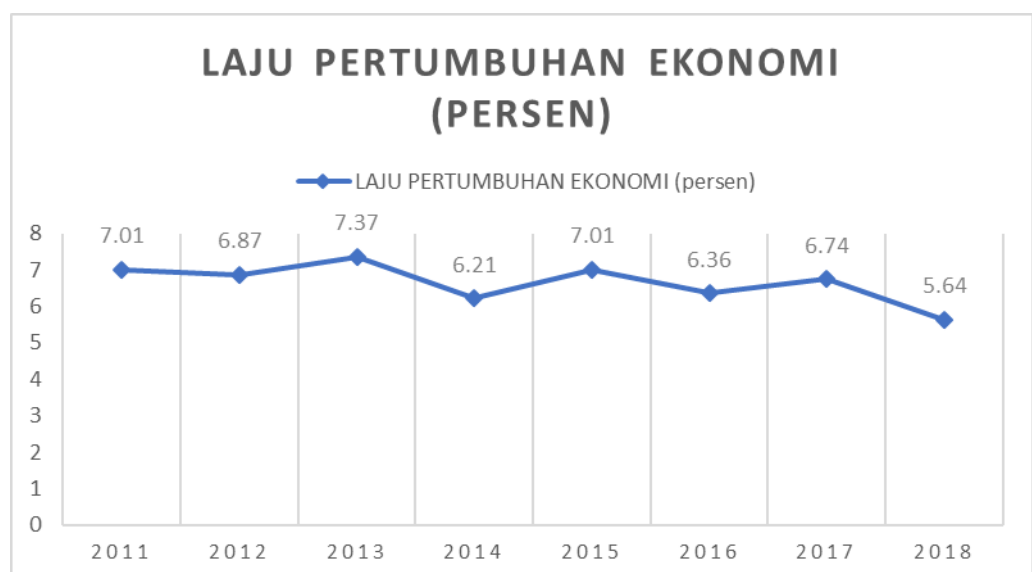


Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Resmi Pusat Statistik 2019

Gambar 3. 1

Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (AHDB)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2018 (Milyar Rupiah)

Apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah berada pada kisaran 6 persen hingga 7 persen. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada pada tahun 2013 yakni sebesar 7,37 persen, sedangkan di tahun 2016 cenderung mengalami penurunan yakni sebesar 6,36 persen dan pada tahun 2017 naik kembali menjadi 6,74 persen kemudian menurun pada angka 5,64 persen pada tahun 2018.





Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Resmi
Pusat Statistik 2019

Gambar 3. 2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2018 (persen)

Laju diperjelas dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 2

Pertumbuhan ekonomi menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	6,75	5,32	3,84	4,52	6.94
2	Pertambangan dan Penggalian	2,78	2,04	7,60	8,75	-0.02
3	Industri Pengolahan	12,31	6,41	7,45	9,06	5.03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,31	25,54	10,34	5,82	9.01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	4,47	3,32	4,35	0,12	8.21
6	Konstruksi	9,51	9,62	7,82	5,29	1.48
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,74	8,2804	7,29	8,02	11.3
8	Transportasi dan Pengudaraan	2,17	13,57	9,17	8,27	8.5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,21	8,28	7,86	5,42	6.87
10	Informasi dan Komunikasi	12,08	5,23	6,23	6,38	8.28





No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
11	Jasa keuangan dan Asuranssi	6,22	2,21	7,27	8,88	2.14
12	Real Estate	7,11	8,56	5,36	4,24	8.66
13	Jasa Perusahaan	4,54	7,84	6,03	5,45	7.79
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	15,34	2,33	4,21	7.54
15	Jasa Penidikan	9,67	10,47	6,21	3,69	8.71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,86	9,73	5,40	5,64	8.57
17	Jasa Lainnya	8,86	7,56	6,84	4,11	8.38
Provinsi Kalimantan Tengah		6,21	7,01	6,35	6,72	5,64

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Resmi Pusat Statistik 2019

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada pada tahun 2015 dicapai oleh sektor pengolahan listrik dan gas sebesar 25, 54 persen, kemudian diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,34 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,57 persen. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 6,36 persen dan secara umum mengalami penurunan di setiap sektor kecuali sektor jasa keuangan dan asuransi, pertambangan dan penggalan, dan industri pengolahan. Pada tahun 2017 pertumbuhan

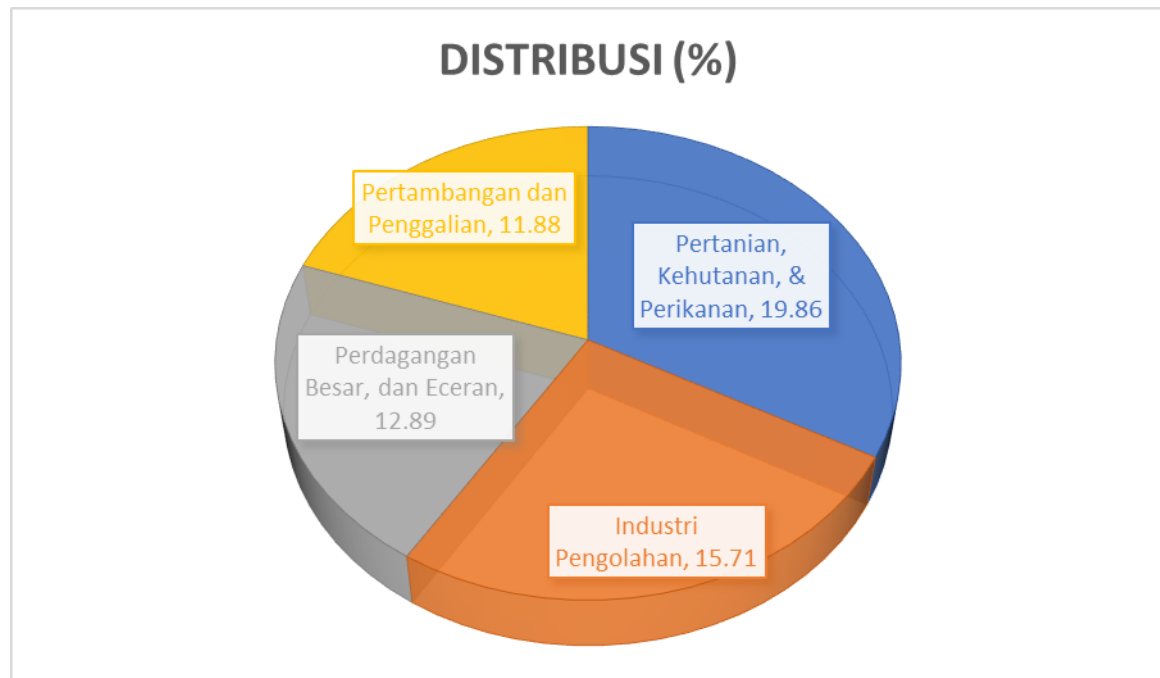




ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan kembali menjadi 6,74 persen. Sektor yang paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,30 persen dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,88 persen, serta sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan yaitu 8,78 persen. Namun sektor yang mengalami penurunan yang signifikan adalah sektor pengadaan listrik dan gas menjadi 5,82 persen. Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2016 di dominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian sebesar 21,94 persen, industri pengolahan sebesar 16,33 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,68 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar 10,82 persen. Demikian halnya di tahun 2017 yang masih didominasi oleh tiga kategori utama yakni pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 138.740,7 miliar dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp 94.595,7 miliar. Perekonomian Kalimantan Tengah 2018 tumbuh 5,64 persen. Pertumbuhan ini tidak mencapai target yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang sebesar 6,5 persen untuk tahun 2018.





Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Resmi Pusat Statistik 2019

Gambar 3. 3 Stuktur Perekonomian
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Tengah (persen) tahun 2018

Perekonomian Kalimantan Tengah masih sangat tergantung dari sumber daya alam. Hal ini tercermin dari struktur ekonominya yang masih ditopang oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun, pada tahun 2018, pertumbuhan lapangan usaha tertinggi adalah pada bidang Perdagangan dan Reparasi yaitu sekitar 11.30 persen.

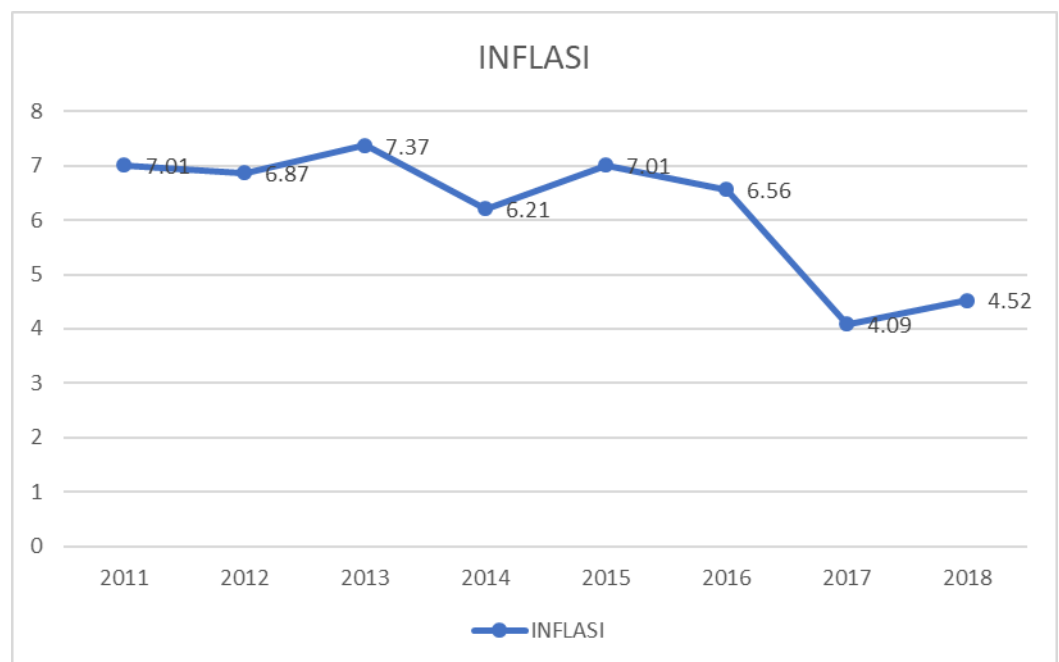
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 11,30 persen, diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh 9,01 persen serta Jasa Pendidikan sebesar 8,71 persen. Sementara Kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Kategori yang memberikan sumber pertumbuhan tertinggi adalah Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,43 persen).





b. Laju Inflasi.

Inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (continue). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi secara series dalam kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, dan/atau menurunnya produksi, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sedang menuju suatu kestabilan harga dimana laju inflasi berada pada tingkatan normal di kisaran ± 6 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Resmi Pusat Statistik 2019

Gambar 3. 4

Laju Inflasi Tahunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2018 (persen)





Laju inflasi dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 7,37 persen dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,87 persen. Kenaikan inflasi dapat memperburuk perekonomian, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga sehingga masyarakat akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada tahun 2017 inflasi merupakan inflasi yang terendah yakni sebesar 4,09 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 4,52 persen. Inflasi yang rendah menjadi salah satu indikasi menurunnya daya beli masyarakat, dan diharapkan pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan inflasi, agar kemampuan daya beli masyarakat semakin baik.

Tabel 3. 3

Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2018 (persen)

No	Keterangan (Inflasi – YoY)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Inflasi Tahunan Palangka Raya	6,73	6,45	6,63	4,20	3,09	3,29	3,68
2	Inflasi Tahunan Sampit	4,69	7,25	7,90	5,72	3,34	3,18	6,02
3	Inflasi Kalimantan Tengah	5,85	6,79	7,07	4,74	3,15	3,61	4,52
4	Inflasi Nasional	4,30	8,38	8,36	3,35	3,07	3,11	3,13

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Resmi Pusat Statistik 2019

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi dapat mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan





sehari-hari. Inflasi tahunan Palangka Raya terus mengalami penurunan setiap tahunnya dan paling rendah pada tahun 2017 sebesar 3,11 persen, dan sempit sebesar 3,29 persen. Sedangkan inflasi Kalimantan Tengah sebesar 3,18 persen, inflasi ini didominasi oleh kelompok Administered Prices. Implementasi kebijakan penyesuaian tarif beberapa komoditas Adm. Prices menjadi penyebab utama tingginya tekanan kelompok ini.

Berdasarkan dua kota acuan (Palangka Raya dan Sampit), Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi 4,52 persen di tahun 2018, sementara target RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 4,3 - 4,4 persen. Laju inflasi tahun kalender di Sampit (6,02 persen), lebih tinggi jika dibandingkan dengan Palangka Raya (3,68 persen). Secara spesifik, komoditas dan jasa yang menjadi pemicu lonjakan tingkat inflasi di Palangka Raya dan Sampit berasal dari angkutan udara dan daging ayam ras. Jasa angkutan udara memiliki andil paling dominan di Palangka Raya (0,55 persen) dan Sampit (0,88 persen). Sedangkan andil daging ayam ras juga cukup tinggi di Palangka Raya (0,15 persen) dan Sampit (0,29 persen).

Inflasi yang tinggi terjadi pada bulan Juni dan Desember. Selama Desember 2018, komponen kebijakan harga diatur pemerintah (administered prices) memiliki pengaruh sangat tinggi terhadap kenaikan indeks harga di Palangka Raya dan Sampit. Hal ini merupakan dampak langsung dari lonjakan harga tiket angkutan udara selama hari raya Natal, yang berbarengan dengan masa liburan sekolah. Namun demikian, andil komponen harga bergejolak (*volatile foods*) juga cukup tinggi terhadap terjadinya inflasi di di dua kota tersebut. Sementara itu, dampak dari komponen inti (*core inflation*) relatif seimbang antara Palangka Raya dan Sampit.

3.1.3. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2018 dan tahun 2019

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjukkan melalui perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah selama beberapa periode terakhir serta melihat laju pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun sektoral,





mengindikasikan meningkatnya pergerakan perekonomian daerah. Secara series untuk melihat keterkaitan dengan fenomena sosial, dapat dilihat pada target dan capaian indikator makro pembangunan daerah tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018

No	Indikator Makro	Target dan Realisasi Capaian Kinerja (%)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,1	6,69	7,3	6,21	7,5	7,01	6,2-6,5	6,2-6,5	6,5	6,74	6,5	5,64
2	Laju Inflasi (%)	4	6,79	3,0	7,07	2,5	4,74	4,5-4,6	4,5-4,6	4,4-4,5	3,18	4,3-4,4	4,52
3	Angka Kemiskinan (%)	3	6,23	2,5	6,07	2	5,91	5,8	5,8	5,3	5,26	5,02	5,10
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,75	3,00	2,5	3,24	2	4,54	4,5	4,5	4,5	4,23	4,00	4,01

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Resmi Pusat Statistik 2019

Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai angka 5,64% persen dari yang sebelumnya ditargetkan mencapai angka 6,50% dan untuk meningkatkan performa pertumbuhan ekonomi maka pemerintah perlu meningkatkan berbagai perencanaan perekonomian. Rencana pembangunan beberapa infrastruktur pembangunan serta trend membaiknya perekonomian global akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2019. Apabila dilihat dari perekonomian secara makro Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan hasil yang baik hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan, laju inflasi dan





penurunan tingkat pengangguran sampai tahun 2018 yang hampir mencapai target tahunan.

3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

3.2.1 . Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan 5 Mei 2019 sebesar Rp.2.073.601.445.536,39 atau 40,28 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5.147.443.691.519,00, secara garis besarnya tergambar dalam Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019
SAMPAI DENGAN 31 MEI 2019

JENIS	PAGU	REALISASI	
		Keuangan	%
PENDAPATAN	5,147,443,691,519.00	1987621198580,75	38,61
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,594,702,205,980.00	894661738526,64	56,10
Pendapatan Pajak Daerah	1,293,984,175,080.00	697912893514,40	53,94
Pajak Kendaraan Bermotor	309,976,800,000.00	181,645,295,700.00	58,60
PKB - Mobil Penumpang - Sedan	2,336,716,000.00	1,149,234,400.00	49,18
PKB - Mobil Penumpang - Jeep	15,074,598,000.00	10,723,696,100.00	71,14
PKB - Mobil Penumpang - Minibus	84,702,398,000.00	66,330,357,700.00	78,31
PKB - Mobil Bus - Microbus	1,536,328,000.00	857,408,500.00	55,81
PKB - Mobil Bus - Bus	502,279,000.00	154,405,100.00	30,74





JENIS	PAGU	REALISASI	
		Keuangan	%
PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	45,657,505,000.00	22,880,546,250.00	50,11
PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	21,038,556,000.00	9,898,673,400.00	47,05
PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	38,442,506,000.00	19,822,716,150.00	51,56
PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	94,185,940,000.00	47,584,587,200.00	50,52
PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	87,504,000.00	256,869,800.00	293,55
PKB - Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air	7,000,000.00	14,391,000.00	205,59
PKB - Kendaraan Alat Berat/Besar	6,405,470,000.00	1,972,410,100.00	30,79
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	302,231,640,000.00	185,545,989,725.00	61,39
BBNKB - Mobil Penumpang - Sedan	327,553,000.00	137,011,500.00	41,83
BBNKB - Mobil Penumpang - Jeep	6,460,410,000.00	6,639,124,800.00	102,77
BBNKB - Mobil Penumpang - Minibus	100,889,528,000.00	58,517,108,100.00	58
BBNKB - Mobil Bus - Microbus	1,170,951,000.00	736,341,500.00	62,88
BBNKB - Mobil Bus - Bus	288,260,000.00	124,600,000.00	43,22
BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	38,894,703,000.00	21,096,441,100.00	54,24
BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	9,153,792,000.00	6,683,677,700.00	73,02
BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	23,137,279,000.00	16,038,281,400.00	69,32
BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	119,304,183,000.00	74,182,359,400.00	62,18
BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	390,491,000.00	241,236,200.00	61,78
BBNKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	1,545,000.00	250,000.00	16,18
BBNKB - Kendaraan Alat Berat/Besar	2,212,945,000.00	1,149,558,025.00	51,95
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	541,562,199,138.00	281,009,199,904.00	51,89
Pajak Bahan Bakar Premium	31,454,046,138.00	16,916,347,256.00	53,78
Pajak Bahan Bakar Pertamina	71,711,403,000.00	25,752,417,128.00	35,91
Pajak Bahan Bakar Solar	293,104,075,000.00	91,701,761,056.00	31,29
Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex	778,898,000.00	420,153,203.00	53,94
Pajak Bahan Bakar Bio Solar	35,084,163,000.00	82,769,410,263.00	235,92
Pajak Bahan Bakar Peralite	81,333,720,000.00	53,630,504,802.00	65,94
Pajak Bahan Bakar Dexlite	28,095,894,000.00	9,818,606,196.00	34,95





JENIS	PAGU	REALISASI	
		Keuangan	%
Pajak Air Permukaan	1,000,000,000.00	860505321,40	86,05
Pajak Air Permukaan	1,000,000,000.00	860505321,40	86,05
Pajak Rokok	139,213,535,942.00	48,851,902,864.00	35,09
Pajak Rokok	139,213,535,942.00	48,851,902,864.00	35,09
Hasil Retribusi Daerah	12,527,130,900.00	5,709,765,428.00	45,58
Retribusi Jasa Umum	2,465,000,000.00	2,874,843,028.00	116,63
Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	1,855,000,000.00	1,221,318,028.00	65,84
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital	65,000,000.00	13,100,000.00	20,15
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik	445,000,000.00	1,610,500,000.00	361,91
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	100,000,000.00	29,925,000.00	29,93
Retribusi Jasa Usaha	9,038,330,900.00	2,752,538,235.00	30,45
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	6,407,880,900.00	1,728,863,110.00	26,98
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	126,500,000.00	84,450,000.00	66,76
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	642,250,000.00	250,550,000.00	39,01
Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	50,000,000.00	40,200,000.00	80,40
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	401,000,000.00	170,450,000.00	42,51
Retribusi Tempat Pariwisata	45,000,000.00	7,308,500.00	16,24
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	635,000,000.00	228,460,000.00	35,98
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	730,700,000.00	242,256,625.00	33,15
Retribusi Perizinan Tertentu	1,023,800,000.00	82,384,165.00	8,05
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5,500,000.00	-	0
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	26,000,000.00	14,500,000.00	55,77





JENIS	PAGU	REALISASI	
		Keuangan	%
Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	7,800,000.00	-	0
Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	7,500,000.00	-	0
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	900,000,000.00	67,884,165.00	7,54
Retribusi Izin Penangkapan Ikan	7,500,000.00	-	0
Retribusi Izin Kapal Pengangkutan Ikan	7,500,000.00	-	0
Retribusi Izin Penangkapan Ikan Tandon	62,000,000.00	-	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71,350,000,000.00	78,755,605,858.00	110,38
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	71,350,000,000.00	78,755,605,858.00	110,38
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	71,350,000,000.00	78,755,605,858.00	110,38
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	216,840,900,000.00	112283473726,24	51,78
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	800,500,000.00	428,255,900.00	53,50
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	280,500,000.00	-	0
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	520,000,000.00	428,255,900.00	82,36
Penerimaan Jasa Giro	13,104,000,000.00	4,407,511,974.00	33,63
Jasa Giro Kas Daerah	13,000,000,000.00	4,271,275,364.00	32,86
Jasa Giro Pemegang Kas	104,000,000.00	136,236,610.00	131
Penerimaan Bunga Deposito	18,750,000,000.00	12462226033,24	66,47
Rekening Deposito Pada Bank	18,750,000,000.00	12462226033,24	66,47
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	100,100,000.00	-	0
Kerugian Uang	100,000.00	-	0
Pengembalian Gaji	100,000,000.00	-	0
Pendapatan Denda Pajak	50,000,000,000.00	10,979,946,250.00	21,96
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	50,000,000,000.00	10,506,389,800.00	21,01
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	473,556,450.00	0
Pendapatan Denda Retribusi	348,500,000.00	-	0





JENIS	PAGU	REALISASI	
		Keuangan	%
Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	348,500,000.00	-	0
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	13,457,800,000.00	5,210,325,000.00	38,72
Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan	13,457,800,000.00	5,210,325,000.00	38,72
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	280,000,000.00	-	0
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	280,000,000.00	-	0
Pendapatan BLUD	120,000,000,000.00	78,795,208,569.00	65,66
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	26,010,000,000.00	10,261,076,015.00	39,45
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	92,773,418,000.00	67,807,459,708.00	73,09
Pendapatan Lain-lain BLUD	1,216,582,000.00	726,672,846.00	59,73
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	0
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	0
DANA PERIMBANGAN	3,211,623,500,000.00	1,069,663,942,428.00	33,31
Bagi Hasil Pajak	166,192,139,000.00	31,675,649,800.00	19,06
Bagi Hasil Pajak	166,192,139,000.00	31,675,649,800.00	19,06
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	38,733,712,667.00	5,116,223,600.00	13,21
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	63,870,228,000.00	25,548,091,200.00	40
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	40,932,718,666.00	-	0
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	15,913,243,667.00	-	0
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6,742,236,000.00	1,011,335,000.00	15
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	447,481,314,000.00	167,649,609,570.00	37,47
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	447,481,314,000.00	167,649,609,570.00	37,47
Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	12,768,229,667.00	2,382,023,400.00	18,66
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	38,002,222,667.00	10,179,324,300.00	26,79
Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	229,917,986,666.00	71,645,184,000.00	31,16
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	24,823,277,000.00	5,723,256,471.00	23,06





JENIS	PAGU	REALISASI	
		Keuangan	%
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	141,607,855,000.00	77,575,124,199.00	54,78
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	48,776,000.00	21,074,800.00	43,21
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	312,967,000.00	123,622,400.00	39,50
Dana Alokasi Umum	1,603,623,745,000.00	335,447,149,000.00	20,92
Dana Alokasi Umum	1,603,623,745,000.00	335,447,149,000.00	20,92
Dana Alokasi Umum	1,603,623,745,000.00	335,447,149,000.00	20,92
Dana Alokasi Khusus	994,326,302,000.00	534,891,534,058.00	53,79
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	214,966,554,000.00	38,826,095,500.00	18,06
DAK Bidang Pendidikan	99,066,222,000.00	25,162,224,000.00	25,40
DAK Bidang Kesehatan dan KB	1,214,004,000.00	-	0
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	52,532,405,000.00	13,133,101,250.00	25
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9,588,666,000.00	-	0
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	10,000,521,000.00	-	0
DAK Bidang Pertanian	8,550,000,000.00	-	0
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6,691,425,000.00	-	0
DAK Bidang Perdagangan	2,083,039,000.00	-	0
DAK Bidang Kesehatan	23,117,191,000.00	-	0
DAK Bidang Pariwisata	2,123,081,000.00	530,770,250.00	25
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	779,359,748,000.00	496,065,438,558.00	63,65
DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	620,795,551,000.00	412,162,191,000.00	66,39
DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB	3,920,250,000.00	1,666,687,816.00	42,51
DAK Non Fisik - Koperasi UKM	3,014,090,000.00	1,360,822,274.00	45,15
DAK Non Fisik - Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,751,314,000.00	1,708,878,468.00	97,58
DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Budaya	3,127,000,000.00	1,563,500,000.00	50
Tunjangan Profesi Guru	129,400,588,000.00	71,170,323,000.00	55
Tambahan Penghasilan Guru	4,911,000,000.00	2,701,050,000.00	55
Tunjangan Khusus Guru	12,439,955,000.00	3,731,986,000.00	30





JENIS	PAGU	REALISASI	
		Keuangan	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	341,117,985,539.00	23295517626,11	6,83
Pendapatan Hibah	1,065,250,000.00	3,261,025,000.00	306,13
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1,065,250,000.00	-	0
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	1,065,250,000.00	-	0
Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	-	3,261,025,000.00	0
Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor	-	3,261,025,000.00	0
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,430,000,000.00	735,000,000.00	21,43
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	3,185,000,000.00	490,000,000.00	15,38
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Murung Raya	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Utara	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Selatan	245,000,000.00	245,000,000.00	100
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Timur	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Gunung Mas	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Seruyan	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kotawaringin Barat	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kotawaringin Timur	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sukamara	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Lamandau	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Pulang Pisau	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kapuas	245,000,000.00	245,000,000.00	100
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten katingan	245,000,000.00	-	0
Bantuan Keuangan Dari Kota	245,000,000.00	245,000,000.00	100
Bantuan Keuangan Dari Kota Palangka Raya	245,000,000.00	245,000,000.00	100
Pendapatan Lainnya	322,986,730,539.00	12481490626,11	3,86
Pendapatan Lainnya	322,986,730,539.00	12481490626,11	3,86
Pendapatan Lainnya	-	777221506,36	0





JENIS	PAGU	REALISASI	
		Keuangan	%
Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	-	11021849947,75	0
Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	94,419,172.00	0
Sumbangan dari PT Jasa Raharja	-	588,000,000.00	0
Sumbangan Pihak Ketiga Lainnya	322,986,730,539.00	-	0
Dana Insentif Daerah	13,636,005,000.00	6,818,002,000.00	50
Dana Insentif Daerah	13,636,005,000.00	6,818,002,000.00	50
Dana Insentif Daerah	13,636,005,000.00	6,818,002,000.00	50

Sumber SIMP3D per tanggal 15 Juli 2019

3.2.1.2. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.5.159.490.281.519,00,- atau bertambah sebesar Rp.12.046.590.000,00,- atau 0,234 % dari target pada APBD murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.5.147.443.691.519,00. Komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp.16.766.156.000,00 atau naik sebesar 1,05% dari target murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.594.702.205.980,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.611.468.361.980,00.

b. Pendapatan Transfer

Pada kelompok Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp.4.719.566.000,00 atau 0,15% dari target murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.211.623.500.000,00 menjadi sebesar Rp.3.206.903.934.000,00 dimana terjadi penurunan pada jenis Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang semula ditargetkan sebesar Rp.166.192.139.000,00 turun sebesar Rp.4.719.566.000,00 atau 0,15% sehingga menjadi sebesar Rp.161.472.573.000,00, sedangkan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya seperti Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi





Umum/Gaji Guru SMA/SMK dan Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik pada Perubahan APBD Tahun 2019 tidak mengalami perubahan atau sama dengan yang dianggarkan pada Murni Tahun Anggaran 2019.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tidak mengalami perubahan atau tetap sama dengan yang dianggarkan pada Murni Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar Rp.341.117.985.539,00 yang didalamnya terdiri dari Pendapatan Hibah, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Lainnya dan Dana Insentif Daerah.

Secara rinci proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 3.6

Tabel 3.6
Pendapatan pada Perubahan Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	5,147,443,691,519.00	5,159,490,281,519.00	12,046,590,000.00	0.234
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,594,702,205,980.00	1,611,468,361,980.00	16,766,156,000.00	1.05
1.1.1.	Pajak Daerah	1,293,984,175,080.00	1,301,984,175,080.00	8,000,000,000.00	0.62
1.1.2.	Retribusi Daerah	12,527,130,900.00	12,538,286,900.00	11,156,000.00	0.09
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	71,350,000,000.00	80,105,000,000.00	8,755,000,000.00	12.27
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	216,840,900,000.00	216,840,900,000.00	-	-
1.2.	DANA PERIMBANGAN (TRANSFER PUSAT)	3,211,623,500,000.00	3,206,903,934,000.00	(4,719,566,000.00)	(0.15)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Sumber Daya Alam	166,192,139,000.00	161,472,573,000.00	(4,719,566,000.00)	(2.84)
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	447,481,314,000.00	447,481,314,000.00	-	-





No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
1.2.3	Dana Alokasi Umum/Gaji Guru SMA/SMK	1,603,623,745,000.00	1,603,623,745,000.00	-	-
1.2.4	Dana Alokasi Khusus / DAK Non Fisik	994,326,302,000.00	994,326,302,000.00	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	341,117,985,539.00	341,117,985,539.00	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,065,250,000.00	1,065,250,000.00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,430,000,000.00	3,430,000,000.00	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	322,986,730,539.00	322,986,730,539.00	-	-
1.3.7	Dana Insentif Daerah	13,636,005,000.00	13,636,005,000.00	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. Kalteng, 2019

3.2.1.3. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Belanja Daerah mengalami peningkatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.396.902.645.604,28 atau 7,27% dari jumlah yang dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.5.456.290.313.010,14 menjadi sebesar Rp.5.853.192.958.614,42. Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.2,931,696,107,295.28 mengalami kenaikan sebesar Rp.266,102,271,415.14 atau 9,98% persen dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.665.593.835.880,14.
- b. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.2,921,496,851,319.14 mengalami kenaikan sebesar Rp.130,800,374,189.14 atau sebesar 4,69 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.790.696.477.130,00..





Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dianggarkan sebesar Rp.1.385.624.677.009,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.27.885.424.487,00 atau 2,05 dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.357.739.252.522,00
- 2) Belanja Bunga
Belanja Bunga tidak dianggarkan pada APBD murni tahun 2019.
- 3) Belanja Subsidi
Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp. 1.163.300.000,00, tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019.
- 4) Belanja Hibah
Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp.580.800.741.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.26.762.840.000,00 atau 5,02% dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. Rp.553.037.901.000,00.
- 5) Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.16.000.000.000,- tidak ada perubahan dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019.
- 6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT)





berdasarkan target penerimaan provinsi. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp.885.356.082.916,19 mengalami kenaikan sebesar Rp.211.749.006.928,14 atau 31,44 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.673.607.075.988,05.

- 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp.42.455.000.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.1.295.000.000,- atau -2,96 persen dari APBD Murni Tahun 2019 sebesar Rp.43.750.000.000,00.

- 8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.20.296.306.370,09 atau masih tetap sama seperti APBD Murni Tahun Anggaran 2019.

Komposisi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 sebagaimana tabel 3.7 di bawah ini





Tabel 3.7
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perubahan RKPD
Tahun 2019

No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	5,456,290,313,010.14	5,853,192,958,614.42	396,902,645,604.28	7.27
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,665,593,835,880.14	2,931,696,107,295.28	266,102,271,415.14	9.98
2.1.1	Belanja Pegawai	1,357,739,252,522.00	1,385,624,677,009.00	27,885,424,487.00	2.05
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	1,163,300,000.00	1,163,300,000.00	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	553,037,901,000.00	580,800,741,000.00	27,762,840,000.00	5.02
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	673,607,075,988.05	885,356,082,916.19	211,749,006,928.14	31.44
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	43,750,000,000.00	42,455,000,000.00	(1,295,000,000.00)	(2.96)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20,296,306,370.09	20,296,306,370.09	-	-
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8)	2,665,593,835,880.14	2,931,696,107,295.28	266,102,271,415.14	9.98
2.2	BELANJA LANGSUNG	2,790,696,477,130.00	2,921,496,851,319.14	130,800,374,189.14	4.69
2.2.1	Belanja Pegawai	261,371,395,442.00	-	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,087,802,903,240.80	-	-	-
2.2.3	Belanja Modal	1,441,522,178,447.20	-	-	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2.2.1 s/d 2.2.3)	2,790,696,477,130.00	2,921,496,851,319.14	-	-
D	JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH (B + C)	5,456,290,313,010.14	5,853,192,958,614.42	396,902,645,604.28	7.27





No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
E.	SURPLUS / (DEFISIT)	(308,846,621,491.14)	(693,702,677,095.42)	(384,856,055,604.28)	124.61

3.2.1.3. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2019

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.698.702.677.095,42, yang bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD TA. 2019 sebesar Rp.698.702.677.095,42 tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp.389.856.055.604,28 atau 126,23% dibandingkan APBD TA. 2019 sebesar Rp.308.846.621.491,14. Untuk pos pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian, dan Penerimaan piutang pada APBD Murni dan Perubahan APBD tahun 2019 tidak dianggarkan.

Dalam Perubahan APBD TA. 2019, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00,- yang mana dana tersebut merupakan SiLPA Penyertaan Modal Banama Tingang yang belum sempat terealisasi Tahun 2018, sedangkan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Pemberian Pinjaman Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 tidak dianggarkan.

Proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 disajikan pada tabel 3.8.

Tabel proyeksi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah tersebut di atas, dirangkum dalam tabel rekapitulasi proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi





Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2019
sebagaimana tabel 3.9.

Tabel 3.8
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD
Tahun 2019

No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	308,846,621,491.14	698,702,677,095.42	389,856,055,604.28	126.23
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	308,846,621,491.14	698,702,677,095.42	389,856,055,604.28	126.23
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman	-	-		-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-		-
3.1.6.	Penerimaan Piutang	-	-		-
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)	308,846,621,491.14	698,702,677,095.42	389,856,055,604.28	126.23
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-





No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
H	PEMBIAYAAN NETTO (F-G)	308,846,621,491.14	693,702,677,095.42	384,856,055,604.28	124.61
I	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA) (H+E)	-	-	-	-

Tabel 3.9
Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD
Tahun 2019

No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	5,147,443,691,519.00	5,159,490,281,519.00	12,046,590,000.00	0.234
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,594,702,205,980.00	1,611,468,361,980.00	16,766,156,000.00	1.05
1.1.1.	Pajak Daerah	1,293,984,175,080.00	1,301,984,175,080.00	8,000,000,000.00	0.62
1.1.2.	Retribusi Daerah	12,527,130,900.00	12,538,286,900.00	11,156,000.00	0.09
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	71,350,000,000.00	80,105,000,000.00	8,755,000,000.00	12.27
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	216,840,900,000.00	216,840,900,000.00	-	-
1.2.	DANA PERIMBANGAN (TRANSFER PUSAT)	3,211,623,500,000.00	3,206,903,934,000.00	(4,719,566,000.00)	(0.15)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Sumber Daya Alam	166,192,139,000.00	161,472,573,000.00	(4,719,566,000.00)	(2.84)
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	447,481,314,000.00	447,481,314,000.00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Umum/Gaji Guru SMA/SMK	1,603,623,745,000.00	1,603,623,745,000.00	-	-





No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
1.2.4	Dana Alokasi Khusus / DAK Non Fisik	994,326,302,000.00	994,326,302,000.00	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	341,117,985,539.00	341,117,985,539.00	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,065,250,000.00	1,065,250,000.00	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,430,000,000.00	3,430,000,000.00	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	322,986,730,539.00	322,986,730,539.00	-	
1.3.7	Dana Insentif Daerah	13,636,005,000.00	13,636,005,000.00	-	-
2.	BELANJA DAERAH	5,456,290,313,010.14	5,853,192,958,614.42	396,902,645,604.28	7.27
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,665,593,835,880.14	2,931,696,107,295.28	266,102,271,415.14	9.98
2.1.1	Belanja Pegawai	1,357,739,252,522.00	1,385,624,677,009.00	27,885,424,487.00	2.05
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	1,163,300,000.00	1,163,300,000.00	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	553,037,901,000.00	580,800,741,000.00	27,762,840,000.00	5.02
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	673,607,075,988.05	885,356,082,916.19	211,749,006,928.14	31.44
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	43,750,000,000.00	42,455,000,000.00	(1,295,000,000.00)	(2.96)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20,296,306,370.09	20,296,306,370.09	-	-
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8)	2,665,593,835,880.14	2,931,696,107,295.28	266,102,271,415.14	9.98
2.2	BELANJA LANGSUNG	2,790,696,477,130.00	2,921,496,851,319.14	130,800,374,189.14	4.69
2.2.1	Belanja Pegawai				





No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
		261,371,395,442.00	-	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,087,802,903,240.80	-	-	-
2.2.3	Belanja Modal	1,441,522,178,447.20	-	-	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2.21 s/d 2.2.3)	2,790,696,477,130.00	2,921,496,851,319.14	-	-
D	JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH (B + C)	5,456,290,313,010.14	5,853,192,958,614.42	396,902,645,604.28	7.27
E.	SURPLUS / (DEFISIT)	(308,846,621,491.14)	(693,702,677,095.42)	(384,856,055,604.28)	124.61
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	308,846,621,491.14	698,702,677,095.42	389,856,055,604.28	126.23
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	308,846,621,491.14	698,702,677,095.42	389,856,055,604.28	126.23
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang	-	-	-	-
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)	308,846,621,491.14	698,702,677,095.42	389,856,055,604.28	126.23
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Insvestasi) Pemerintah Daerah	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-





No.	Uraian	APBD TA. 2019	R-APBD PERUBAHAN TA. 2019	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
3.2.4	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
H	PEMBIAYAAN NETTO (F-G)	308,846,621,491.14	693,702,677,095.42	384,856,055,604.28	124.61
I	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA) (H+E)	-	-	-	-

3.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Perubahan arah kebijakan pendapatan daerah

Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 disusun dalam tahun berjalan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, objek, jenis dan kelompok pendapatan daerah serta berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 ini yang baru mencapai Rp.1.896.241.303.631,47 atau 36,84 persen dari target murni sebesar Rp.5.147.443.691.591,00, dirasa perlu melakukan perubahan target.

3.2.2.2. Perubahan arah kebijakan belanja daerah

Belanja daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap dinas, badan, lembaga, unit satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal sesuai ketersediaan dana.





Oleh sebab itu, setiap anggaran belanja yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran harus didasarkan pada :

- a. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan dokumen perencanaan lainnya, serta tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
- b. Mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimum. Semua penggunaan barang diharapkan dapat memberikan pemanfaatan dan peningkatan pelayanan yang semakin efektif dan semakin efisien dan merata sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Pada Perubahan RKPD Tahun 2019, dengan target pendapatan daerah mengalami kenaikan, maka belanja daerah juga mengalami kenaikan, baik pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Penambahan belanja daerah tersebut digunakan untuk pendanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan publik dan adanya penambahan program dan kegiatan baru. Disamping itu juga terdapat penggeseran anggaran, baik penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

Belanja Daerah mengalami peningkatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.396.902.645.604,28 atau 7,27% dari jumlah yang dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.5.456.290.313.010,14 menjadi sebesar Rp.5.853.192.958.614,42. Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.2.931.696.107.295,28 mengalami kenaikan sebesar Rp.266.102.271.415,14 atau 9,98 persen dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.665.593.835.880,14.
- b. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.2.921.496.851.319,14 mengalami kenaikan sebesar Rp.130.800.374.189,14 atau





sebesar 4,69 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.790.696.477.130,00. Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3.2.2.3. Perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2019 ini diperkirakan terjadi defisit anggaran karena jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan. Defisit ini ditutup dari pembiayaan netto dengan jumlah yang sama. Pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit tersebut meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.698.702.677.095,42, yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD TA. 2019 sebesar Rp. 698.702.677.095,42 tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp.389.856.055.604,28,- atau 126,23% dibandingkan APBD TA. 2019 sebesar Rp.308.846.621.491,14, Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari:





a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2018, yaitu sisa lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD Tahun Anggaran yang telah ditutup (2018). Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.698.702.677.095,42. Pada APBD murni Tahun Anggaran 2019 SiLPA dianggarkan sebesar Rp.389.856.055.604,28. Dengan melihat realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2018 tersebut, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, SiLPA yang dianggarkan bertambah sejumlah Rp.389.856.055.604,28 atau 126,23% dibandingkan dari yang direncanakan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019.

Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2018, sesuai pasal 161 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa keadaan yang menyebabkan digunakannya SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara lain:

- 1) Memenuhi penyediaan anggaran pada Belanja Tidak Langsung kewajiban yang bersifat wajib, seperti melunasi seluruh kewajiban bunga, pembayaran pokok utang, Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pendanaan lainnya yang bersifat wajib.
- 2) Mendanai kenaikan gaji, tunjangan PNS, dan tambahan penghasilan daerah.
- 3) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-PD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir





penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencarian dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pencairan dana cadangan tidak dianggarkan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah penerimaan jumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada APBD Tahun Anggaran 2019 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang





diberikan kepada pemerintah pusat dana/atau pemerintah daerah lainnya.

Pada APBD Tahun Anggaran 2019 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak dianggarkan.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan Piutang Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya.

Pada APBD Tahun Anggaran 2019 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.





BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan merupakan berbagai poin penting dalam agenda-agenda pembangunan yang penyusunannya berkaitan langsung dalam pencapaian target perencanaan pembangunan daerah. Dalam implementasinya, prioritas pembangunan merupakan arah kebijakan yang akan menjadi acuan dalam perumusan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas. Dalam menyusun berbagai prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah termasuk rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang efisien.

RKPD Tahun 2019 merupakan tonggak dalam merealisasikan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Tema RKPD 2019 **“Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah Melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah”**. Sasaran makro pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 berdasarkan data capaian Tahun 2018² dan analisis proyeksi dari Bank Indonesia¹ dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1

Sasaran Makro Pembangunan berdasarkan capaian Tahun 2018

No	Indikator Makro	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,80-6,20 ¹
2	Laju Inflasi	2,90-3,30 ¹
3	Tingkat Kemiskinan	4,5-5 ²
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,0 ²
5	IPM	70-71 ²
6	Gini Rasio	0,287 ²





Penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*;
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2018; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Dalam menyusun Perubahan RKPD Kalimantan Tengah tahun 2019 ini selain harus memedomani dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD dan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021, tetapi juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2019. Hal ini dikarenakan, RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai





efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Tengah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 terdapat 10 tujuan dan 17 sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam bentuk prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2019. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas

Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya





pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Konsep tata ruang yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi pilihan bagi setiap daerah untuk menunjukkan perhatian pemerintah akan keharmonisan dan keasrian lingkungan sebagai pendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kesesuaian antara program pembangunan dengan rencana tata ruang, ternyata pemanfaatan rencana tata ruang untuk program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum seperti yang diharapkan/ direncanakan. Sehingga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesesuaian tata ruang, karena kesesuaian tata ruang akan menjadi instrumen penapis awal sebelum dokumen amdal dinilai oleh komisi amdal. Guna meningkatkan kesesuaian tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah **Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten, dengan indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang adalah sebesar 45 persen pada tahun 2019.**

2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas

Indikator kemakmuran dan kemajuan suatu daerah salah satunya adalah penyediaan fasilitas infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas dan ketercukupan energi yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor yang paling penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya capaian optimalisasi pembangunan infrastruktur utamanya dalam aksesibilitas wilayah, pemerataan listrik dan air, hingga kelayakan pemukiman penduduk Provinsi Kalimantan Tengah.

Terwujudnya infrastruktur yang merata (sarana dan prasarana) agar mempermudah akses ke seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dengan lancar, sehingga sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial dapat berkembang dengan baik. Guna untuk mewujudkan peningkatkan infastruktur yang berkualitas di





wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. **Meningkatnya konektivitas antar daerah, dengan indikator persentase jalan mantap sebesar 75,85 persen dan persentase konektivitas jalan sebesar 96,6 persen.**
- b. **Meningkatnya ketercukupan energi, dengan indikator meningkatnya rasio desa berlistrik sebesar 89,3 persen dan rasio elektrifikasi sebesar 83,5.**

3. Meningkatkan pembangunan sumber daya air, dengan pesisir dan pantai

Sumberdaya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62 persen dari luas wilayah nasional. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sumberdaya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumberdaya, pengelolaan harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholders terutama masyarakat di pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

Peningkatan sumberdaya air di Kalimantan Tengah, antara lain melalui pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air, meliputi wilayah sungai, danau, daerah irigasi, daerah rawa dan tambak, termasuk pengamatan pantai, pengendalian banjir dan tanah longsor dalam rangka menunjang produktivitas sektor pertanian, terutama pangan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan petani. Terkait pengelolaan daerah pesisir dan pantai, dilakukan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, akses pemodal dan pasar teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kestabilan arus komoditas barang dan jasa maupun arus penduduk sebagai subjek pembangunan daerah pesisir dan pantai. Guna meningkatkan pembangunan sumberdaya air, daerah pesisir dan pantai di Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah: **Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator produktivitas padi sebesar 39,04 persen , nilai**





tukar petani sebesar 103,5 persen, dan nilai tukar nelayan sebesar 105,90 persen.

4. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Berbagai rumusan program dan kegiatan dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Untuk mendorong perekonomian rakyat, seluruh paket kebijakan harus menyentuh kepentingan masyarakat, membantu atau mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat dan juga sekaligus mengatasi kesenjangan antara golongan dengan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.

Pembangunan daerah akan lebih efektif apabila bertumpu pada kompetensi dasar dan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki Kalimantan Tengah. Seluruh aspek kegiatan ekonomi harus dilakukan secara seimbang untuk mencapai ekonomi yang stabil. Pembangunan ekonomi daerah juga harus memperhatikan perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam realisasi perwujudan peningkatan kualitas ekonomi daerah, maka **sasaran pembangunan** Provinsi Kalimantan Tengah yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator tingkat kemiskinan sebesar 4,8 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0 persen.**
- b. Meningkatkan daya beli masyarakat, dengan indikator laju inflasi sebesar 4,2-4,3 persen dan pendapatan perkapita sebesar 47,61 persen.**

5. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi hingga kini. Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas.





Seluruh aspek kegiatan ekonomi harus dilakukan secara seimbang untuk mencapai keadaan ekonomi yang baik. Hal ini dikarenakan masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat yang mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Salah satu wujud untuk meningkatkan kesejahteraan daerah adalah tingkat perekonomian yang baik dan konsisten, karena itu pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Guna untuk mewujudkan perekonomian masyarakat secara konsisten maka **sasaran pembangunan** yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya sektor ekonomi hijau, dengan indikator Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB sebesar 24,65 persen; dan**
- b. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan indikator sasaran pada tahun 2019:**
 - 1) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 17,1 persen.**
 - 2) Tingkat Pengangguran sebesar 4,00 persen.**

6. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan *good governance* diperlukan peran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan masyarakat





berpartisipasi aktif maka segala hal/tindakan yang berindikasi negatif dapat dicegah atau diatasi.

Pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, guna untuk mewujudkan hal tersebut, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator Opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);**
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84.**
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah, dengan indikator Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 75; dan**
- d. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai BB dan Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai BB.**

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh

Sumber daya manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia sendiri diukur melalui tiga komponen yakni kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, maupun kesejahteraan perekonomian masyarakat. Ketiga hal tersebut dirumuskan dalam indeks pembangunan manusia yang dapat memberikan analisa maupun kajian keterbandingan kualitas pembangunan sumber daya manusia antar wilayah dan antar waktu. Fokus utama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan yang merata di seluruh daerah, selain itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan pentingnya informasi ilmu pengetahuan.

Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya yang berkualitas dan pembangunan ekonomi. Peningkatan mutu dan akses di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat di Kalimantan tengah. Dengan ini pemerintah harus mampu memberikan pelayanan





kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Program pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Guna mewujudkan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. **Meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator IPM sebesar 70,70, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,00 tahun dan Angka Harapan Usia Sekolah 13,50 tahun; dan**
- b. **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan Angka Harapan Hidup sebesar 71,40 tahun.**

8. Meningkatkan peran sektor pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang multidimensi dari rangkaian proses pembangunan. Perkembangan pariwisata akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan daerah tujuan wisata sehingga industri pariwisata berkembang dengan baik.

Kalimantan memiliki kekayaan dan berbagai suku serta keragaman budaya dan alam yang unik, salah Kalimantan Tengah. Pengelolaan industri pariwisata dilaksanakan dengan memanfaatkan keberagaman adat budaya secara arif dan bijaksana dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah yang didominasi hutan hujan tropis, dan terdapat banyak fauna dan flora yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata. Guna mewujudkan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah **Terpasarkannya destinasi wisata, dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara sebesar 553,000 wisatawan.**

9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.





Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya hayati dan non-hayati, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka kesadaran untuk memiliki lingkungan yang bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya.

Guna mewujudkan peningkatan lingkungan yang nyaman, asri, dan layak huni, maka **sasaran pembangunan** daerah yang harus dicapai di tahun 2019 adalah **Menurunya degradasi lingkungan, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 72,5.**

10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan

Setiap daerah diberikan hak untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat mendorong perkembangan dan pembangunan Daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan daerah merupakan satuan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan pada berbagai bidang. Program dan kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana salah satunya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya untuk mendukung kemandirian daerah, dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah. Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan upaya koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah. Guna untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan





pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah **Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sebesar 35-40 persen, persentase PAD terhadap pendapatan transfer sebesar 50-55 persen dan persentase belanja langsung (BL) terhadap APBD sebesar 45-50 persen.**

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

Prioritas pembangunan merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang telah ditetapkan dan menjadi tonggak capaian menuju target sasaran 5 (lima) tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Prioritas pembangunan yang dirumuskan pada perencanaan jangka menengah akan menjadi dasar bagi penyelesaian setiap permasalahan di daerah. Oleh karenanya, perlu adanya integrasi dan sinkronisasi setiap dokumen perencanaan antar periode maupun antar hierarki pemerintah sebagai benang merah agar arah pembangunan tetap berada pada koridor yang sama.

Prioritas pembangunan daerah berisikan program dan kegiatan unggulan Perangkat dengan skala prioritas paling tinggi (*output&outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, perlu adanya identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya, melalui identifikasi permasalahan akan diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan langkah taktis yakni menyusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan terkait dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. **Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang Wilayah**, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - b. Pembangunan Wilayah sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang.
2. **Pemerataan Infrastruktur Wilayah**, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Komunikasi dan





- b. Informasi.
 - c. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi.
 - d. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jalan Antar Kabupaten/Kota yang Layak.
 - e. Peningkatan Ketercukupan Energi
3. **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai**, dengan fokus pada :
- a. Pemberdayaan Petani
 - b. Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya Air
 - c. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai
4. **Stabilitas Ekonomi Daerah**, dengan fokus pada :
- a. Menjamin Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Strategis
 - b. Pengurangan Beban dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
 - c. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
 - d. Peningkatan Nilai Tambah Produksi Regional Kalimantan Tengah
 - e. Pemberian Kemudahan Dalam Berbagai Investasi di Kalimantan Tengah
5. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat**, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan Produksi Hasil pada setiap Subsektor Pertanian
 - b. Perluasan Lapangan Usaha dan Kesempatan Berkarya di Instansi Pemerintahan dan Swasta
 - c. Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Komunitas Tertentu
 - d. Pengembangan Usaha Rumah Tangga yang Mendorong Perekonomian
6. **Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi**, dengan fokus pada:
- a. Pengelolaan Administrasi Aset dan Keuangan Daerah yang Baik
 - b. Peningkatan SDM Aparatur Pelaksana Pemerintahan
 - c. Peningkatan Standar Pelayanan Publik
 - d. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - e. Peningkatan Pelayanan Publik atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi
 - f. Perbaikan Sistem Tata Kelola Pemerintahan
7. **Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas**, dengan fokus pada :





- a. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Guru pada Semua Jenjang Pendidikan
 - b. Pengoptimalisasi Manajemen Pendidikan
 - c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - d. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - e. Peningkatan Promosi Kesehatan Masyarakat
 - f. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
8. **Pengelolaan Industri Pariwisata**, dengan fokus pada :
- a. Pengembangan objek-objek pariwisata
9. **Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan**, dengan fokus pada :
- a. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - b. Pengelolaan Pengendalian Kebakaran Hutan Secara Sistematis
 - c. Pelaksanaan Legalisasi Kepemilikan Lahan
 - d. Pengelolaan Pertambangan
 - e. Pemanfaatan hasil SDA
10. **Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD**, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas harus melihat kriteria yang menyangkut batas kewenangan diartikan bahwa program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk refokusing program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta bagian dari upaya peningkatan kerjasama (sinergitas) dan koordinasi antar Perangkat Daerah maupun antar tingkatan pemerintahan. Diharapkan dengan refokusing dan kerja sama antar Perangkat Daerah ini akan meningkatkan kinerja pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

4.3. Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mengimplementasikan kebijakan nasional, sehingga secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus melaksanakan berbagai penyempurnaan dan revisi kebijakan untuk mendukung pencapaian





tujuan nasional. Oleh karena itu, pada rumusan arah kebijakan (program dan prioritas) perencanaan pembangunan tahun 2019 telah dilakukan penajaman arah kebijakan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan nasional dengan tetap membawa karakteristik daerah sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Berikut penajaman prioritas pembangunan daerah tahun 2019 yang merupakan turunan dari penajaman priroitas pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Tabel 4.2
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Visi: Terwujudnya Kemandirian Ekonomi dan Sosial Kalimantan Tengah yang Berlandaskan Keunggulan Teknologi dan Potensi Sumber Daya Daerah				
Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2016	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi				
Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas	Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang	22%	45 %
Misi 2: Pengelolaan Infrastruktur				
Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya konektivitas antardaerah	Prosentase jalan mantap	47,52 %	75,85
		Persentase konektivitas jalan	89,4 %	96,6





Visi: Terwujudnya Kemandirian Ekonomi dan Sosial Kalimantan Tengah yang Berlandaskan Keunggulan Teknologi dan Potensi Sumber Daya Daerah

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2016	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya ketercukupan energy	Rasio desa berlistrik	74,8 %	89,3
		Rasio elektrifikasi	69,8 %	83,5
Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, & Pantai				
Meningkatkan pembangunan sumber daya air, daerah pesisir & pantai	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Produktivitas padi (kw/ha)	35,07 kw/ha	39,04
		Nilai Tukar Petani (NTP)	97,74	103,5
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,84	105,90
Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan				
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam pembentukan PDRB Kalimantan (%)	10,85 %	14
		Laju pertumbuhan ekonomi(%)	7,01 %	7,0
		Tingkat kemiskinan (%)	5,91 %	4,8





Visi: Terwujudnya Kemandirian Ekonomi dan Sosial Kalimantan Tengah yang Berlandaskan Keunggulan Teknologi dan Potensi Sumber Daya Daerah

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2016	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju inflasi (%)	4,74 %	4,2 – 4,3
		PDRB perkapita (Juta Rp.)	40,14	47,61
Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten	Meningkatnya sektor ekonomi hijau	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	23,50 %	24,65
	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	16,15 %	17,1
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54 %	4,00
Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah				
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	WTP	WTP





Visi: Terwujudnya Kemandirian Ekonomi dan Sosial Kalimantan Tengah yang Berlandaskan Keunggulan Teknologi dan Potensi Sumber Daya Daerah

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2016	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,23	84
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	47,52	75
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	B	BB
		Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah	B	BB
Misi 6: Pendidikan, Kesehatan &Pariwisata				
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	IPM	68,53	70,70
		Rata-rata Lama Sekolah	8,03	9,00
		Angka Harapan Usia Sekolah	12,22	13,50





Visi: Terwujudnya Kemandirian Ekonomi dan Sosial Kalimantan Tengah yang Berlandaskan Keunggulan Teknologi dan Potensi Sumber Daya Daerah

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2016	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,54	71,40
Meningkatkan peran Sektor Pariwisata	Terpasarkannya destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	38.927	553.000

Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya degradasi lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	70,37	72,5

Misi 9: Pengelolaan Pendapatan Daerah

Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah (%)	36,60	35-40
		Persentase PAD terhadap total pendapatan transfer (%)	58,32	50-55
		Persentase belanja langsung terhadap APBD (%)	47,38	45-50





Dalam perubahan RKPD Tahun 2019 sasaran dan kebijakan suatu program dan kegiatan sangat berpengaruh dalam tercapainya perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode RPJMD. Dengan adanya penekanan tersebut, diharapkan program prioritas yang tahun 2019 akan menjadi fondasi dan dukungan yang positif pada pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal.







BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

5.1. Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam tahun berjalan diarahkan untuk dapat mencapai sasaran dan target pembangunan yang merupakan substansi RKPD. Daftar yang disajikan meliputi nomenklatur program dan kegiatan, deskripsi dan target *output* dan *outcome* yang harus diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan serta lokasi pelaksanaan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD di tetapkan. Perubahan RKPD tersebut akan menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Daftar program/kegiatan berikut komponen-komponennya disusun menurut urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan). Pagu indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebagaimana Tabel 5.1

Daftar program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Tahun 2019 Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah.





TABEL 5.1
PAGU INDIKATIF SKPD PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018
(BELANJA LANGSUNG)

NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan	99,066,222,000.00	152,007,650,000.00	57,096,748.00	348,740,179,500.00	376,227,851,936.00	27,487,672,436.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 152.175.688,-
2	Dinas Kesehatan	7,461,932,000.00	3,920,250,000.00	73,628,240.00	72,012,045,313.00	73,572,820,730.00	1,560,775,417.00	KEGIATAN TIM KPBU Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 52.147.177,-
3	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	14,603,844,000.00			63,189,597,630.00	63,441,749,734.00	252,152,104.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp.
4	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)				120,000,000,000.00	139,405,504,930.00	19,405,504,930.00	Utang Obat dan BMHP TA. 2018, Rp. 19.405.504.930





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
5	RSJ Kalawa Atei	2,265,419,000.00			30,239,872,725.00	30,462,944,788.00	223,072,063.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 223.072.063
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62,121,071,000.00		10,384,300.00	1,209,901,427,368.00	1,209,966,195,812.00	64,768,444.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 54.384.144
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				113,688,000,000.00	113,717,302,891.00	29,302,891.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 29.302.891
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				15,092,245,345.14	15,106,401,365.14	14,156,020.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 14.156.020
9	Satuan Polisi Pamong Praja				20,012,000,000.00	20,021,422,043.00	9,422,043.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 9.422.043
10	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran				8,441,000,000.00	8,455,610,625.00	14,610,625.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp.





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
								14.610.625
11	Dinas Sosial				26,600,000,000.00	27,255,892,536.00	655,892,536.00	Insentif Tagana 537.750.000 & Gaji Tekon 85jt Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 33.142.536
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				8,318,000,000.00	8,359,177,558.00	41,177,558.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 41.177.558
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				10,310,000,000.00	10,312,196,406.00	2,196,406.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 2.196.406
14	Dinas Ketahanan Pangan				9,115,000,000.00	9,128,289,615.00	13,289,615.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 13.289.615





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
15	Dinas Lingkungan Hidup	555,071,000.00		9,643,278.00	8,385,280,250.00	8,412,741,792.00	27,461,542.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 17.818.264
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		1,751,314,000.00		10,856,394,070.00	10,862,964,489.00	6,570,419.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 6.570.419
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				17,136,000,000.00	17,149,667,418.00	13,667,418.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 13.667.418
18	Dinas Perhubungan				11,979,000,000.00	11,990,183,095.00	11,183,095.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 11.183.095
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				29,715,000,000.00	29,736,679,923.00	21,679,923.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 21.679.923
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		3,014,090,000.00		13,766,090,000.00	13,780,764,160.00	14,674,160.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp.





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
								14.674.160
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				11,254,362,500.00	11,310,087,640.00	55,725,140.00	Pembayaran kekurangan gaji Tekon 2 org untuk 5 bulanUtang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 29.725.140
22	Dinas Pemuda dan Olahraga				13,058,000,000.00	14,755,178,594.00	1,697,178,594.00	onor Tekon 168jt, listrik 16jt, Perjadi DD 75jt, Perjadin LD 125jt, Perbaikan Bis 20jt, Listrik Tuah Pahoe 85jt, Tambah daya gedung indor 10jt, IBAB 100jt, Seleksi Paski 105.100.000, penugasan paski 225 jt, Haornas 100jt, Sepakbola wanita &





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
								Sepakbola wanita U12 300jt Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 18.078.594
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,123,081,000.00	3,127,000,000.00		22,746,501,545.00	25,264,238,059.00	2,517,736,514.00	Penampilan Penari Kalteng di Istana Negara 1M, Kekurangan Tenaga Kontrak 500jt, Gelar Budaya 1M Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 17.736.514
24	Dinas Perpustakaan dan Arsip				8,893,000,000.00	9,156,654,382.00	263,654,382.00	Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 13.654.382





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	10,000,521,000.00		18,389,822.00	30,548,065,555.00	30,702,114,770.00	154,049,215.00	Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 25.659.393
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6,500,000,000.00			62,245,570,000.00	60,227,968,822.00	-2,017,601,178.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 32.398.822
27	Dinas Perkebunan	2,050,000,000.00			30,212,000,000.00	32,263,428,200.00	2,051,428,200.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 1.428.200
28	Dinas Kehutanan	6,136,354,000.00		680,000.00	31,504,389,000.00	94,839,274,379.00	63,334,885,379.00	Mendahului perubahan dari Silpa D-BHDR Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 52.480.983
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			5,315,000.00	34,243,337,154.86	34,280,798,355.86	37,461,201.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp.





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
								32.146.201
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2,083,039,000.00			23,367,039,000.00	23,400,392,257.00	33,353,257.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 33.353.257
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				19,860,383,274.00	20,250,297,189.00	389,913,915.00	Membayar kekurangan gaji Tenaga Kontrak dan Honorarium Tim Dewan Riset Daerah (DRD) Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 39.913.915
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah				38,422,086,892.14	38,436,216,191.14	14,129,299.00	PPKD KORPRI 500jt, PORPI 150jt, Pemb. Kelem. 200jt Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 14.129.299





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
33	Badan Pendapatan Daerah				32,546,100,607.86	32,546,100,607.86	0.00	
34	Badan Kepegawaian Daerah				10,470,000,000.00	10,789,793,458.00	319,793,458.00	Kegiatan Pelantikan & Seleksi Tenaga Kontrak Satpol PP Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 19.793.458
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				48,126,879,400.00	48,155,840,717.00	28,961,317.00	Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 28.961.317
36	Biro Pemerintahan				6,144,000,000.00	6,444,000,000.00	300,000,000.00	
37	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat				19,750,000,000.00	22,900,000,000.00	3,150,000,000.00	Kegiatan Keagamaan 4M, Pengurangan 866.265.000 + 16.265k
38	Biro Hukum				4,995,255,000.00	5,496,193,000.00	500,938,000.00	Penanganan Litigasi & dan Pembayaran Gaji Tekon 2 orang Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA.





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
								2018, Rp. 938.000
39	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam				4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	0.00	
40	Biro Administrasi Pembangunan				6,475,000,000.00	6,475,000,000.00	0.00	
41	Biro Pengadaan Barang dan Jasa				4,254,000,000.00	4,254,000,000.00	0.00	
42	Biro Organisasi				3,346,000,000.00	3,346,000,000.00	0.00	
43	Biro Umum				97,815,000,000.00	99,719,538,404.14	1,904,538,404.14	KUNKER PRESIDEN 1,2 dan lain-lain Rp. 411.830.938,14 Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 292.707.466
44	Biro Protokol dan Komunikasi Publik				9,371,000,000.00	9,971,000,000.00	600,000,000.00	Foto Gubernur & Kegiatan Prioritas lainnya
45	Sekretariat DPRD				50,030,775,000.00	55,073,535,735.00	5,042,760,735.00	Fasilitasi Anggota Baru Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 42.760.735
46	Badan Penghubung				6,140,350,000.00	6,162,768,641.00	22,418,641.00	Utang beban





NO	PERANGKAT DAERAH	DAK FISIK	DAK NON FISIK	SISA DANA DI RKUD (DAK FISIK)	REVISI PAGU PENYESUAIAN DAK PAGU INDIKATIF TA. 2019	PAGU PERUBAHAN TA. 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN
								jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 22.418.641
47	Inspektorat				13,280,250,000.00	13,810,070,071.00	529,820,071.00	Pemeriksaan Reguler Utang beban jasa listrik, air, telepon dan internet TA. 2018, Rp. 29.820.071
	JUMLAH	214,966,554,000.00	163,820,304,000.00	175,137,394.00	2,790,696,477,130.00	2,921,496,851,319.14	130,800,374,189.14	

Dari tabel 5.1 terlihat terdapat penambahan Pagu Anggaran pada Perubahan RKPD ini sebesar Rp.130.800.374.189,14 dari Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.2.790.696.477.130,00 menjadi Rp.2.921.496.851.319,14. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini yaitu Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Tahun 2019 Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah.





Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Evaluasi pelaksanaan RKPD dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan yang ada pada RKPD tahun 2019 dan perkiraan realisasi sampai triwulan II Tahun 2018, mencakup evaluasi terhadap realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan dan realisasi capaian target RPJMD.

Perubahan RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya Perubahan RKPD menjadi acuan setiap SKPD dalam memfinalkan rancangan Perubahan Renja-PD dan menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini. Dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :

1. Melengkapi data dan informasi untuk program dan kegiatan pada Perubahan Renja-PD, sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.





2. Melaksanakan program dan kegiatan secara disiplin sebagai bagian dari bentuk pengabdian pada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya di tingkat Perangkat Daerah untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan mempermudah penyusunan program dan kegiatan untuk penyusunan APBD di tahun anggaran berikutnya.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dengan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan (2018), dapat diketahui pencapaian hasil pembangunan berupa program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I atau triwulan II tahun 2019. Untuk itu perlu kerja keras lagi untuk mencapai target di tahun 2019 ini, sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta target masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

